

Hasil Pemantauan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pertengahan September 2014–Akhir Juli 2015



M. Sulton Mawardi

Ruhmaniyati

Ana Rosidha Tamyis

Muhammad Syukri

Syaikhu Usman

*Dokumen ini telah disetujui untuk pratinjau dalam jaringan, tetapi belum melewati proses *copyediting* dan *proofreading* sehingga dapat menyebabkan perbedaan antara versi ini dan versi final. Bila Anda mengutip dokumen ini, indikasikan sebagai "draft".

LAPORAN PENELITIAN SMERU

**Hasil Pemantauan
Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)
Pertengahan September 2014–Akhir Juli 2015**

M. Sulton Mawardi
Ruhmaniyati
Ana Rosidha Tamyis
Muhammad Syukri
Syaikhu Usman

**Disampaikan kepada
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)/
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)**

The SMERU Research Institute

Oktober 2015

TIM PENELITIAN

Peneliti SMERU

M. Sulton Mawardi

Ruhmaniyati

Ana Rosidha Tamyis

Muhammad Syukri

Syaikhu Usman

Peneliti Lapangan

Ridwan Munzir (Koordinator)

Ratna Yunita

Khairu Syukrillah

Siti Hidayati

Foto Sampul: Dokumentasi The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya studi ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada *Poverty Reduction Support Facility* (PRSF) atas dukungan pendanaan yang diberikan. Kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PRSF (Bapak Abdurrahman Syebubakar dan Bapak Abhishek Gupta) yang telah memberikan berbagai masukan untuk perbaikan laporan ini. Ketiga, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para fasilitator program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan seluruh anggota Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB) di 10 desa lokasi pemantauan Program PKKPM yang telah bersedia bekerja sama serta memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pemantauan. Para fasilitator ini adalah Fasilitator Kabupaten (FKab), Fasilitator Kecamatan (FK), Kader Pemberdayaan Masyarakat desa (KPMD), dan Kader Dusun di masing-masing kabupaten/kecamatan/desa sampel pemantauan.

Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak pemerintah desa lokasi pemantauan Program PKKPM yang telah memberikan izin untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut. Tanpa dukungan dan izin dari pihak pemerintah desa tersebut, studi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Hasil Pemantauan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM). Pertengahan September 2014–Akhir Juli 2015

M. Sulton Mawardi, Ruhmaniyati, Ana Rosidha Tamyis, Muhammad Syukri, dan Syaikhu Usman

Penurunan angka kemiskinan yang melambat pada beberapa tahun terakhir telah mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya menerapkan strategi terobosan baru untuk mengatasinya. Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang baru adalah melalui Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B).

Pada 2014, Bappenas telah mengujicobakan strategi P2B dalam bentuk program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di Jawa Tengah. Program pemberdayaan ini berfokus pada pengembangan aset sosial, aset SDM, dan aset keuangan. Melalui sistem Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB), anggota mendapat pendampingan, pelatihan, dan pinjaman modal usaha/penyaluran kerja. Per Juni 2014, ujicoba PKKPM yang dilaksanakan di 10 desa, berhasil membentuk 154 KPB dengan anggota 2.713 orang.

Lembaga Penelitian SMERU menjadi pemantau atas proses pelaksanaan ujicoba tersebut. Tujuannya adalah mendapatkan informasi tepat waktu bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Terdapat 6 isu pokok yang dipantau, yaitu (i) persiapan yang meliputi verifikasi calon peserta dan sosialisasi program, (ii) dinamika aktivitas KPB, terutama kegiatan pertemuan dan menabung rutin, (iii) rencana usaha/kerja, berupa pembuatan proposal dan pelatihan, (iv) distribusi, penggunaan dan pengembalian pinjaman, (v) pelaksanaan usaha dan penyaluran kerja, dan (vi) peningkatan kapasitas peserta program, terutama perubahan perilaku mereka.

Konsep PKKPM dapat dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO). Beberapa aspek teknis masih menjadi penghambat, seperti pelaksana yang masih mengurus PNPM Perdesaaan dan verifikasi peserta yang kurang akurat. Namun, pada 2015 beberapa aspek kelemahan teknis itu telah diperbaiki sehingga pelaksanaan PKKPM dapat menjadi lebih baik. Tantangan pelaksanaan PKKPM adalah keberlangsungan pendampingan. Setelah menjalankan usaha, anggota KPB tetap memerlukan pendampingan, terutama untuk memperbaiki mutu produk dan perluasan pasar.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat miskin; Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan; Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Kelompok Penghidupan Berkelanjutan

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR KOTAK	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vii
RANGKUMAN EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pendekatan Pelaksanaan Pemantauan Pilot Program PKKPM	2
1.3 Gambaran Umum Wilayah Pilot Pemantauan PKKPM	4
1.4 Profil Umum Masyarakat	6
1.5 Profil Masyarakat Miskin	7
II. PERSIAPAN PELAKSANAAN	10
2.1 Sosialisasi Program	10
2.2 Perekrutan Fasilitator	11
2.3 Pelatihan Fasilitator	13
2.4 Verifikasi Rumah Tangga Miskin Calon Anggota KPB	15
III. KPB DAN KEGIATANNYA	16
3.1 Pembentukan KPB	16
3.2 Pelatihan Penguatan Kapasitas KPB	17
3.3 Dinamika KPB	19
3.4 Pendampingan KPB	39
IV. PERSIAPAN AKTIVITAS USAHA DAN KERJA	43
4.1 Penyusunan Proposal Usaha dan Kerja	43
4.2 Verifikasi Proposal (Pemilihan dan Penetapan Proposal)	47
4.3 Pelatihan Usaha dan Kerja	48
4.4 Penyaluran dan Pencairan Dana	54
V. PELAKSANAAN USAHA DAN PENYALURAN KERJA	57
5.1 Perkembangan Jenis Mata Pencaharian	57
5.2 Pelaksanaan Usaha	58
5.3 Usaha Individu	58
5.4 Penyaluran Kerja	65
5.5 Angsuran BLM	66
VI. PERUBAHAN KAPASITAS PESERTA PKKPM: SUATU INDIKASI AWAL	68
6.1 Perubahan Kapasitas Modal SDM	68
6.2 Perubahan Kapasitas Modal Sosial	72
6.3 Perubahan Kapasitas Modal Keuangan/Ekonomi	74
VII. CATATAN PENUTUP	79
7.1 Kesimpulan	79
7.2 Rekomendasi	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja Monitoring dan KPB Sampel Pilot Program PKKPM	3
Tabel 2. Tingkat Kemiskinan di Desa Lokasi Pilot Program PKKPM Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga (KK).	5
Tabel 3. Penilaian terhadap Aset Masyarakat Miskin dan Nonmiskin Menurut FGD Elit dan FGD Masyarakat Miskin Nonanggota KPB	6
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Anggota KPB	7
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Anggota KPB	7
Tabel 6. Kepemilikan Tabungan Anggota KPB Sebelum Menjadi Peserta PKKPM	8
Tabel 7. Keberagaman Mekanisme, Jadwal, dan Jumlah Peserta Sosialisasi Program PKKPM	11
Tabel 8. Jumlah Fasilitator dan Pendamping Program PKKPM	12
Tabel 9. Hasil Penilaian Pelatihan Fasilitator Tahap 2	14
Tabel 10. Hasil Penilaian Pelatihan Fasilitator Tahap 3	14
Tabel 11. Jumlah Kelompok dan Jumlah Anggota KPB di Setiap Lokasi Pilot Saat Awal Pembentukan	16
Tabel 12. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas KPB	17
Tabel 13. Perbandingan Kondisi Perkembangan Antara KPB Sampel Scorecard dan KPB Sampel Utama Dalam Pelaksanaan Pelatihan Penguatan KPB	19
Tabel 14. Persentase Pertumbuhan Jumlah KPB dan Anggota KPB pada Q1 Hingga Q3	20
Tabel 15. Frekuensi Pertemuan Rutin KPB	23
Tabel 16. Tingkat Kehadiran Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin	25
Tabel 17. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Dan Kehadiran Anggota Dalam Pertemuan Antara KPB Sampel Scorecard dan KPB Sampel Utama	27
Tabel 18. Persentase Kehadiran Pengurus KPB Dalam Pertemuan Rutin	28
Tabel 19. Tingkat Keaktifan Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin	29
Tabel 20. Persentase Anggota KPB yang Menabung Pokok	30
Tabel 21. Persentase Anggota KPB yang Menyetor Tabungan Sukarela	30
Tabel 22. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Menabung Antara KPB Sampel <i>Scorecard</i> dan KPB Sampel Utama*	32
Tabel 23. Jumlah Dana Tabungan Per KPB (Rupiah)	33
Tabel 24. Persentase Anggota KPB yang Melakukan Peminjaman	34
Tabel 25. Persentase anggota KPB Yang Melakukan Pembayaran Angsuran Tepat Waktu Saat Pertemuan Rutin	36
Tabel 26. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Peminjaman Antara KPB Sampel <i>Scorecard</i> dan KPB Sampel Utama	36
Tabel 27. Jumlah Dana Pinjaman Yang Bergulir (Rupiah)	37

Tabel 28. Persentase KPB yang melakukan pemutakhiran Buku Tabungan Kelompok dan Anggota Pada Pertemuan Rutin	37
Tabel 29. Persentase Kehadiran Fasilitas dalam Pertemuan Rutin	40
Tabel 30. Persentase Kehadiran KPMD dalam Pertemuan Rutin	40
Tabel 31. Hasil Penilaian KPB Terhadap Kinerja KPMD dan Penilaian KPMD Terhadap Kinerja Dirinya Sendiri Pada KPB Sampel Scorecard (15 KPB) dan KPB Sampel Utama (30 KPB)	42
Tabel 32. Persentase Anggota KPB Yang Mengajukan Proposal Dan Jumlah Proposal Yang Berkumpul	45
Tabel 33. Persentase Anggota KPB Yang Proposalnya Lolos Verifikasi dan Banyaknya Proposal Yang Lolos Verifikasi	46
Tabel 34. Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Anggota KPB	50
Tabel 35. Persentase Keikutsertaan Anggota KPB Sampel dalam Pelatihan Dan Kesesuaian Proposal Usaha/Kerja Yang Diajukan Dengan Pelatihan Usaha/Kerja yang diikuti	52
Tabel 36. Persentase Kesesuaian antara Jenis Pelatihan Usaha dengan Realisasi Usaha	52
Tabel 37. Persentase Kesesuaian antara Proposal dengan Realisasi Usaha	53
Tabel 38. Persentase Kesesuaian antara Proposal Usaha, Training vokasional yang Diikuti, dan Realisasi Usaha Yang dijalankan Oleh Anggota KPB	54
Tabel 39. Rata-rata Proposal dan Realisasi Pinjaman BLM Anggota KPB	55
Tabel 40. Sumber Pendapatan Tunai Rumahtangga Sampel Studi Kasus Rumahtangga	58
Tabel 41. Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Individu	59
Tabel 42. Persepsi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Saat ini dan Lima Tahun Mendatang	69
Tabel 43. Kondisi Sebelum dan Sesudah PKKPM Terkait Tabungan	76
Tabel 44. Penggunaan Dana Tabungan Peserta PKKPM Sebelum dan Sesudah Keberadaan PKKPM	77
Tabel 45. Lembaga Pinjaman yang Diakses Peserta PKKPM	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Jumlah KPB	20
Gambar 2. Perkembangan Jumlah Anggota KPB	21

DAFTAR KOTAK

Kotak 1 Beberapa Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Pilot PKKPM Tahun 2014	5
Kotak 2 Kondisi Modal Sosial Anggota Program PKKPM	8

Kotak 3 Pemahaman dan Expektasi Anggota terhadap Program PKKPM	9
Kotak 4 Pertemuan Rutin KPB Menjadi Kebutuhan Anggota	24
Kotak 5 Masyarakat Miskin Mampu Menabung?	33
Kotak 6 Pinjaman bagi Orang Miskin: untuk konsumsi atau investasi sama pentingnya	35
Kotak 7 Usaha Bersama KPB Bina Karya	47
Kotak 8 Penggunaan BLM untuk Kebutuhan Non-produktif	60
Kotak 9 Kasus Usaha Kelompok	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel A.1. Korelasi Variabel: Kehadiran Pengurus – Kehadiran Anggota	84
Lampiran 2	Tabel A.2. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Pelaksanaan Pertemuan Rutin	85
Lampiran 3	Tabel A.3. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Kehadiran Anggota	86
Lampiran 4	Tabel A.4. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Kehadiran Pengurus	87
Lampiran 5	Tabel A.5. Korelasi Variabel: Pertemuan Rutin – Jumlah Anggota yang Menabung	88
Lampiran 6	Tabel A6. Korelasi Variabel: Pertemuan Rutin – Jumlah Uang Tabungan Anggota	89
Lampiran 7	Modal Sosial Rendah, Studi Kasus Rumah tangga Ibu Harum, Anggota KPB “Tani Sukses”, Desa F4, Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.	90
Lampiran 8	Kegiatan Menabung: Kasus Ibu Kamelia, anggota KPB “Sendang Putih”, Desa C1, Kecamatan C, Kabupaten Pemalang	92
Lampiran 9	Meminjam Sebagai Coping Strategi Masyarakat Miskin, Studi Kasus Rumah tangga, Ibu Kemuning, Anggota KPB “Cempaka”, Desa E1, Kecamatan E, Pekalongan.	93
Lampiran 10	Cerita Narasi Usaha Anggota KPB	94
Lampiran 11	Cerita Narasi Anggota KPB yang Keluar Kelompok	107

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	Basis Data Terpadu
BKAD	Badan Kerjasama Antar Desa
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
CEA	Community Employment Assesment
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Faskab	Fasilitator Kabupaten
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FK	Fasilitator Kecamatan
K1	Kunjungan 1
K2	Kunjungan 2
KPB	Kelompok Penghidupan Berkelanjutan
KPKN	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
MAD	Musyawarah Antar Desa
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Musdes	Musyawarah Desa
Musdus	Musyawarah Dusun
PKKPM	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
PJOK	Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
PL	Pendamping Lapangan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPU	Perguliran dan Pendampingan Usaha
PRSF	Poverty Reduction Support Facility
PTO	Petunjuk Teknis Operasional
Q1	Kuartar 1 (pertengahan September-pertengahan Desember 2014)
Q2	Kuartar 2 (pertengahan Desember 2014-pertengahan Maret 2015)
RLF	<i>Revolving Loan Fund</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga

RTM	Rumah Tangga Miskin
RW	Rukun Warga
Satker	Satuan Kerja
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLS	Satuan Wilayah Setempat
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPP	Simpan Pinjam untuk Perempuan
TPK	Tim Pelaksana Kegiatan
UPK	Unit Pengelola Keuangan

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Laju penurunan kemiskinan yang melambat pada beberapa tahun terakhir merupakan sinyal perlunya menerapkan upaya penanggulangan kemiskinan baru. Melalui RPJMN 2015-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya mempercepat laju penurunan kemiskinan dengan memprakarsai dan menekankan kembali perlunya menerapkan tiga strategi utama penganggulangan kemiskinan. Yakni (i) mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan (iii) mengembangkan alternatif penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pada 2014, Bappenas telah melakukan ujicoba strategi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) dalam bentuk program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di Jawa Tengah (mencakup 10 desa di Kabupaten Brebes, Pemalang dan Pekalongan). Fokusnya adalah pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat miskin di bidang modal sosial, sumberdaya manusia, dan modal keuangan. Melalui sistem kelompok (dinamakan KPB-Kelompok Penghidupan Berkelanjutan), peserta program mendapatkan pendampingan dan pelatihan secara intensif serta pinjaman modal usaha/penyaluran kerja (BLM-Bantuan Langsung Masyarakat). Tujuannya adalah kapasitas masyarakat miskin di ketiga aspek modal tersebut meningkat sehingga mereka mampu mempunyai sumber penghidupan yang lebih terjamin keberlanjutannya. Ujicoba program ini telah berhasil membentuk 154 KPB dengan total anggota 2.713 orang (Juni 2014).

Pengelolaan program ini di lapangan menggunakan mekanisme dan dilaksanakan oleh pelaksana PNPM Perdesaan (fasilitator kabupaten dan fasilitator kecamatan). Di tingkat desa mereka dibantu oleh KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Dusun) yang secara khusus diangkat untuk mendampingi KPB.

Mulai awal September 2014 hingga akhir Juli 2015, Lembaga Penelitian SMERU melakukan pemantauan secara eksternal dan independen terhadap proses pelaksanaan ujicoba program. Secara umum tujuannya adalah mendapatkan informasi tepat waktu sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan program.

Aspek Persiapan

Bappenas telah melaksanakan sosialisasi PKKPM kepada berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, efektivitasnya belum optimal sehingga pelaksanaan program di lapangan juga belum optimal. Beberapa hal yang menyebabkannya antara lain (i) waktu sosialisasi terbatas, (ii) pelaksana masih belum sepenuhnya mampu beranjak dari paradigma pembangunan lama yang cenderung lebih mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur fisik, (iii) tidak ada tambahan fasilitator kecamatan (FK) yang secara khusus melaksanakan PKKPM.

Verifikasi calon peserta program juga tidak sepenuhnya berlangsung akurat, karena prosesnya tidak sepenuhnya terlaksana secara layak. Akibatnya sebagian peserta program PKKPM tidak seluruhnya masyarakat miskin. Jumlah inclusion error ini bervariasi dari 5% hingga 51%.

Dinamika Kegiatan KPB

Secara garis besar, peserta program ini diharuskan membentuk kelompok menurut satuan domisili dengan anggota sekitar 20 orang. Mereka mendapatkan hak berbagai pelatihan dan dampingan untuk meningkatkan kapasitas dirinya dan mendapatkan pinjaman BLM. Sebaliknya mereka berkewajiban melakukan pertemuan rutin mingguan dan melakukan tabungan rutin.

Sejak terbentuk hingga akhir Agustus 2015, jumlah KPB dan anggotanya mengalami penurunan, masing-masing sebesar 9.7% dan 24.9%. Faktor utama yang menyebabkannya meliputi (i) kebosanan, (ii) pendamping belum mampu merancang kegiatan reguler yang kreatif. Faktor ini juga menjadi pangkal menurunnya frekuensi pertemuan rutin sebesar 30,1% dan kehadiran anggota sebesar 42%.

Kinerja pertemuan rutin yang menurun juga berimbas pada aktivitas menabung. Frekuensi anggota yang menabung pokok dan sukarela pada saat pertemuan rutin menurun sebesar 34% dan 15%. Namun, secara nominal jumlah tabungan anggota justru mengalami peningkatan, yakni dari rata-rata Rp Rp1.302.167 per KPB atau Rp51.478 per anggota (kuartal I) menjadi Rp2.668.272 per KPB atau Rp217.350 per anggota (kuartal III). Mereka tetap menyetor tabungan meskipun tidak hadir dalam pertemuan rutin. Aktivitas menabung tetap mereka lakukan selain karena merupakan kewajiban program, juga karena mereka telah merasakan manfaatnya sebagai sumber pinjaman bagi mereka sendiri (interloaning). Hal ini terlihat dari makin banyaknya anggota yang mengakses pinjaman, yakni dari 34% dari total anggota pada Q1 menjadi 75% pada Q3. Umumnya mereka menggunakan pinjaman interloaning untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk berobat dan pendidikan anak.

Persiapan Aktivitas Usaha dan Kerja.

Para anggota KPB mulai mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sejak sekitar 6 bulan sebelum mendapatkan akses tahapan kegiatan selanjutnya, yakni (i) penyusunan proposal usaha/kerja dan (ii) pelatihan vokasional. Hasil pemantauan sampel (30 KPB dengan 427 anggota) menunjukkan 82,2% mengajukan proposal usaha individual, 12,9% usaha kelompok, dan 2,8% kerja. Dari jumlah proposal ini, yang lolos verifikasi sebanyak 99.7%. Alasan umum yang melatari dominannya proposal usaha individu antara lain adalah untuk menghindari peluang terjadinya konflik antaranggota. Sementara itu alasan jumlah proposal kerja yang sangat sedikit dilatari oleh (i) mereka umumnya sudah berumah tangga dan telah menetap di desanya masing-masing, dan (ii) peluang kerja sebagai buruh/karyawan umumnya lebih banyak tersedia di luar desa/kecamatan dan mereka tidak bersedia bekerja di tempat yang jauh dari domisilinya.

Jenis usaha dan kerja yang dipilih umumnya pada sektor yang banyak dikerjakan oleh warga di lingkungannya, atau pekerjaan yang sudah mereka kenal sebelumnya. Sebagian peserta program menjadikan usaha yang dirintisnya sebagai sumber pendapatan utama dan sebagian lainnya menjadikannya sebagai usaha sampingan. Secara konseptual, peserta program seharusnya mendapatkan pelatihan vokasional sesuai dengan bidang usaha/kerja sesuai proposalnya. Dalam praktiknya, pelaksana program di sebagian lokasi pilot tidak sepenuhnya memedomani asas ini. Akibatnya terdapat 18.5% jenis pelatihan yang tidak sesuai dengan proposal. Ditambah dengan adanya peserta program yang mengubah keputusan jenis usaha setelah menerima pelatihan, tingkat kesesuaian antara proposal, jenis pelatihan dan jenis usaha yang dijalankan hanya 63,5%.

Distribusi, Penggunaan dan Pengembalian BLM

BLM merupakan komponen program yang bersifat opsional dan kompetitif antar KPB. Penentuan kuota BLM masing-masing KPB berdasarkan kinerja KPB dengan menggunakan indikator tertentu, seperti frekuensi pertemuan rutin dan kinerja tabungan anggota. Atas dasar ini, rata-rata anggota KPB menerima BLM sebesar 86% dari pengajuan. Per Juli 2015, studi kasus pemantauan ini menunjukkan tidak semua anggota KPB menggunakan BLM untuk membiayai usaha seperti tercantum dalam proposal. Beberapa alasan yang melatarinya meliputi (i) belum menjalankan usaha dengan skala penuh, (ii) menambah modal usaha lainnya, dan (iii) memenuhi kebutuhan konsumtif. Dua faktor terakhir ini bisa terjadi antara lain karena proses verifikasi proposal yang kurang akurat.

Untuk mengangsur BLM, PKKPM memberikan diskresi cukup besar kepada peserta program dalam menentukan pilihan jangka waktu pengembalian, suku bunga maupun mekanisme angsurannya. Peserta dapat memilih jangka waktu pengembalian antara 12-18 bulan. Suku bunga pinjaman fleksibel, tergantung kesepakatan masing-masing kelompok sehingga tingkat bunga yang berlaku berkisar 0.2%-1,5% per bulan. Demikian juga halnya dengan mekanisme angsuran. Para anggota KPB dapat memilih mekanisme angsuran tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap 6 bulan atau membayarnya sekaligus pada akhir periode pinjaman. PKKPM memberikan fleksibilitas demikian karena masing-masing jenis usaha mempunyai karakter *cashflow* berbeda.

Sampai dengan pertengahan Juli 2015, terdapat gejala sebagian anggota KPB terlambat mengangsur BLM, baik angsuran anggota ke kelompok (dana angsuran masih digunakan untuk keperluan lain) maupun angsuran kelompok ke UPK (adanya penyeragaman tanggal penyetoran, namun belum dibarengi dengan penyeragaman tanggal angsuran anggota ke kelompok).

Pelaksanaan Usaha dan Penyaluran Kerja.

Sampai dengan akhir Juli 2014, sebagian besar peserta program telah mulai menjalankan usaha. Hasil studi kasus terhadap usaha individu dan kelompok menunjukkan sebagian besar telah memperoleh keuntungan, sebagian kecil mengalami kerugian, dan sebagian lainnya belum teridentifikasi karena merupakan usaha jangka panjang (seperti penggemukan dan pembiakan sapi dan kambing). Anggota KPB yang memilih opsi penempatan kerja belum satupun yang terealisasi. Hal ini terjadi karena PKKPM belum secara sistematis melakukan upaya memfasilitasi mereka mendapatkan pekerjaan.

Terkait dengan pelaksanaan usaha, kendala utama yang mereka hadapi saat ini adalah kesulitan memperluas pasar. Di dalamnya termasuk aspek peningkatan kualitas produk, kemasan produk, kemampuan membangun relasi bisnis, negosiasi dan promosi.

Peningkatan Kapasitas Peserta Program.

Tujuan utama program pemberdayaan masyarakat miskin yang paling esensial adalah merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak peserta program dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Meskipun demikian, PKKPM yang baru berlangsung satu tahun telah menunjukkan beberapa indikasi capaian hasil awal yang positif. Beberapa diantaranya meliputi:

- (i) Perubahan Kapasitas Modal SDM: Selain mampu meningkatkan ketrampilan vokasional, PKKPM antara lain telah mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta program untuk mengembangkan potensinya meraih kesejahteraan yang lebih baik.
- (ii) Perubahan perilaku: Beberapa perilaku positif yang muncul akibat PKKPM antara lain mencakup inisiatif menabung, peningkatan disiplin, pola penggunaan anggaran rumah tangga yang lebih terencana, serta kemauan meningkatkan pendapatannya.
- (iii) Peningkatan modal sosial: Mekanisme kelompok dalam PKKPM telah meningkatkan kekerabatan dan memeperkuat kerjasama dan gotong royong dan perluasan jaringan.
- (iv) Peningkatan kapasitas modal keuangan/ekonomi: Melalui pelatihan vokasional, kegiatan interloaning dan penyediaan pinjaman BLM, peserta program mendapatkan peningkatan akses terhadap sumber permodalan. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk membuka usaha baru dan atau melanjutkan/meningkatkan skala usaha yang telah mereka jalankan sebelumnya. PKKPM telah mampu menciptakan peningkatan jenis sumber pendapatan bagi peserta program.

Penutup

Secara operasional konsep PKKPM telah dapat dijalankan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan PTO (petunjuk teknis operasional). Beberapa aspek penting yang menyebabkan hal ini terjadi utamanya menyangkut aspek teknis, seperti pelaksana program merangkap sebagai pelaksana PNPM Perdesaan, verifikasi peserta program kurang akurat dan sebagainya. Namun, pada pelaksanaan PKKPM 2015, aspek-aspek kelemahan teknis tersebut telah diperbaiki sehingga pelaksanaan PKKPM berikutnya berpotensi menjadi lebih baik.

Tantangan pelaksanaan PKKPM yang memerlukan perhatian serius adalah menyangkut keberlangsungan pendampingan. Hal ini penting karena anggota KPB setelah memasuki tahapan pelaksanaan usaha tetap memerlukan pendampingan yang intensif, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara garis besar Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah melaksanakan empat kluster program penanggulangan kemiskinan, yakni (i) perlindungan sosial, (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan (iv) program-program prorakyat. Hasilnya antara lain tingkat kemiskinan selama periode 2004-2014 menurun dari 16,66% menjadi 11,25% (Maret 2014). Namun, sejak 2010 tingkat penurunan kemiskinan mengalami pelambatan. Pada periode 2006-2009, rata-rata laju penurunan kemiskinan di atas satu persen per tahun. Pada periode 2010-2013, melambat menjadi kurang dari satu persen per tahun. Akibat pelambatan laju penurunan kemiskinan tersebut, target tingkat kemiskinan RPJMN 2010-2014 sebesar 8%—10% pada 2014 tidak tercapai.

Salah satu faktor yang menyebabkan pelambatan laju penurunan kemiskinan adalah perubahan kontribusi pertumbuhan antarsektor ekonomi. Sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar rakyat miskin, dari tahun ke tahun makin menurun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pertumbuhan sektor jasa yang kurang menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin makin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu dan ditambah faktor makin menguatnya kecenderungan formalisasi pasar tenaga kerja mengakibatkan kelompok miskin yang umumnya berpendidikan dan berketerampilan rendah sulit masuk ke pasar tenaga kerja formal. Di sisi lain, dukungan pengembangan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat miskin masih terbatas¹.

Akibatnya, efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan makin terbatas kapasitasnya dalam mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan. Menyadari kondisi itu, pada RPJMN 2015-2019 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menelorkan strategi terobosan untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan yang lebih komprehensif, integratif, ber sasaran secara spesifik dan berkesinambungan. Secara garis besar strategi ini meliputi (i) mewujudkan sistem perlindungan sosial nasional yang komprehensif, (ii) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan (iii) mengembangkan alternatif penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah memandang perlu melaksanakan strategi pengembangan penghidupan yang berkelanjutan karena masyarakat miskin umumnya sulit meningkatkan kesejahteraannya karena memiliki banyak kendala. Dokumen RPJMN 2015-2019 mencatat bahwa kendala tersebut antara lain meliputi (i) keterbatasan jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan, (ii) penghasilan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, (iii) rentan terhadap guncangan, (iv) keterbatasan keterampilan dan kemampuan memberi nilai tambah pada hasil produksi; dan (v) tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan utama mengalami kendala.

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, Pemerintahan Joko Widodo memasukkan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (P2B) sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain meliputi (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan

¹Suryahadi et.al, Smeru (2010), Binding Constraints to Poverty Reduction in Indonesia.

keterampilan, (iv) peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan, dan (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan kepastian lokasi usaha.

Sasaran P2B selama kurun 2015-2019 meliputi antara lain (i) sebanyak mungkin masyarakat miskin tergabung dalam program P2B yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial dan pelayanan dasar, (ii) terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakat miskin sebagai media peningkatan kapasitas dan keterampilan, (iii) terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dalam membuka kesempatan kerja dan pengembangan wirausaha, dan (iv) terbentuknya kelembagaan keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin mempunyai akses kepada modal dan peningkatan aset kepemilikan.

Pada awal 2014, Bappenas memulai uji coba P2B dalam bentuk Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM)² dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin di bidang modal sosial, modal sumberdaya manusia (SDM), dan modal keuangan. Pilot PKKPM menggunakan dan terintegrasi dengan kerangka mekanisme pelaksanaan PNPM Perdesaan. Namun, Program PKKPM mempunyai muatan substansi yang berbeda, yakni (i) meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, dan (ii) mendorong kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal.

Pilot Program PKKPM telah dilaksanakan di 10 desa di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan (Tabel 1). Lembaga Penelitian SMERU mendapat mandat dari *Poverty Reduction Support Facility* (PRSF) untuk melakukan pemantauan secara eksternal dan independen terhadap semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pilot Program PKKPM. Secara umum tujuan pemantauan ini adalah mendapatkan informasi tepat waktu sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan program.

1.2 Pendekatan Pelaksanaan Pemantauan Pilot Program PKKPM

Sebagian besar mekanisme pemantauan pilot Program PKKPM mengadopsi pendekatan partisipatif yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni (i) pemantauan proses pelaksanaan Program PKKPM, (ii) evaluasi partisipatif oleh peserta program dan masyarakat nonpeserta program, dan (iii) studi kasus rumahtangga.

1.2.1 Komponen Pemantauan Proses

Pemantauan terhadap proses pelaksanaan Pilot Program PKKPM meliputi pemantauan kegiatan pelatihan fasilitator kecamatan (FK) dan KMPD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Dusun), kegiatan di tingkat kelompok atau yang biasa disebut Kelompok Penghidupan Berkelanjutan (KPB), kegiatan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten. Tujuannya untuk menilai apakah proses kegiatan pada berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan asumsi dan rencana program.

Di tingkat KPB, pemantauan proses dilakukan terhadap kegiatan (i) penguatan kelembagaan kelompok, (ii) simpan pinjam, (iii) perencanaan usaha (bisnis), penyusunan proposal usaha/kerja dan pelaksanaannya, dan (iv) kegiatan pelatihan keterampilan. Untuk pemantauan ini, jumlah KPB yang menjadi sampel inti sebanyak 30 KPB dengan sebaran lokasinya proporsional terhadap jumlah

²Pada awalnya program ini disebut Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B).

KPB di masing-masing desa (Tabel 1). Kriteria pemilihan sampel KPB meliputi (i) sebaran lokasi KPB di desa/dusun, (ii) jumlah anggota KPB, (iii) proporsi jumlah anggota KPB menurut jenis kelamin, dan (iv) keragaman penghidupan antardesa/dusun.

Tabel 1. Wilayah Kerja Monitoring dan KPB Sampel Pilot Program PKKPM

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah KPB*	Total KPB Sampel
Brebes	Kecamatan C	Desa C1	28	5
	Kecamatan B	Desa B1	31	5
	Kecamatan A	Desa A1	25	5
Pekalongan	Kecamatan E	Desa E1	27	5
	Kecamatan F	Desa F1	3	1
		Desa F2	3	1
		Desa F3	3	1
		Desa F4	3	1
		Desa F5	45	1
Pemalang	Kecamatan D	Desa D1	26	5
Jawa Tengah			154	30

Keterangan: *) Jumlah KPB pada awal pembentukan (Juni/Juli 2014).

Sumber: Data primer pemantauan

Untuk pemantauan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok, selain memantau semua kegiatan pelatihan penguatan KPB, para pemantau lapangan juga memantau kegiatan pertemuan rutin KPB, yaitu dengan melakukan observasi terhadap kegiatan pertemuan rutin sebanyak 2 kali pada awal dan akhir kuartal. Demikian pula untuk pemantauan perencanaan dan pelatihan usaha. Para Pemantau melakukan pemantauan secara penuh kegiatan tersebut. Sementara untuk pemantauan pelaksanaan usaha, para pemantau lapangan melakukan observasi minimal sebanyak 2 kali kunjungan, yaitu pada awal anggota KPB melakukan usaha dan memasuki akhir masa pemantauan.

1.2.2 Evaluasi Partisipatif

Jenis pemantauan partisipatif menggunakan dua pendekatan, yakni dengan sistem *scorecard*³ dan *focus group discussion* (FGD). Sistem *scorecard* meliputi: (i) penilaian anggota KPB terhadap Program PKKPM (aspek penilaiannya antara lain kegunaan program dan kinerja para KPMD) dan (ii) penilaian pendamping terhadap kinerja fasilitator kecamatan (FK). Jumlah KPB yang menjadi sampel *scorecard* sebanyak 15 KPB di luar 30 sampel KPB utama/inti.

Pemantauan dengan sistem *scorecard* dilakukan dengan mendatangi 15 KPB sampel (di luar 30 KPB sampel utama) setiap akhir kuartal. Sementara untuk FGD, pelaksanaannya berlangsung di semua desa lokasi Program PKKPM dan terdiri dari FGD dengan para elit desa dan FGD dengan masyarakat kelompok miskin yang tidak menjadi anggota KPB. Kegiatan FGD ini dilakukan masing-masing satu kali pada kuartal 1 dan kuartal akhir.

³Untuk menjaga obyektifitas, penilaian dengan sistem *scorecard* dilakukan tanpa sepengetahuan pihak yang dinilai.

1.2.3 Studi Kasus Rumah Tangga

Studi kasus rumahtangga bertujuan menilai kesesuaian dan kegunaan berbagai kegiatan Program PKKPM, kendala yang dihadapi rumah tangga dalam kegiatan tabungan dan pinjaman, partisipasinya dalam semua kegiatan Program PKKPM, dan secara umum untuk menilai manfaat yang seharusnya diberikan program. Jumlah sampelnya mencakup 30 rumah tangga yang tersebar di semua desa. Secara total akan terdapat empat putaran studi kasus rumah tangga. Putaran pertama studi kasus ini dianggap sebagai studi *baseline* dan putaran terakhir akan menjadi semacam studi *endline*. Untuk studi kasus putaran kedua dan ketiga, topiknya akan ditentukan berdasarkan informasi pada hasil studi kasus putaran pertama.

1.2.4 Mekanisme Pemantauan

Mengingat kegiatan pemantauan ini terlaksana setelah Program PKKPM berjalan, maka fokus pemantauannya terbagi menjadi dua bagian, yakni pemantauan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan (*observasi real time*) dan pemantauan terhadap kegiatan yang sudah berjalan (*retrospektif*).

1.3 Gambaran Umum Wilayah Pilot Pemantauan PKKPM

Sepuluh desa yang menjadi lokasi pilot Program PKKPM terdiri dari 9 desa berlokasi di kawasan pegunungan dengan tipologi mata pencaharian pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). Satu desa lainnya (Desa A1 di Kecamatan A) merupakan desa dengan tipologi penghidupan daerah pesisir (nelayan).

Desa pilot Program PKKPM dipilih yang tingkat kemiskinannya tergolong tinggi. Tabel 2 menunjukkan tingkat kemiskinannya jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan rata-rata nasional (2014, 11,25%). Desa lokasi pilot dengan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Desa F5 (25,3%) dan yang tertinggi adalah Desa C1 (94,3%).

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan tersebut. Namun yang menonjol adalah kurangnya kesempatan kerja yang dapat memberikan penghasilan yang layak. Di kawasan pegunungan, ketersediaan lahan yang bisa dibudidayakan terbatas. Sementara itu, di kawasan pesisir untuk menjadi nelayan membutuhkan modal yang cukup besar karena area tangkap yang makin jauh dari pantai. Akibatnya, kebanyakan mereka memilih untuk menjadi buruh tani, buruh nelayan, dan buruh kerja serabutan.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan di Desa Lokasi Pilot Program PKKPM Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga (KK).

Keterangan	Brebes		Pemalang		Pekalongan					
	Kecamatan A	Kecamatan C	Kecamatan B	Kecamatan D	Kecamatan F					
	Desa A1	Desa C1	Desa B1	Desa D1	Desa F4	Desa F2	Desa F3	Desa F5	Desa F1	Desa E1
Jumlah KK	6333	2359	2643	3594	370	582	551	396	364	1102
Jumlah KK miskin	3457	2225	2225	1849	127	197	149	100	171	972
% KK Miskin	54.6	94.3	84.2	51.4	34.3	33.8	27.0	25.3	47.0	88.2

Sumber: Profil desa dan kecamatan pilot PKKPM.

Kotak 1

Beberapa Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Pilot PKKPM Tahun 2014

Uji coba pertama PKKPM dilaksanakan di Jawa Tengah pada 2014. Secara umum, pelaksanaan pilot ini telah berlangsung relatif baik. Meskipun demikian, belum semua aspek PKKPM yang tertuang dalam PTO terlaksana sesuai harapan. Beberapa tantangan dan hambatan dalam uji coba PKKPM meliputi antara lain:

1. Secara konseptual, disain PKKPM pada 2014 belum sepenuhnya bersifat final. Dalam arti masih terdapat beberapa aspek program yang tidak bersifat mengikat sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal. Misalnya, pada waktu itu tidak ada kelembagaan di tingkat pusat yang secara otoritas mempunyai tanggungjawab untuk memastikan terlaksananya semua aspek program.
2. Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pilot PKKPM umumnya masih bersifat sukarela. Hal ini terjadi antara lain karena tidak ada regulasi atau instruksi dari pemerintah pusat yang bersifat afirmatif terhadap peran pemerintah daerah. Akibatnya, respon pemerintah daerah terhadap program ini bervariasi. Selain alasan itu, tingkat respon pemerintah daerah ini juga tergantung pada kapasitas mereka.
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan PKKPM kepada para pemangku kepentingan belum sepenuhnya efektif, terutama bagi pelaksana program di lapangan (FKab/Fasilitator Kabupaten, FK, dan KPMD). Banyak alasan yang melatarinya. Antara lain waktu pelaksanaan sosialisasi yang singkat, beban pekerjaan selain PKKPM, kapasitas SDM, dan pemateri yang kurang mendukung. Kondisi ini berakibat antara lain proses pelaksanaan program di lapangan bervariasi, baik variasi menyangkut waktu pelaksanaannya maupun mekanisme penyelenggaraannya.
4. Menjelang akhir 2014, sejalan dengan berakhirnya program PNPM, hal ini berimbas pada berkurangnya intensitas pendampingan FKab maupun FK kepada PKKPM. Pada periode Januari-awal April 2015, praktis pelaksanaan pilot PKKPM di lapangan berlangsung tanpa disertai pendamping. Akibatnya, banyak jadwal kegiatan program yang terpaksa mundur.
5. Di tingkat desa dan kelompok, beberapa tantangan dan kendala pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian antara lain meliputi:
 - a. Verifikasi penentuan RTM calon peserta program tidak sepenuhnya dijalankan sesuai prosedur PTO.
 - b. Keberlangsungan pendampingan kelompok yang lebih berkualitas.
 - i. Kurang berkualitasnya fasilitator dan KPMD.
 - ii. Tidak adanya inovasi cara dan kegiatan dalam proses pendampingan kelompok.
 - iii. Kurangnya pemberian pemahaman kepada kelompok tentang tujuan berkelompok serta aktivitasnya.
 - c. Sulitnya mencari tenaga pelatih lokal yang berkualitas untuk kegiatan pelatihan vokasional.
 - d. Pembuatan proposal usaha yang dinilai rumit oleh anggota KPB.
 - e. Mekanisme dan pelaksanaan verifikasi proposal usaha yang tidak seragam, kurang profesional dan kurang obyektif (misalnya tidak menilai kebutuhan modal sesuai kebutuhan real proposal).
 - f. Belum adanya perhatian serius, baik dari pengelola program maupun fasilitator lapangan, terhadap fasilitasi pelaksanaan usaha dan kerja, terutama untuk peningkatan kualitas produk dan ekspansi pasar.

1.4 Profil Umum Masyarakat

Tabel 3 menunjukkan karakteristik kondisi pentagonal aset masyarakat di desa lokasi Program PKKPM menurut peserta FGD. Secara umum kondisi aset masyarakat miskin lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat nonmiskin.⁴ Perbedaan yang cukup besar terdapat pada aspek modal keuangan, modal sosial, dan sumberdaya manusia.

Kegiatan PKKPM yang secara sengaja menyasar peningkatan ketiga aset tersebut merupakan program yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dalam peningkatan kapasitas SDM, kegiatan PKKPM melakukan berbagai jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta program. Baik pelatihan yang bersifat peningkatan pengetahuan, seperti pengelolaan keuangan keluarga, kewirausahaan, maupun pelatihan vokasional lainnya. Keharusan peserta Program PKKPM untuk berkelompok dan secara reguler mengadakan pertemuan merupakan upaya memupuk modal sosial. Penyediaan pinjaman modal usaha oleh Program PKKPM merupakan upaya meningkatkan akses modal keuangan bagi masyarakat miskin.

Tabel 3. Penilaian terhadap Aset Masyarakat Miskin dan Nonmiskin Menurut FGD Elit dan FGD Masyarakat Miskin Nonanggota KPB

Aset Masyarakat*)	FGD Elit			FGD Masyarakat Miskin Nonanggota KPB		
	Masyarakat miskin	Masyarakat nonmiskin	Perbedaan	Masyarakat miskin	Masyarakat nonmiskin	Perbedaan
SDM	2,20	2,70	(0,50)	2,63	3,00	(0,38)
SDA	3,00	3,00	0	3,13	3,38	(0,25)
Fisik	2,30	2,50	(0,20)	2,88	3,13	(0,25)
Sospol	2,70	3,10	(0,40)	3,13	3,50	(0,38)
Keuangan	2,90	3,40	(0,50)	2,50	3,25	(0,75)

Keterangan: *) Kondisi masing-masing aset mempunyai skala 0-5. Nilai 0 mengacu pada kondisi paling buruk/sangat kurang dan nilai 5 mengacu pada kondisi yang sangat baik/sangat mencukupi.

Sumber: Diolah dari FGD dengan elit desa dan masyarakat nonanggota KPB

Menurut FGD elit, aspek infrastruktur fisik menempati urutan kedua terburuk (urutan ke tiga menurut FGD masyarakat miskin), baik bagi masyarakat miskin maupun nonmiskin. Hal ini terutama menyangkut ketersediaan jalan penghubung antar desa/dusun yang di beberapa wilayah tidak memadai. Di wilayah Desa C1, misalnya, untuk menjangkau salah satu dusun harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Di Kecamatan F, banyak dusun di lokasi desa pilot yang jalan penghubungnya rusak berat sehingga sulit dilalui kendaraan roda empat, terutama pada musim hujan. Beberapa dusun juga belum mendapatkan aliran listrik dan belum terjangkau sinyal telepon seluler.

⁴Kekecualian hanya terjadi pada aset sumber daya alam (SDA) menurut FGD elit yang menyatakan bahwa baik kelompok miskin maupun non miskin mempunyai akses terhadap SDA dengan nilai yang sama.

1.5 Profil Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin di lokasi pilot Program PKKPM umumnya mempunyai karakteristik yang relatif seragam. Kapasitas dan kualitas SDMnya rendah. Hal ini misalnya tercermin dari proporsi rumah tangga miskin (RTM) yang berpendidikan SMP ke atas hanya sebesar 2%, sementara lainnya (98%) tidak pernah sekolah, tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tamat SD (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Anggota KPB

Tingkat Pendidikan	Brebes	Pemalang	Pekalongan	Rataan
Tidak pernah sekolah	25%	33%	11,0%	23%
SD tidak tamat	38%	33%	38,7%	37%
SD tamat	38%	33%	38,9%	37%
Sedang sekolah (Paket A)	0	0	7%	2%
Tamat SMP	0%	0%	5,0%	2%
Tamat SMA	0%	0%	0,0%	0%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data primer pemantauan

Kondisi SDM yang rendah tersebut antara lain berakibat pada jenis matapecaharian yang mereka miliki. Dari total 30 responden, sebagian besar (57%) mempunyai profesi sebagai buruh harian tidak tetap, baik buruh tani, buruh nelayan dan buruh serabutan lainnya (Tabel 5). Jenis pekerjaan anggota KPB lainnya adalah usaha sendiri (43%), seperti usaha pertanian padi, pedagang keliling, penyadap getah pinus, tukang becak, dan menjual kayu bakar. Keseluruhan jenis pekerjaan demikian umumnya memberikan pendapatan yang kecil. Tanpa upaya khusus, sangat sulit bagi anggota KPB menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Tabel 6 menunjukkan bahwa sebelum menjadi anggota KPB, hanya 20% anggota KPB yang mempunyai tabungan tunai.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Anggota KPB

Status Kerja	Brebes	Pemalang	Pekalongan	Rataan
Penuh waktu/gaji tetap	0%	0%	0%	0%
Paruh waktu/gaji tetap	0%	0%	0%	0%
Gaji harian	88%	67%	17%	57%
Usaha sendiri	12,50%	33%	83%	43%
Tidak bekerja	0%	0%	0%	0%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data primer pemantauan

Tabel 6. Kepemilikan Tabungan Anggota KPB Sebelum Menjadi Peserta PKKPM

Kabupaten	Sebelum ikut PKKPM (%)
Brebes	3,3
Pemalang	0
Pekalongan	16,7
Total	20,0

Sumber: Data primer pemantauan

Di lokasi pilot Program PKKPM, potensi sumber daya ekonomi lokal sebenarnya cukup memadai karena terdapat beberapa potensi peluang usaha. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan menggarapnya. Selain karena pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang rendah, mereka juga tidak memiliki modal. Meskipun di lokasi tersebut terdapat cukup sumber permodalan (bank maupun nonbank) namun mereka tidak mempunyai keberanian meminjam dan atau tidak mempunyai akses peminjaman, khususnya akses peminjaman dari lembaga keuangan formal.

Selain kapasitas modal finansial yang rendah, secara umum para anggota KPB juga tidak memiliki modal sosial yang cukup dalam membentuk jaringan sosial yang memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan. Atau, mereka minimal dapat memanfaatkan ketika menghadapi suatu masalah, khususnya masalah yang terkait dengan kerentanan penghidupannya. Hal ini terlihat, misalnya, sebelum menjadi anggota KPB hanya sekitar 35% anggota KPB yang menjadi anggota organisasi yang berorientasi ekonomi (Kotak 2).

Kotak 2 Kondisi Modal Sosial Anggota Program PKKPM

Modal sosial yang dimiliki oleh anggota KPB masih rendah. Ini terlihat dari profil anggota PKKPM dalam hal keterlibatannya di berbagai jenis kegiatan kelompok atau organisasi yang ada di wilayah mereka. Dari ketiga Kabupaten, rumah tangga miskin di Pekalongan memiliki tingkat keterlibatan yang paling tinggi, mencapai 72%, yaitu di sektor keagamaan. Sementara Brebes adalah kabupaten dengan tingkat keterlibatan rumah tangga miskinnya paling rendah dalam berbagai kegiatan kelompok/organisasi, yaitu paling tinggi hanya 33% di sektor keuangan (arisan). Selain dalam PKKPM, kegiatan kelompok yang banyak diikuti oleh rumah tangga miskin adalah kegiatan agama (pengajian, tahlilan, qosidahan) dan arisan. Sebagian kecil rumah tangga miskin juga ada yang terlibat di kelompok tani, terutama di Pekalongan.

Kelompok PKKPM umumnya dianggap sebagai kelompok/organisasi yang paling penting bagi responden. Setelah PKKPM, kelompok lainnya yang dianggap penting adalah kelompok keagamaan dan kelompok tani. Namun kedekatan dengan sesama anggota PKKPM belum tercermin dalam strategi responden ketika menghadapi masalah. Hal ini dapat dimengerti karena kelompok PKKPM merupakan kelompok baru sehingga antaranggota belum memiliki interaksi yang kuat. Ketika mereka menghadapi masalah dan membutuhkan bantuan, anggota keluarga sendiri masih menjadi tumpuan utama. Hanya sebagian kecil yang mengandalkan teman atau tetangga. Lampiran 7 merupakan gambaran modal atau relasi sosial yang dimiliki oleh seorang anggota PKKPM beserta implikasinya.

Masyarakat miskin pada dasarnya menyadari adanya beberapa kelemahan yang melekat pada dirinya, terutama kelemahan terkait kapasitas SDM, modal sosial maupun modal finansial. Oleh karena itu, ketika pemerintah memberikan peluang peningkatan ketiga modal tersebut melalui Program PKKPM, masyarakat miskin menyambutnya dan bersedia menjadi pesertanya. Namun, pemahaman dan harapan peserta terhadap kegiatan Program PKKPM mempunyai keragaman

cukup tinggi (Kotak 3). Terlepas dari hal ini, kesediaan masyarakat miskin bergabung ke dalam Program PKKPM tentunya disertai harapan akhir bahwa mereka nantinya akan keluar dari kemiskinan yang selama ini mengungkungnya berdasarkan kemampuannya sendiri.

Kotak 3

Pemahaman dan Expektasi Anggota terhadap Program PKKPM

Anggota KPB umumnya mendapatkan informasi awal tentang Program PKKPM dari aparat RT/RW/dusun dan aparat desa. Informasi lebih lanjut kemudian mereka peroleh dari sosialisasi. Namun para anggota ini tampaknya belum mengetahui secara menyeluruh tentang Program PKKPM. Misalnya, terkait syarat-syarat untuk bergabung dalam program ini. Hanya sekitar 50% yang mengetahui sebagian syarat, dan bahkan cukup banyak yang tidak tahu sama sekali. Begitu pula tentang aktivitas Program PKKPM. Satu komponen program yang diketahui oleh semua anggota (100%) adalah komponen pinjaman modal. Komponen Program PKKPM mengenai pelatihan yang merupakan komponen utama program tidak diketahui oleh satu orang pun.

Pemahaman seperti itu sejalan dengan orientasi kesertaan mereka ke dalam Program PKKPM, yaitu mendapatkan pinjaman modal. Sementara untuk komponen pelatihan, hanya di Kabupaten Brebes dan Pemalang yang 100% anggota Program PKKPM berharap mendapatkannya. Di kabupaten Pekalongan, hanya 50% anggota Program PKKPM yang mengharapkan adanya pelatihan. Terkait harapan mendapatkan pendampingan dan keterampilan berorganisasi, 100% anggota Program PKKPM di Brebes dan Pemalang berharap mendapatkannya dan di Pekalongan hanya 33% anggota Program PKKPM yang mengharapkannya. Ketimpangan ekspektasi ini dikarenakan antara lain usaha yang ingin dilakukan oleh anggota PKKPM di Pekalongan adalah pertanian, yang nota bene merupakan pekerjaan tradisional mereka. Oleh karena itu mereka menganggap diri mereka sudah ahli di bidang itu. Sementara di dua kabupaten lainnya, banyak yang ingin melakukan kegiatan usaha yang di luar keahlian tradisional mereka.

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN

2.1 Sosialisasi Program

Meskipun sudah dilaksanakan mulai dari pusat hingga ke desa, sosialisasi program belum berhasil memberikan pemahaman yang merata dan benar terhadap pelaksana program maupun masyarakat. Sosialisasi di tingkat pusat dilakukan di Jakarta pada akhir 2013. Kegiatan sosialisasi di tingkat pusat ini digabung dengan sosialisasi kegiatan MP3KI lainnya, yaitu Quick Wins dan PNPM Penguatan. Selain di Jakarta, kegiatan serupa juga dilakukan di beberapa wilayah lain berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pelaksanaan sosialisasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten digabungkan di Bandung, Semarang pada 10–13 Februari 2014. Dalam kegiatan ini diundang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten lokasi pilot serta pelaksana teknis program di pemerintah maupun konsultan pelaksana dan mitra pembangunan. Selain Bappenas, pada kegiatan sosialisasi ini pejabat Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi tentang keterkaitan antara Program PKKPM dengan PNPM.

Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan pelatihan pertama bagi para fasilitator program. Tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan adalah untuk membangun kesepahaman bersama tentang model fasilitasi yang dibutuhkan dalam kegiatan PKKPM dan bagaimana melaksanakannya. Sosialisasi dan pelatihan yang berlangsung selama empat hari itu dianggap oleh peserta belum memadai karena terlalu banyak yang harus mereka pahami. Di dua hari pertama mereka masih meraba-raba tentang teknis pelaksanaan program, pada dua hari berikutnya mereka sudah harus langsung memikirkan teknis pelaksanaan fasilitasi.

Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa dilakukan beragam, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun jadwalnya. Dari segi teknis pelaksanaannya, di sebagian besar lokasi, dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi di tingkat kecamatan dengan mekanisme yang sama seperti MAD Sosialisasi PNPM Perdesaan Regular.⁵ Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dalam rentang waktu beragam. Sebagian daerah sudah langsung melakukannya setelah mendapatkan sosialisasi awal pada Februari 2014. Sebagian ada yang melakukan sosialisasi baru pada bulan Juni 2014. Hal ini terjadi antara lain karena pada saat bersamaan fasilitator harus memfasilitasi kegiatan lain yang menjadi tanggungjawab mereka, seperti PNPM regular, Quick Wins, PNPM Penguatan dan pilot *revolving loan fund* (RLF).

Dari segi jumlah, peserta berbagai musyawarah tersebut beragam, dan variasinya cukup besar, paling sedikit 31 orang dan paling banyak 149 orang (Tabel 7). Daerah yang jumlah pesertanya sedikit umumnya adalah daerah dengan jumlah penduduk dan jumlah RTM juga sedikit, seperti beberapa desa di Kecamatan F. Dari jumlah yang hadir, peserta lelaki lebih banyak, kecuali di Kecamatan A.

Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada RTM penerima program, tetapi juga kepada masyarakat umum. Namun jumlah peserta sosialisasi dari masyarakat nonmiskin tidak sebanyak yang miskin. Dari kegiatan FGD di tingkat desa diketahui bahwa secara umum masyarakat mengetahui keberadaan Program PKKPM. Pemahaman terhadap Program PKKPM lebih banyak dimiliki oleh

⁵Di Kecamatan B, MAD Sosialisasi tingkat kecamatan tidak dilakukan, tapi langsung Musyawarah Desa Sosialisasi tingkat desa. Alasannya, sosialisasi sudah dilakukan dalam MAD regular, meskipun itu hanya sekilas. Alasan lain adalah efisiensi waktu karena yang menerima program hanya satu desa.

tokoh masyarakat dibanding masyarakat umum. Hal ini disebabkan mereka terlibat lebih sering dengan kegiatan program. Tanggapan rumah tangga nonmiskin dan elit desa beragam terhadap kegiatan PKKPM. Tanggapan positif banyak berhubungan dengan pendekatan program yang lebih mengutamakan peningkatan kapasitas, membangun kebiasaan baik (menabung), dan memberi kesempatan RTM untuk berusaha dan bekerja. Tanggapan negatif lebih banyak ditujukan kepada prosesnya yang lama dan rumit. Mereka menyayangkan kenapa harus mempersulit orang miskin untuk mendapatkan bantuan.

Tabel 7. Keberagaman Mekanisme, Jadwal, dan Jumlah Peserta Sosialisasi Program PKKPM

Kecamatan	Desa	Mekanisme Pelaksanaan	Jadwal pelaksanaan	Jumlah Peserta (orang)	Keterangan
Kecamatan C	Desa C1	MAD-Musdes	Na	Na	na
Kecamatan B	Desa B1	Musdes-Musdus	23 -26 Juni	Dusun 1: 140; Dusun 2: 77; Dusun 3: 132; Dusun 4: 149	na
Kecamatan A	Desa A1	MAD-Musdes-Musdus	17 Februari	114	55 L : 59 P
Kecamatan D	Desa D1	MAD-Musdes-Musdus	24 Februari	79	43 L : 36 P
Kecamatan E	Desa E1	MAD-Musdes-Musdus	29 April	106	56 L : 50 P
Kecamatan F	Desa F1	MAD-Musdes-Musdus	29 April	69	41 L : 28 P
	Desa F3	MAD-Musdes-Musdus	6 Mei	68	57 L : 11 P
	Desa F2	MAD-Musdes-Musdus	13 Mei	49	30 L : 19 P
	Desa F4	MAD-Musdes-Musdus	30 April	31	30 L : 1 P
	Desa F5	MAD-Musdes-Musdus	05 Mei	36	31 L : 5 P

Sumber: Data primer pemantauan

2.2 Perekrutan Fasilitator

Perekrutan fasilitator Program PKKPM telah dilakukan namun belum memenuhi kebutuhan fasilitasi di tingkat kelompok, baik dari segi jumlah maupun kemampuan. Kegiatan fasilitasi Program PKKPM adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok. Namun pada 2014 tidak ada perekrutan fasilitator baru yang khusus diperuntukkan bagi PKKPM. Fasilitator PKKPM adalah fasilitator PNPM Perdesaan yang mendapatkan mandat tambahan untuk menjalankan Pilot PKKPM, terdiri dari fasilitator pemberdayaan dan teknik.

Fasilitator Program PKKPM terdiri dari fasilitator yang disediakan program, yaitu di tingkat kabupaten dan kecamatan, dan fasilitator yang diadakan dan dibiayai oleh masyarakat. Fasilitator yang dibiaya program adalah Fasilitator Kabupaten (Fkab), Fasilitator Kecamatan (FK), dan PL (Pendamping Lokal), sementara yang dibiayai masyarakat adalah kader desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Di sebagian lokasi muncul inisiatif untuk menambah struktur fasilitator dengan kader dusun. Hal ini dikarenakan banyaknya kelompok yang terbentuk sehingga membutuhkan tenaga tambahan untuk memberikan fasilitasi. Di beberapa daerah bahkan TPK yang seharusnya hanya melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan program juga ikut dalam fasilitasi kelompok dan bahkan menerima beban yang sama dengan KPMD. Padahal mereka tidak dilatih sebagai fasilitator dan penunjukannya juga tidak untuk memfasilitasi kelompok.

Untuk pelaksanaan program PKKPM 2015 tidak ada lagi PL dalam tim fasilitasi. Untuk formasi KPMD (desa dan dusun) di sebagian besar wilayah pilot masih sama, hanya ada beberapa penambahan KPMD baru. Yakni, di Desa D1 ada tambahan 2 orang KPMD dan Desa A1 tambahan 2 orang KPMD.

Tabel 8. Jumlah Fasilitator dan Pendamping Program PKKPM

Kabupaten	Kecamatan	Fasilitator dibiayai program		Fasilitator dibiayai masyarakat			Jumlah KPB	Jumlah Anggota
		Jumlah Fasilitator Kecamatan	Jumlah PL	Jumlah KPMD	Jumlah TPK	Jumlah Kader dusun		
Brebes	Kecamatan C	3	2	3	3*	5	26	421
	Kecamatan B	2	2	3	3*	4	27	293
	Kecamatan A	2	2	7	3	0	20	337
Pemalang	Kecamatan D	3	2	6	3	0	26	466
Pekalongan	Kecamatan E	3	2	7	3	0	27	396
	Kecamatan F	2	21	10	15	0	15	223
Total		15	12	36	30	9	141	2.136

Keterangan: *) Di lokasi ini TPK melakukan kegiatan fasilitasi sebagaimana halnya KPMD

Sumber: Data primer pemantauan

2.2.1 Fasilitator di Kecamatan (FK)

Pengadaan FK dan PL adalah tanggungjawab program, dalam hal ini satuan kerja (Satker) program di tingkat provinsi. Pengadaan FK ini bukan hanya untuk memfasilitasi Program PKKPM, tapi juga dan terutama untuk memfasilitasi kegiatan PNPM Perdesaan reguler, PNPM Percepatan, PNPM Penguatan, dan penugasan lainnya. Pendampingan terhadap Program PKKPM hanya sebagian dari tugas mereka.

Di enam kecamatan lokasi pilot, terdapat tambahan⁶ FK yang merupakan fasilitator teknik, sehingga umumnya di setiap kecamatan lokasi pilot Program PKKPM terdapat satu orang FK pemberdayaan dan dua orang fasilitator teknik. Namun dalam perkembangannya, jumlah FK yang tersedia di sebagian lokasi per November 2014 berkurang (Tabel 8). Dari enam kecamatan terdapat tiga kecamatan yang hanya memiliki dua orang FK. Semua FK yang keluar adalah fasilitator teknik. Alasan mereka keluar beragam, seperti dipromosikan menjadi Faskab (kasus Kecamatan F), atau mencari pekerjaan lain (menjadi pekerja di Sulawesi kasus Desa B1 dan menjadi dosen kasus Desa A1).

Namun, pada Desember 2014 para fasilitator tersebut habis masa kontrak untuk penugasan pada program PNPM Perdesaan. Kondisi ini menyebabkan pada periode Januari-Maret 2015 pelaksanaan program agak tidak terkontrol karena tidak ada fasilitator yang bertugas. Pada akhir Maret 2015 rekrutmen untuk fasilitator PKKPM mulai dilaksanakan. Di tingkat kecamatan, formasi fasilitator PKKPM untuk 2015 mendapatkan penambahan satu fasilitator baru, yakni fasilitator PPU (perguliran dan pendampingan usaha) selain dua posisi fasilitator yang sudah ada sebelumnya. Para fasilitator yang direkrut ini adalah ex-fasilitator PNPM Perdesaan yang sebelumnya menjabat di masing-masing lokasi, kecuali kasus di Kecamatan A, Kabupaten Brebes. Di Kecamatan A, semua

⁶Tambahan FK yang dimaksud adalah hasil penugasan baru fasilitator teknik dari lokasi lain.

fasilitator yang direkrut merupakan fasilitator baru yang sebelumnya bertugas di lokasi lain dan dianggap memiliki kinerja yang baik.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa fasilitasi kelompok Program PKKPM bersifat tim. Artinya, seluruh fasilitator bertanggungjawab dalam menyelenggarakan fasilitasi kelompok. Namun dalam kenyataannya, setiap lokasi membuat kebijakan pembagian tugas. Biasanya hanya satu orang FK yang bertanggungjawab atas fasilitasi Program PKKPM dibantu oleh seorang PL. Pada umumnya yang bertanggungjawab terhadap fasilitasi Program PKKPM adalah FK pemberdayaan, meskipun di beberapa lokasi ada juga FK teknik yang mengambil tanggungjawab ini. Namun, pengertian tanggungjawab ini bukan keseluruhan fasilitasi. Umumnya FK bertanggungjawab atas fasilitasi secara umum, yaitu aspek administratif, pembekalan/pelatihan bagi KPMD/kader dusun dan TPK, dan menyampaikan materi dalam pelatihan kelompok. Sementara itu, fasilitasi kelompok utamanya menjadi tanggungjawab KPMD atau kader dusun. Hanya di beberapa lokasi FK intensif mendampingi kelompok.

2.2.2 Fasilitator di Desa

Pengadaan fasilitator di tingkat desa, yaitu KPMD, TPK, atau kader dusun adalah kewenangan masyarakat dengan sumber pembiayaan juga dari masyarakat melalui dana BLM. Kesepakatan pengangkatan KPMD, TPK, atau kader dusun ini dibahas dalam forum musyawarah desa. Seperti terlihat pada Tabel 8, terdapat variasi antar daerah, baik terkait keberadaan dan jumlah KPMD, TPK dan kader dusun, maupun penugasannya. Dari segi jumlah, ada lokasi yang menetapkan paling sedikit dua KPMD dan ada juga yang sampai tujuh orang. Daerah yang memiliki hanya dua atau tiga KPMD biasanya disebabkan jumlah kelompok di desanya sedikit, atau mereka memiliki kebijakan mengangkat kader dusun untuk membantu KPMD. Sementara itu, daerah yang memiliki banyak KPMD biasanya tidak lagi mengangkat kader dusun, karena pengangkatan KPMD sudah mempertimbangkan keterwakilan dusun di desa itu, sedangkan jumlah TPK biasanya sama di setiap desa, yaitu tiga orang.

Fungsi dan tanggung jawab utama KPMD dan kader dusun adalah mendampingi kelompok dalam setiap pertemuan. Selain itu, mereka juga bertugas membantu FK dalam penyampaian materi pelatihan, membantu KPB dalam membuat berbagai dokumen kelompok, rencana kerja kelompok, rencana usaha dan kerja individu dan/atau kelompok. Di sebagian lokasi seperti di Desa B1 dan Desa C1, TPK juga diberi tanggungjawab untuk mendampingi kelompok, meskipun tidak seintensif KPMD dan kader dusun. Dari segi honor biasanya KPMD menerima jumlah yang lebih besar dibandingkan kader dusun dan TPK. Misalnya, di Desa B1 dan Desa C1, KPMD dan TPK mendapat Rp500.000/bulan, sedangkan kader desa hanya mendapat Rp250.000/bulan. Di Kecamatan F, honor untuk KPMD sebesar Rp200.000/bulan dan TPK sebesar Rp125.000/bulan.

2.3 Pelatihan Fasilitator

Program PKKPM merupakan program yang memberikan perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan program, para fasilitator yang mendapat tanggungjawab menjalankan program ini diberi beberapa materi pelatihan khusus. Pada 14-16 April 2014, para pelaksana program PKKPM (Faskab, FK, PL, KPMD) yang jumlahnya sekitar 85 orang mendapatkan pelatihan tahap 2 di Pekalongan. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaksana program dalam berbagai komponen kegiatan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pembentukan kelompok, manajemen kelompok, simpan pinjam, dan pengelolaan keuangan kelompok maupun keluarga. Tabel 9 menyajikan hasil penilaian pelatihan fasilitator tahap 2.

Tabel 9. Hasil Penilaian Pelatihan Fasilitator Tahap 2

1. Penilaian peserta pelatihan		
a. Penyelenggaraan	7,57	
b. Modul	6,97	
c. Kinerja pelatih	7,28 (6,24-8,38)	
2. Hasil Tes Peserta		
	Pre Test	Post Test
a. KPMD	54,09	60,49
b. FK	71,28	76,3
c. Faskab	67,28	72,43
Total	60,97	66,73

Sumber: Data primer pemantauan

Secara umum pelatihan fasilitator tahap 2 telah berlangsung dengan baik, namun pemahaman peserta terhadap materi pelatihan masih kurang. Oleh karena itu pada 9—13 Mei 2014 Bappenas melakukan pembimbingan (*coaching*) di Pekalongan, Brebes dan Pemalang. Materi pembimbingannya sama namun dengan penekanan pada substansi yang dirasakan masih perlu peningkatan, yakni simpan pinjam, pengelolaan keuangan kelompok, dan keluarga.

Pada 3—7 Oktober 2014, Bappenas melakukan pelatihan fasilitator tahap 3 dengan fokus materi tentang kewirausahaan, penyusunan proposal usaha, dan Community Employment Assesment (CEA). Pelatihan ini dilaksanakan di Semarang dan diikuti oleh Faskab, FK, PL, UPK, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), KPMD, kepala desa, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Secara keseluruhan total peserta sekitar 90 orang. Hasil evaluasi terhadap pelatihan tahap 3 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Penilaian Pelatihan Fasilitator Tahap 3

1. Penilaian peserta (%)		
a. Penyelenggaraan	87,7	
b. Modul	78	
c. Kinerja pelatih	84,3	
2. Hasil Tes Peserta ($\geq 75\%$ jawaban benar) (%)		
	Pre Test	Post Test
a. Materi CEA	3	72
b. Materi Kewirausahaan	21,4	19,6

Sumber: Data primer pemantauan

Secara umum penilaian terhadap hasil pelatihan tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

- (i) Penyelenggaraan pelatihan berjalan lancar dan secara umum peserta memberikan penilaian yang baik terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelatihan kecuali aspek persiapan, durasi waktu, dan ruangan pelatihan.
- (ii) Secara umum peserta menilai modul pelatihan sudah baik, namun masih perlu penyempurnaan pada substansi, sistematika, dan kesesuaian modul dengan kebutuhan di lapangan.

- (iii) Peserta pelatihan cukup baik memahami materi CEA dan mampu merencanakan kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan.
- (iv) Penilaian peserta terhadap kinerja pelatih/pemateri juga cukup baik
- (v) Peserta pelatihan mengalami kesulitan memahami materi kewirausahaan. Menindaklanjuti kondisi demikian, pada 4-6 November 2013 Bappenas mengadakan kegiatan coaching kepada para fasilitator di Pemalang, Pekalongan, dan Brebes.

2.4 Verifikasi Rumah Tangga Miskin Calon Anggota KPB

Mengingat keterbatasan kuota peserta program (hanya 500 RTM/desa) dan adanya kriteria kepesertaan program, maka kelayakan calon peserta Program PKKPM harus diverifikasi terlebih dahulu. Mekanisme verifikasinya melalui musdes dan/atau musdus. untuk menjamin obyektifitas pemilihan peserta Program PKKPM. Di semua lokasi pilot, musdus/musdes verifikasi RTM berlangsung pada bulan Mei-Juni 2014.

Secara umum kegiatan musdes/musdus di semua lokasi pilot telah berlangsung dengan baik. Dalam arti proses pelaksanaan verifikasi RTM berlangsung secara partisipatif dan peserta yang hadir dapat menerima hasil verifikasinya. Jumlah anggota masyarakat (lelaki dan perempuan) yang diundang dan hadir dalam musdes/musdus verifikasi bervariasi antardesa/dusun. Untuk musdes, jumlah pesertanya antara 42-540 orang, sedangkan untuk musdus antara 22—148 orang. Komposisi gender yang diundang/hadir dalam musdes/musdus juga sangat bervariasi. Untuk proporsi perempuan yang diundang/hadir, angkanya berkisar 0%—73%.

Terkait dengan proses dan hasil verifikasi RTM peserta Program PKKPM, setidaknya ada dua catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- (i) Tidak semua anggota Program PKKPM merupakan masyarakat miskin. Di beberapa desa, sebagian RTM yang terdaftar dalam BDT, pada 2014 tidak miskin lagi. Namun, rumah tangga tersebut tetap dimasukkan sebagai peserta Program PKKPM. Di desa-desa pilot, jumlah peserta non-miskin bervariasi, mulai dari 5% (Desa C1) hingga 51% (Desa A1)⁷.
- (ii) Proses musdes/musdus di sebagian desa tidak sepenuhnya memegang asas partisipatif. Di sebagian desa tersebut musdes/musdus hanya menjadi semacam formalitas untuk mengesahkan RTM yang sudah ditetapkan oleh pengelola program.

⁷Angka-angka didasarkan pada estimasi dari FK, KPMD, TPK

III. KPB DAN KEGIATANNYA

3.1 Pembentukan KPB

Pembentukan KPB telah dilakukan di semua lokasi pilot dengan pertama-tama mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal RTM yang potensial untuk menjadi anggota KPB. Pembentukan kelompok pada umumnya merujuk kepada satuan lingkungan setempat (SLS), seperti RT, RW, dusun sehingga mencapai jumlah yang ditentukan, yaitu antara 10-20 orang per KPB. Proses pembentukan kelompok dimulai dengan verifikasi RTM berdasarkan BDT. Namun hampir di semua lokasi, verifikasi RTM ini tidak dilakukan sepenuhnya sesuai panduan verifikasi. Oleh karena itu, di hampir semua lokasi terdapat adanya rumah tangga nonmiskin menjadi anggota KPB (*inclusion error*) dan banyak rumah tangga sangat miskin yang justru tidak menjadi anggota KPB (*exclusion error*). Proses selanjutnya yaitu pemilahan data RTM oleh fasilitator berdasarkan lokasi tempat tinggal. Hasilnya adalah daftar sejumlah RTM yang terdiri dari 10–20 orang per KPB. Daftar ini kemudian ditetapkan sebagai daftar anggota kelompok yang disepakati di tingkat desa untuk menjadi KPB.

Jumlah KPB dalam satu desa bervariasi antarlokasi (Tabel 11). Keragaman ini terjadi karena jumlah RTM antarlokasi yang memenuhi kriteria juga beragam. Selain itu, keragaman jumlah kelompok tersebut juga dipengaruhi oleh kuota RTM yang bisa menjadi anggota KPB pada setiap kecamatan/desa (500 RTM per kecamatan). Dengan begitu, rata-rata jumlah kelompok di atas 20 KPB (paling banyak 31) per kecamatan/desa. Namun, di Kecamatan F jumlah KPB rata-rata hanya 3-5 per desa karena jumlah desa di kecamatan ini lebih banyak, sementara jumlah RTMnya lebih sedikit dibanding kecamatan lain.

Tabel 11. Jumlah Kelompok dan Jumlah Anggota KPB di Setiap Lokasi Pilot Saat Awal Pembentukan

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah KPB saat pembentukan	Jumlah Anggota KPB saat pembentukan		
			Awal	Awal		Total
				L	P	
Brebes	Kecamatan B	Desa B1	31	433	67	500
	Kecamatan C	Desa C1	28	NA	NA	494
	Kecamatan A	Desa A1	25	102	378	480
Pemalang	Kecamatan D	Desa D1	26	80	420	500
Pekalongan	Kecamatan E	Desa E1	27	136	341	477
		Desa F2	3	53	10	63
		Desa F3	3	33	8	41
		Desa F4	3	45	4	49
		Desa F5	5	48	8	56
		Desa F1	3	39	14	53
Total			154	NA	NA	2.713

Sumber: data primer pemantauan

Jumlah keseluruhan anggota KPB pada awal pembentukan bervariasi antar kecamatan, yaitu antara 262 orang (Kecamatan F) dan 500 orang (Kecamatan B dan Kecamatan D). Jumlah RTM yang menjadi anggota KPB di Kecamatan F yang hanya setengah dari kuota disebabkan sebagian besar RTM di lokasi ini telah menerima SPP-PNPM. Jumlah anggota masing-masing KPB saat pembentukan bervariasi di dalam dan antardesa, yaitu antara 9—24 orang. Perbedaan ini terjadi karena di setiap SLS jumlah RTM tidak selalu sesuai dengan batasan yang ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3.2 Pelatihan Penguatan Kapasitas KPB

Waktu pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas KPB bervariasi antar lokasi, yaitu antara bulan Juni—Oktober 2014. Materi yang disampaikan dalam pelatihan adalah manajemen KPB, keuangan keluarga, dan simpan pinjam. Pemberi materi adalah FK dibantu KPMD dan TPK (Tabel 12).

Tabel 12. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas KPB

Kecamatan	Desa	Waktu (tahun 2014)	Tempat Pelatihan	Sasaran	Jumlah Peserta (orang)	Penilaian Peserta*	
						Kinerja Pelatih	Modul & Penyelenggaraan
Kecamatan C	Desa C1	9 September	1. SDN Desa C1 2. Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal	Pengurus	78	-(Retro)	-(Retro)
		23,25, 30 September & 2 Oktober 2014	1. SDN Desa C1 2 2. SDN Desa C1 2 3. MI Tarbiyatul Athfal	Anggota	334	89-100%	89-100%
Kecamatan B	Desa B1	16-21 Oktober	SDN Desa B1 1	Pengurus, anggota	330	81-97%	34-90%
Kecamatan A	Desa A1	23-24 dan 27-28 Oktober	1. SDN 3 Desa A1 2. MTs Muhammadiyah	Pengurus, anggota	358	100%	0-100%
Kecamatan E	Desa E1	24 September	Balai Desa E1	Pengurus	81	-(Retro)	-(Retro)
Kecamatan F	Desa F3, Desa F2, Desa F1, Desa F4, Desa F5	25 September	Aula Kecamatan	Pengurus	40	94-100%	94-100%
Kecamatan D	Desa D1	Akhir Juni-Juli	Mendatangi setiap KPB selama 3 kali pertemuan	Pengurus, anggota	500	-(Retro)	-(Retro)

Keterangan: *) Aspek penilaian kinerja pelatih: (i) penyampaian materi jelas dan menyenangkan, (ii) pemateri memberikan kesempatan peserta untuk bertanya, (iii) pemahaman peserta baik, dan (iv) materi sesuai kebutuhan. Aspek modul dan penyelenggaraan: (i) kenyamanan ruang belajar, (ii) peralatan mendukung, (iii) ketersediaan makanan dan minuman, (iv) penentuan waktu pelatihan dibicarakan dengan anggota, (v) pelatihan dilaksanakan saat tidak sedang musim pekerjaan, dan (vi) pelayanan panitia baik.

Sumber: data primer pemantauan

Mekanisme pelaksanaan dan sasaran penerima pelatihan juga bervariasi antar lokasi. Ada lokasi yang pelatihannya diberikan hanya kepada pengurus dan ada pelatihan yang diberikan baik pada pengurus maupun anggota KPB. Seperti di Kabupaten Pekalongan (Kecamatan E dan Kecamatan F), pelatihan diberikan hanya kepada pengurus kelompok dengan harapan mereka akan menyampaikan materi pelatihan yang telah diperoleh kepada para anggotanya. Sementara di

Kabupaten Brebes (Kecamatan C, Kecamatan B, dan Kecamatan A) dan Kabupaten Pemalang (Kecamatan D), pelatihan diberikan kepada seluruh anggota termasuk pengurusnya secara langsung. Dalam pelaksanaannya, ada yang memisahkan antara pelatihan pengurus dan anggota, seperti di Kecamatan C, ada yang pelatihan pengurus dan anggota KPBnya dilakukan dalam satu kegiatan, seperti di Kecamatan B, Kecamatan A, dan Kecamatan D. Hal ini tergantung pada kebijakan fasilitator. Lokasi yang pelatihan KPBnya digabung antara pengurus dan anggota KPB lebih untuk alasan efektifitas. Lokasi yang pelatihan KPBnya dipisah antara pengurus dan anggota dilakukan untuk memberikan porsi pemahaman yang lebih mendalam kepada pengurus.

Di Kabupaten Brebes, pelatihan penguatan kapasitas KPB bagi anggota dan pengurus dilaksanakan sekitar 4-6 hari tergantung jumlah dusun lokasi KPB berada. Setiap hari ada sekitar 4-5 KPB yang mengikuti pelatihan. Di Kabupaten Pekalongan, pelatihan bagi pengurus dilakukan hanya dalam waktu sehari. Sementara di Kabupaten Pemalang, pelatihan diberikan sekitar 3 kali dalam tiap pertemuan rutin KPB sehingga di lokasi ini membutuhkan waktu pelatihan hingga hampir 2 bulan, yaitu pada akhir Juni-juli 2014.

Di semua lokasi pilot Program PKKPM, pelatih menggunakan alat peraga dan memberikan beberapa contoh sederhana tentang materi yang disampaikan untuk mempermudah pemahaman peserta pelatihan. Misalnya, di Kecamatan F, FK memberikan pertanyaan tentang jumlah angka nol dalam jumlah uang Rp200 juta. Di Desa D1, FK menggunakan beberapa amplop dan uang sekitar 100 lembar untuk mempraktekkan materi manajemen keuangan dan perhitungan bunga pinjaman.

Hasil evaluasi penilaian peserta terhadap kinerja pelatih menunjukkan skor sangat tinggi antara 81-100% untuk masing-masing aspek. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus dan anggota KPB, mereka menyatakan belum sepenuhnya mengerti tentang materi yang disampaikan. Mereka masih kebingungan dan masih bertanya kepada fasilitator KPB saat mempraktekkan materi tersebut di kelompok. Selain itu, mereka masih menganggap pembukuan kelompok belum rapi.

Dilihat dari aspek modul pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan, secara umum penilaian peserta sudah baik. Meski demikian, ada beberapa aspek penilaian peserta pelatihan yang dinilai rendah. Salah satu diantaranya tentang kenyamanan ruangan pelatihan, khususnya di Desa A1 yaitu bahkan bernilai 0%. Penilaian ini terkait kondisi ruangan pelatihan yang sangat panas sehingga peserta tidak bisa fokus dan menyebabkan beberapa perempuan seringkali membawa anaknya keluar masuk ruangan. Penilaian yang cukup rendah terkait penyelenggaraan pelatihan juga terjadi di Desa B1, yaitu tentang waktu pelatihan yang tidak dibicarakan sebelumnya kepada para anggota KPB (65%) sehingga berbarengan dengan jadwal mereka bekerja.

Terkait dengan keikutsertaan anggota KPB dalam pelatihan, Tabel 13 menunjukkan perbandingan hasil analisis *scorecard* dari penilaian anggota KPB sampel *sorecard* (15 KPB) dengan anggota KPB sampel utama (30 KPB) terhadap keikutsertaan anggota KPB dalam pelatihan. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota yang telah mengikuti pelatihan penguatan KPB pada KPB sampel utama lebih banyak (warna hijau) dibandingkan dengan jumlah anggota pada KPB sampel *scorecard* (didominasi warna kuning)⁸ dari periode Q1 hingga Q3. Bahkan, perkembangan jumlah anggota KPB yang mengikuti pelatihan penguatan KPB di Kecamatan A dan Kecamatan E cenderung memburuk (didominasi dan menjadi warna merah) dari periode Q1 hingga Q3 (Tabel 13).

⁸Terdapat tiga warna yang dihasilkan dari analisis *scorecard* yang telah dilakukan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini secara berurutan menunjukkan tingkat kemajuan/perkembangan suatu kondisi yang dianalisis dari yang terendah/kurang baik (merah) dan tertinggi/baik (hijau).

Tabel 13. Perbandingan Kondisi Perkembangan Antara KPB Sampel Scorecard dan KPB Sampel Utama Dalam Pelaksanaan Pelatihan Penguatan KPB

Kabupaten	Kecamatan	KPB sampel <i>scorecard</i>			KPB sampel utama		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Green
	Kecamatan B	Red	Yellow	Yellow			
	Kecamatan A	Red	Yellow	Yellow			
Pekalongan	Kecamatan E	Yellow	Yellow	Red			
	Kecamatan F	Yellow	Yellow	Yellow			
Pemalang	Kecamatan D	Yellow	Yellow	Yellow			
Jawa Tengah		Yellow	Yellow	Yellow			

Sumber: data primer pemantauan

3.3 Dinamika KPB

Kondisi KPB terus mengalami perubahan sepanjang periode pemantauan dari kuartal 1 (Q1), kuartal 2 (Q2), hingga kuartal 3 (Q3), baik dari sisi jumlah KPB, jumlah anggota, tingkat pelaksanaan pertemuan rutin, kehadiran dan keaktifan anggota dalam setiap pertemuan, dll. Periode pemantauan tersebut dihitung mulai pertengahan September 2014 hingga akhir Juni 2015, dengan rincian periode sebagai berikut:

1. Kuartal 1 (Q1), yaitu pada pertengahan September 2014—pertengahan Desember 2014,
2. Kuartal 2 (Q2), yaitu pertengahan Desember 2014—pertengahan Maret 2015 (Q2), dan
3. Kuartal 3 (Q3), yaitu pertengahan Maret—akhir Juni 2015.

3.3.1 Jumlah KPB

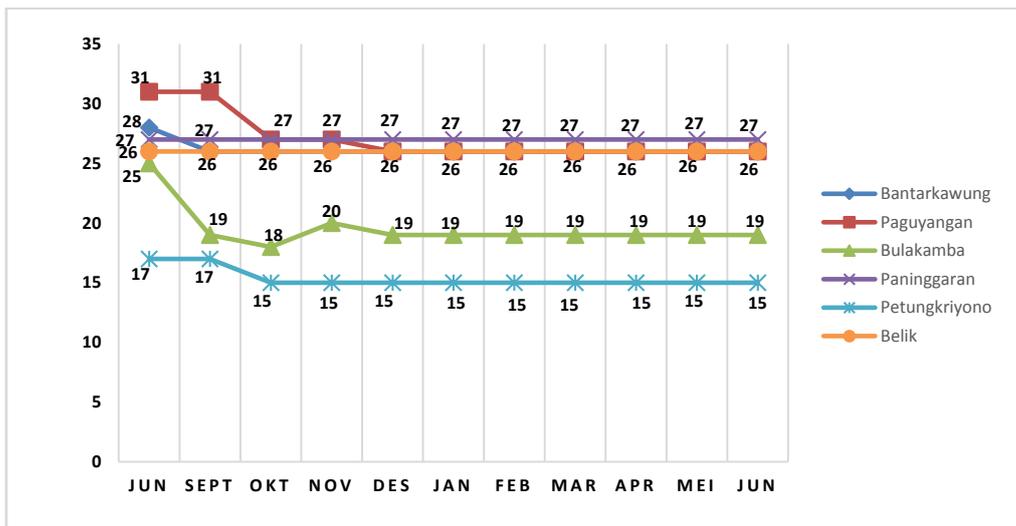
Secara umum jumlah KPB mengalami penurunan sebesar 9,7% dari 154 KPB saat pertama kali terbentuk (Juni/Julai 2014) menjadi 139 KPB pada Juni 2015 (Tabel 14). Secara terperinci, penurunan jumlah KPB tersebut hanya terjadi pada periode Q1 yaitu sebesar 8,4% dari 154 KPB menjadi 139 KPB kemudian stabil pada Q2 hingga akhir Q3 pada posisi 139 KPB. Hal ini tercermin pula pada kondisi di tiap kecamatan sampel yang penurunannya terjadi pada Q1 dan mulai stabil pada awal Q2 (Desember 2014) hingga akhir Q3 pemantauan (Juni 2015) (Gambar 1).

Tabel 14. Persentase Pertumbuhan Jumlah KPB dan Anggota KPB pada Q1 Hingga Q3

Kecamatan	Desa	% Pertumbuhan jumlah KPB				% Pertumbuhan jumlah anggota KPB			
		Q1	Q2	Q3	Total	Q1	Q2	Q3	Total
Brebes	Kecamatan C	-7,1	0	0	-7,1	-14,8	-3,1	0	-19,0
	Kecamatan B	-12,9	0	0	-16,1	-41,4	-8	-0,8	-47,6
	Kecamatan A	-20	0	0	-24	-29,8	-7,5	0	-38,8
Pekalongan	Kecamatan E	0	0	0	0	-17	-0,5	0,5	-17
	Kecamatan F	-11,8	0	0	-11,8	-14,9	0	0	-16
Pemalang	Kecamatan D	0	0	0	0	-6,8	0	0	-6,8
Jawa Tengah		-8,4	0	0	-9,7	-21,3	-3	-0,3	-24,9

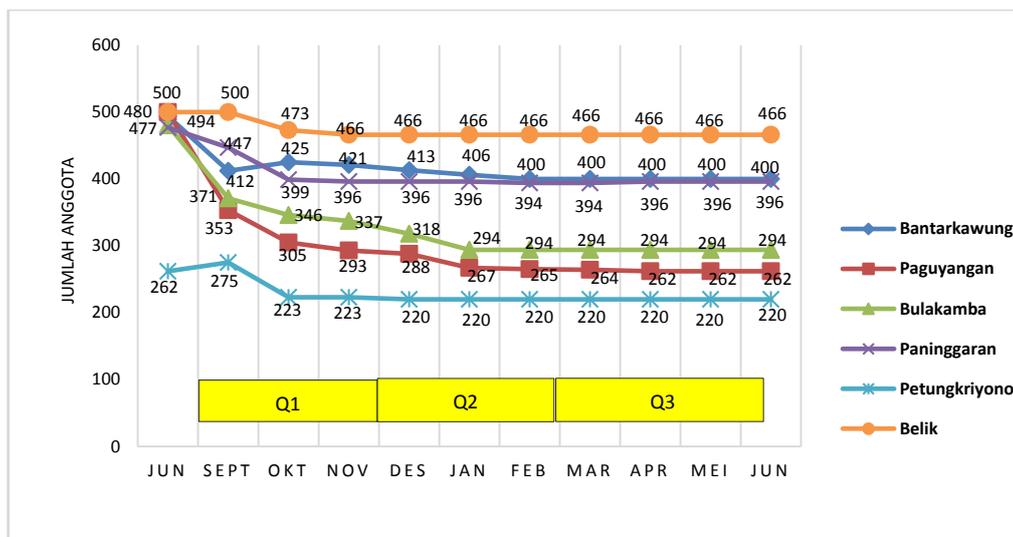
Sumber: Data primer pemantauan

Pada periode Q1, penurunan jumlah KPB cukup drastis terjadi di Kecamatan A dan Kecamatan B sebesar masing-masing 20% dan 13% (Tabel 14). Hal ini dikarenakan beberapa KPB tidak aktif, bubar, atau dilebur dengan KPB lain akibat dari jumlah anggota KPB yang semakin sedikit. Meski demikian, KPB di Kecamatan A sempat mengalami kenaikan pada Oktober—November 2014 dari 18 KPB menjadi 20 KPB karena ada dua KPB yang dimekarkan menjadi empat KPB (Gambar 1). Memasuki periode Q2, KPB di Kecamatan A kembali menurun menjadi 19 KPB karena ada 1 KPB yang para anggotanya sudah tidak mau melaksanakan aktifitas kelompok (pertemuan rutin, menabung, dll).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah KPB

Sumber: Data primer pemantauan



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Anggota KPB

Sumber: Data primer pemantauan

Senada dengan jumlah KPB, secara keseluruhan jumlah anggota KPB di semua wilayah sampel menurun rata-rata sebesar 24,9% dibandingkan sejak pertama kali terbentuk, yaitu dari 2.713 orang pada Juni 2014 menjadi 2.038 orang pada Juni 2015 (Tabel 14). Penurunan jumlah anggota KPB cukup drastis terjadi pada periode Q1 sebesar 21% selanjutnya menjadi cenderung stabil terutama memasuki Januari 2015 (Q2) hingga akhir Juni 2015 (Q3). Semakin stabilnya jumlah KPB dan jumlah anggotanya saat memasuki periode Q2 hingga akhir Q3 tersebut karena para anggota KPB sudah mulai terikat dengan program yang telah memasuki tahap penyusunan proposal, pelatihan vokasional, bahkan telah pencairan pinjaman dana usaha (Gambar 1 dan 2).

Penurunan jumlah anggota KPB pada Q1 tertinggi terjadi di Kecamatan B dan Kecamatan A, yaitu masing-masing 41% dan 30% (Tabel 14). Namun demikian, sempat ada kenaikan jumlah anggota KPB, khususnya di Kecamatan B (September 2014) dan di Kecamatan C (Oktober 2014) karena ada RTM yang ingin bergabung dengan KPB dan setelah diverifikasi mereka diterima menjadi anggota KPB (Gambar 2).

Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan jumlah anggota KPB pada periode Q1, yaitu:

- Kebosanan para anggota melakukan pertemuan rutin akibat kurangnya kreatifitas pendamping dalam menciptakan kegiatan kelompok secara menarik. Padahal, hal itu ikut menentukan keutuhan kelompok.
- Para anggota merasa bahwa proses untuk mendapatkan pinjaman membutuhkan persyaratan berat dan waktu yang lama. Salah satu akibatnya beberapa anggota kelompok mewakilkan kehadirannya dalam pertemuan rutin kepada istri/anaknya.
- Adanya sinisme dari masyarakat di luar anggota KPB terkait proses memperoleh pinjaman yang dinilai berbelit-belit.
- Kasus di Kecamatan A, beberapa kelompok bubar karena ketua kelompok dan pendampingnya tidak aktif atau mengundurkan diri dan adanya informasi yang tidak konsisten dari FK terkait pelatihan usaha. Sebelum verifikasi usaha kelompok, FK menyatakan bahwa pelatihan usaha boleh diikuti oleh anggota keluarga yang bukan anggota kelompok. Namun, pada saat verifikasi usaha, FK menyatakan bahwa untuk mendapatkan pinjaman, anggota KPB wajib mengikuti pelatihan usaha dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini menimbulkan banyaknya anggota KPB yang kecewa dan mengundurkan diri.

Memasuki periode Q2, penurunan jumlah anggota KPB semakin berkurang rata-rata sebesar 3% terhadap Q1 (Tabel 14 dan Gambar 2). Hal ini disebabkan pada Q2 para anggota KPB semakin termotivasi dengan adanya pelatihan usaha, pencairan pinjaman, dan pelaksanaan usaha. Bahkan pada periode Q3, penurunan anggota KPB hanya sekitar 0,3%. Penurunan terbesar pada periode Q3 ini terjadi di Kecamatan B (menurun 0,8%) karena ada anggota KPB yang keluar dari kelompok akibat tidak diijinkan suaminya meminjam dana BLM. Beberapa kisah tentang anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan KPB dapat dilihat pada Lampiran 11.

Di Kecamatan A, Kecamatan B, dan Kecamatan C, penurunan jumlah anggota KPB lebih tinggi, yaitu masing-masing 8% dan 7,5% (di atas rata-rata penurunan total yang hanya 3%) pada periode Q2. Pada saat itu banyak anggota KPB yang kebingungan dan khawatir akan kelanjutan program karena pelatihan usaha/kerja dan pencairan dana pinjaman usaha tidak kunjung dilaksanakan hingga akhir Januari 2015 padahal para pendamping dan FK telah menjanjikan kegiatan tersebut terlaksana pada Desember 2014. Hal ini membuat banyak anggota KPB mengundurkan diri. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kekosongan jabatan FK karena program PNPM Perdesaan berakhir pada Desember 2014⁹.

Dilihat berdasarkan komposisi gender, rata-rata anggota perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anggota laki-laki baik pada Q1 (rata-rata 66% perempuan dan 30% laki-laki), Q2, maupun Q3 yaitu (masing-masing rata-rata 74% anggota perempuan dan 26% anggota laki-laki). Pada akhir Q3 jumlah perempuan cenderung meningkat sebesar 7% sedangkan anggota laki-laki berkurang 16% jika dibandingkan dengan kondisi September 2014. Hal ini disebabkan adanya penggantian keanggotaan dari kepala keluarga (laki-laki) kepada istri atau anak perempuan mereka.

3.3.2 Pertemuan Rutin

a) Intensitas pertemuan rutin

Menurut PTO Program PKKPM pertemuan rutin KPB wajib dilakukan seminggu sekali. Sejak awal KPB terbentuk antara Juni/Juli 2014 hingga Juni 2015, kegiatan pertemuan rutin KPB di lokasi sampel seharusnya sudah berjalan sebanyak antara 32 sampai 50 kali. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada KPB sampel utama yang melaksanakan pertemuan hingga 100% baik pada Q1, Q2, maupun Q3. Berdasarkan Tabel 15, hingga akhir Q3 (Juni 2015), secara umum pertemuan rutin yang telah dilaksanakan rata-rata sekitar 74,7% (jika Kecamatan E tidak diikutsertakan dalam perhitungan rata-rata mencapai 80,3%)¹⁰.

⁹Dana BLM tahap 2 untuk pelatihan usaha di Kecamatan A, Kecamatan B, dan Kecamatan C belum sempat dicairkan sebelum Desember 2014. Para FK habis kontrak dengan PNPM Perdesaan pada akhir Desember 2014. Hal ini berpengaruh pada proses pencairan BLM Tahap 2 untuk pelatihan usaha dan kerja karena tidak ada yang menandatangani berkas pencairan dana BLM tersebut. Sementara di 3 kecamatan lainnya (Kecamatan D, Kecamatan F, dan Kecamatan E), hanya sedikit saja jumlah anggota KPB menurun karena pencairan dana Tahap 2 sudah dilaksanakan sebelum akhir Desember 2014.

¹⁰Perhitungan tanpa mengikutsertakan kondisi di Kecamatan E dilakukan karena di Kecamatan ini hampir seluruh KPB (sampel maupun non sampel) sudah tidak melakukan pertemuan rutin setelah pertemuan rutin ke-12 karena ada kesalahan informasi dari pendamping/FK bahwa pertemuan hanya wajib dilakukan hingga pertemuan ke-12

Tabel 15. Frekuensi Pertemuan Rutin KPB

Kabupaten	Kecamatan	% Rata-rata realisasi pertemuan rutin terhadap target			% Riil pertemuan rutin terhadap target per Juni 2015
		Q1	Q2	Q3	
Brebes	Kecamatan C	92,8	74,3	91,8	87,2
	Kecamatan B	84,2	78,8	37,6	70,3
	Kecamatan A	94,7	64,6	95,6	85,1
Pekalongan	Kecamatan E	77,3	33,8	13,3	46,6
	Kecamatan F	85,7	86,8	65,7	79,4
Pemalang	Kecamatan D	100,0	73,7	50,0	79,2
Jawa Tengah		89,1	68,7	59,0	74,6
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		91,5	75,6	68,1	80,3

Sumber: Data primer pemantauan

Pada periode Q1, tidak telaksananya pertemuan rutin 100% karena sebagian besar KPB (kecuali di Kecamatan D) tidak aktif/meliburkan pertemuan rutin pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (sekitar Agustus—September 2014). Hal ini disebabkan pada rentang waktu tersebut para anggota KPB sibuk mengurus keperluan rumah tangga dan melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, termasuk tradisi pulang kampung. Selain itu adanya faktor kebosanan anggota KPB karena kegiatan pertemuan rutin cenderung monoton, yaitu menabung saja. Masalah kebosanan tersebut juga menyebabkan penurunan intensitas pelaksanaan pertemuan rutin dari Q1 ke Q2 sebesar 20,5 titik persen (Tabel 15). Khususnya di Brebes, faktor keengganan dan kekecewaan anggota KPB mengikuti pertemuan rutin adalah karena pelatihan dan pencairan pinjaman usaha yang tidak kunjung terlaksana hingga Januari 2015 padahal para pendamping dan fasilitator menjanjikan bahwa pada Desember 2014 kegiatan tersebut akan terlaksana. Hal ini dikarenakan FK terlambat melaksanakan pencairan dana Tahap 2 untuk pelatihan usaha dan kerja sebelum akhir Desember 2014 (saat kontrak FK dalam PNPM Perdesaan berakhir).

Pelaksanaan pertemuan rutin dari Q2 ke Q3 juga mengalami penurunan meski lebih kecil, yaitu sebesar 9,4 titik persen dari 68,7% menjadi 59,2% (Tabel 15). Sebenarnya, saat memasuki periode Q3 (April 2015) di beberapa lokasi sampel sempat terjadi peningkatan intensitas pertemuan rutin KPB karena baik KPMD maupun anggota KPB kembali mendapat motivasi baru dengan kembali aktifnya FK pada April 2015¹¹. Namun memasuki pertengahan Q3 (akhir Mei 2015) intensitas pelaksanaan pertemuan rutin kembali menurun akibat terpecahnya konsentrasi FK untuk pula mendampingi para KPMD dan anggota KPB dari program PKKPM 2015 yang sudah terbentuk dan mulai melaksanakan pertemuan rutin.

Meski secara umum terjadi penurunan intensitas pelaksanaan pertemuan rutin, namun tidak demikian di Kecamatan C dan Kecamatan A (Tabel 15). Peningkatan intensitas pertemuan rutin di Kecamatan C yaitu sebesar 17,5 titik persen dari 74,3% pada Q2 menjadi 91,8% pada Q3. Hal ini karena beberapa pengurus berinisiatif untuk kembali mengaktifkan kegiatan pertemuan rutin terutama setelah para anggota KPB menerima dana BLM. Sementara itu di Kecamatan A, peningkatan yang terjadi yaitu dari 64,6% pada Q2 menjadi 95,6% pada Q3. Faktor pendorongnya adalah karena adanya FK baru (penugasan untuk PKKPM 2015) yang terpilih pada April 2015 dan

¹¹Pasca habis kontrak FK pada Desember 2014 dari PNPM Perdesaan, jabatan FK kembali aktif pada April 2015 yang merupakan kontrak baru FK dengan program PKKPM 2015.

lebih aktif dibanding FK sebelumnya sehingga memberikan motivasi baru bagi para KPMD dan anggota KPB untuk mengaktifkan kembali kegiatan kelompok.

Pelaksanaan pertemuan rutin terendah di sepanjang periode Q1 hingga Q3 adalah di Kecamatan E (Tabel 15). Hal ini terjadi karena adanya pemahaman anggota KPB bahwa pertemuan rutin hanya wajib dilaksanakan sebanyak 12 kali¹². Dari 27 KPB yang ada di Kecamatan E, hanya 3 KPB yang masih aktif melakukan pertemuan rutin sejak awal hingga akhir periode Q2, bahkan pada periode Q3 hanya tersisa 1 KPB saja yang masih melaksanakan pertemuan rutin, yaitu KPB yang pertemuan rutinnnya dibuat bersamaan dengan jadwal acara keagamaan mingguan (tahlil).

Khusus di Kecamatan F, terjadi peningkatan persentase pelaksanaan pertemuan rutin dari Q1 (85,7%) ke Q2 (86,8%). Meski tidak signifikan, para anggota KPB di Kecamatan F mengakui bahwa sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melaksanakan pertemuan rutin walaupun KPMD sering tidak hadir. Bahkan beberapa KPB tetap melaksanakan pertemuan rutin dengan memindahkan jadwal pertemuan di malam hari karena mereka harus bekerja di sawah pada siang hari khususnya karena memasuki musim tanam (Kotak 4).

Kotak 4 **Pertemuan Rutin KPB Menjadi Kebutuhan Anggota**

Kecamatan F Kabupaten Pekalongan termasuk wilayah yang terpencil dengan akses jalan yang cukup sulit/rusak antar desa/dusun bahkan di dalam dusun/kampung itu sendiri. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi “guyub”nya masyarakat di sana. Keberadaan program PKKPM yang mengharuskan masyarakat beraktifitas dalam kelompok (KPB) menjadi pilihan yang cukup disambut gembira oleh masyarakat. Hal ini karena melalui KPB mereka merasa memiliki wadah untuk menghasilkan hal yang lebih bermanfaat bersama-sama.

Hingga pertengahan tahun berjalannya program PKKPM, para anggota KPB di kecamatan ini sangat bersemangat mengikuti kegiatan kelompok dengan intensitas pelaksanaan pertemuan rutin yang cukup tinggi dan stabil, yaitu 86% pada periode Q1 dan 87% pada Q2. Para anggota KPB mengakui bahwa sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melaksanakan pertemuan rutin walaupun pendamping sering tidak hadir. Melakukan kegiatan “Kumpul-kumpul” melalui PKKPM dianggap bisa memberikan manfaat karena mereka bisa memiliki tabungan dan bisa pinjam uang kepada kelompok saat dibutuhkan.

Namun demikian, kegiatan kumpul-kumpul mereka ini terkadang harus disesuaikan dengan kondisi kesibukan terkait dengan pekerjaan utama mereka sebagai petani sayuran. Seperti yang terjadi pada periode Q2. Pada saat memasuki musim tanam, para anggota KPB harus memindahkan jadwal pertemuan rutinnnya pada malam hari. Hal ini karena mereka harus bekerja di ladang hingga siang hari dan baru bisa melaksanakan pertemuan rutin pada malam harinya setiap seminggu sekali. Akan tetapi, memasuki periode Q3, mereka tetap melakukan pertemuan rutin namun intensitasnya sedikit menurun menjadi sekitar 66% dari sebelumnya yang sebesar 87%. Hal ini dikarenakan kesibukan mereka yang memasuki musim panen sehingga membutuhkan waktu kerja dari pagi hingga sore hari. Akibatnya, mereka beberapa kali tidak melakukan pertemuan rutin karena kondisi badan mereka sudah lelah. Oleh karenanya, penyesuaian pelaksanaan kegiatan pertemuan rutin sangat dibutuhkan melalui kesepakatan kelompok supaya aktivitas utama anggota tidak terganggu dan di sisi lain kegiatan kelompok juga tetap bisa berjalan guna menunjang upaya peningkatan kehidupan mereka, baik dari sisi ekonomi, social maupun SDM.

¹²Pemahaman ini timbul karena FK salah memberikan informasi kepada KPB saat sosialisasi awal bahwa pertemuan rutin KPB hanya sampai 12 kali pertemuan .

b) Kehadiran Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin

Secara umum, rata-rata tingkat kehadiran anggota KPB dalam pertemuan rutin selama periode pemantauan (dari Q1 hingga Q3) hanya sebesar 61% (sebesar 67% jika tidak mengikutsertakan Kecamatan Paningaran). Pelaksanaan pertemuan rutin tertinggi terjadi di Kecamatan A yaitu sebesar 78% dan terendah terjadi Kecamatan E yang sebesar 27% (Tabel 16).

Jika dilihat berdasarkan dinamikanya pada tiap periode, secara umum terjadi penurunan tingkat kehadiran anggota KPB saat pertemuan rutin sebesar 41 titik persen dari periode Q1 ke Q3. Penurunan terbesar terjadi antara periode Q1 ke Q2 sebesar 24 titik persen dibanding periode Q2 ke Q3 yang sebesar 17 titik persen. Hal ini disebabkan adanya kekosongan jabatan FK setelah PNPM Perdesaan berakhir pada awal periode Q2 (Desember 2014). Para anggota enggan hadir pada pertemuan rutin dan kecewa karena pelatihan dan pencairan pinjaman usaha tidak kunjung dilaksanakan hingga Januari 2015 sesuai yang dijanjikan fasilitator, khususnya di Kabupaten Brebes (Tabel 15). Kondisi ini terus berlanjut memasuki periode Q3 meski semua anggota KPB telah menerima dana pinjaman BLM. Faktor ketidakjelasan agenda pertemuan dari para KPMD membuat para anggota bosan melakukan pertemuan, bahkan sebagian anggota KPB menganggap tidak perlu lagi hadir dalam pertemuan karena yang terpenting adalah mereka membayar angsuran pinjaman dengan lancar. Selain itu, faktor menurunnya aktifitas pendampingan dari para fasilitator (KPMD dan FK) dengan terbentuknya KPB baru dari PKKPM 2015 membuat mereka lebih berkonsentrasi pada kelompok-kelompok tersebut.

Tabel 16. Tingkat Kehadiran Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% anggota KPB									% Rata-rata Kehadiran		
		% Total			% Laki-laki (L)			% Perempuan (P)			Total	L	P
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Brebes	Kecamatan C	93	60	66	83	51	61	137	61	62	73	65	87
	Kecamatan B	83	52	27	72	44	23	89	51	26	54	46	55
	Kecamatan A	81	91	62	65	75	25	83	92	65	78	55	80
Pekalongan	Kecamatan E	54	14**	13**	45	23**	21**	58	3**	3**	27	30**	21**
	Kecamatan F	95	72	46	113*	56	45	99	65	44	71	71	69
Pemalang	Kecamatan D	90	62	33	90	14	3	92	69	35	62	36	65
Jawa Tengah		83	58	41	78	44	30	93	57	39	61	51	63
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		88	67	47	85	48	31	100	67	46	67	55	71

Keterangan: *) Terdapat peserta laki-laki dalam pertemuan yang bukan anggota KPB, namun mereka hadir dalam pertemuan karena mewakili ibu/istrinya.

***) Data hanya dari 1 KPB karena 4 KPB lainnya tidak melaksanakan pertemuan rutin.

Sumber: Data primer pemantauan

Kondisi tingkat kehadiran anggota KPB dalam pertemuan terendah pada setiap periode pemantauan selalu terjadi di Kecamatan E. Kesalahan pemahaman anggota KPB tentang kewajiban mengikuti pertemuan rutin hanya sampai 12 kali menjadi faktor utama rendahnya tingkat kehadiran anggota di kecamatan ini (akibat kekeliruan informasi dari FK). Namun demikian, penurunan tingkat kehadiran terbesar justru terjadi di Kecamatan D dan Kecamatan B yaitu masing-masing sebesar 57 titik persen dan 56 titik persen pada Q3 terhadap Q1.

Di Kecamatan D, selain faktor kebosanan anggota, faktor menurunnya kegiatan pendampingan dari fasilitator (KPMD and FK) cukup terlihat memasuki periode Q2 dan Q3¹³. Sementara di Kecamatan B, besarnya penurunan tingkat kehadiran anggota KPB disebabkan oleh faktor para anggota KPB sudah malas dan merasa pertemuan rutin tidak perlu dilakukan lagi. Mereka berpikir bahwa yang terpenting adalah pembayaran angsuran pinjaman mereka lancar tanpa harus melakukan pertemuan rutin.

Di Kecamatan A, pada periode Q1, tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan rutin sebesar 81% tergolong terendah setelah Kecamatan E. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksukaan para KPMD dan anggota KPB terhadap kinerja FK (yang yang pada saat itu menjabat) dianggap buruk. Namun justru setelah kontrak FK dari PNPM Perdesaan tersebut berakhir pada Desember 2015 (periode Q2), para anggota KPB menjadi semakin rajin hadir dalam pertemuan sehingga tingkat kehadirannya mencapai 91% pada Q2. Semangat para anggota semakin meningkat setelah adanya tim FK baru pada April 2015. Para FK ini cukup aktif menggiatkan pertemuan rutin KPB sehingga para anggota KPB kembali hadir dalam pertemuan rutin. Akan tetapi, memasuki akhir periode Q3 pemantauan, konsentrasi para FK dan KPMD mulai terbagi dengan tugasnya mendampingi KPB yang terbentuk dari PKKPM 2015. Hal ini berpengaruh pada kehadiran anggota KPB dari PKKPM 2014 yang kembali merosot sebesar 29 titik persen dari Q2 ke Q3 menjadi 62%.

Kondisi yang cukup berbeda terlihat di Kecamatan C. Pada periode Q3, tingkat kehadiran anggota KPB justru meningkat dibandingkan pada periode Q2 (meski tidak besar) yaitu sebesar 6%. Para pengurus KPB di kecamatan ini berupaya secara mandiri untuk mengaktifkan kembali kegiatan kelompok. Kondisi ini tepatnya terjadi setelah dana pinjaman dari BLM PKKPM dicairkan kepada mereka. Mereka menyadari bahwa kegiatan pertemuan kelompok mampu menjaga rutinitas mereka membayar angsuran, yaitu dengan melaksanakan kegiatan menabung rutin dalam pertemuan untuk memperingan pembayaran angsuran pinjaman BLM per bulannya.

Jika dilihat berdasarkan perbedaan gender, tingkat kehadiran anggota laki-laki maupun perempuan secara umum mengalami penurunan masing-masing sebesar 48 titik persen untuk laki-laki dan 54 titik persen untuk perempuan dari periode Q1 ke Q3. Meski demikian, tingkat kehadiran anggota perempuan secara umum relatif lebih tinggi dibandingkan anggota laki-laki, kecuali di Kecamatan E dan Kecamatan F. Hal ini disebabkan pertemuan rutin di Kecamatan E ini hanya terjadi pada 1 KPB sampel (dari 5 KPB sampel) dan pelaksanaannya pada malam hari mengikuti jadwal acara keagamaan (tahlil) yang khusus dihadiri oleh laki-laki sehingga anggota perempuan enggan atau sulit untuk hadir. Begitu juga di Kecamatan F, waktu pelaksanaan pertemuan KPB lebih sering dilaksanakan malam hari sehingga membuat para anggota perempuan lebih jarang hadir dalam pertemuan selain permasalahan kondisi wilayah yang merupakan pegunungan dan akses jalan yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis *scorecard*, Tabel 17 memperlihatkan perbandingan antara perkembangan pelaksanaan dan tingkat kehadiran para anggota saat pertemuan rutin pada KPB sampel utama (30 KPB) dan KPB sampel *scorecard*. Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pertemuan rutin dan kehadiran anggota dalam pertemuan pada KPB sampel *scorecard* mengalami penurunan dari Q1 ke Q3 pemantauan (warna kuning menjadi warna merah) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi KPB sampel utama. Faktor adanya pemantauan intensif

¹³Hal ini karena adanya masalah terkait tugas FK Kecamatan D saat masih menjabat FK pada program PNPM Perdesaan, yaitu tentang penggunaan dana program. Akibatnya, FK tersebut tidak fokus pada tugas barunya sebagai FK PKKPM dan memengaruhi soliditas para pengelola program. Meski pada April 2015 para FK kembali memiliki kontrak baru untuk penugasan PKKPM 2015, namun tidak cukup memberikan motivasi baru bagi para KPMD dan anggota KPB untuk kembali aktif/hadir dalam pertemuan.

pada KPB sampel utama boleh jadi cukup memengaruhi tingkat kerajinan para anggota KPB melaksanakan pertemuan rutin dan hadir di dalamnya.

Tabel 17. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Dan Kehadiran Anggota Dalam Pertemuan Antara KPB Sampel Scorecard dan KPB Sampel Utama

Kabupaten	Kecamatan	KPB Sampel <i>scorecard</i>			KPB sampel utama		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	Green	Yellow	Red	Green	Yellow	Green
	Kecamatan B	Red	Yellow	Red	Green	Yellow	Red
	Kecamatan A	Yellow	Yellow	Red	Green	Yellow	Green
Pekalongan	Kecamatan E	Green	Yellow	Red	Yellow	Red	Red
	Kecamatan F	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Pemalang	Kecamatan D	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Jawa Tengah		Yellow	Yellow	Red	Green	Yellow	Yellow

Sumber: Data primer pemantauan

c) Kehadiran Pengurus KPB dalam Pertemuan Rutin

Pengurus KPB berperan sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan kelompok. Kehadiran pengurus menjadi hal yang cukup berpengaruh terhadap keaktifan para anggota untuk hadir dan melaksanakan kegiatan kelompok. Hal ini didasarkan pada hasil analisis hubungan antara kehadiran pengurus dengan kehadiran anggota KPB yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif dengan tingkat korelasi yang sangat kuat diantara kedua variabel tersebut (Lampiran 1). Artinya, semakin tinggi tingkat kehadiran pengurus, maka tingkat kehadiran anggota KPB pun semakin tinggi. Adapun pengurus kelompok yang dimaksud adalah ketua, sekretaris, dan bendahara KPB.

Sementara itu, rincian tingkat kehadiran pengurus KPB di setiap periode pemantauan ditampilkan pada Tabel 18. Secara umum rata-rata tingkat kehadiran pengurus dalam pertemuan rutin sebesar 67% atau jika tidak mengikutsertakan Kecamatan E menjadi sebesar 74%. Nilai tersebut tidak terlepas dari dinamika yang terjadi sejak Q1 hingga Q3. Jika dibandingkan dengan periode Q1, tingkat kehadiran pengurus pada pertemuan rutin menurun sebesar 36 titik persen dari 86% pada Q1 menjadi 50% pada Q3. Penurunan terbesar terjadi di Kecamatan B (51 titik persen) karena secara tidak langsung mereka terpengaruh oleh kondisi anggota kelompok mereka yang malas dan sulit untuk diajak melakukan pertemuan rutin. *“Pada angel (susah) diajak kumpul, jare sing (katanya yang) penting setoran lancar”* menurut salah satu pengurus KPB.

Tabel 18. Persentase Kehadiran Pengurus KPB Dalam Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% Kehadiran Pengurus			
		Q1	Q2	Q3	% Rata-rata Per Juni 2015
Brebes	Kecamatan C	94	60	70	75
	Kecamatan B	86	57	35	59
	Kecamatan A	87	93	63	81
Pekalongan	Kecamatan E	60	17*	20*	32*
	Kecamatan F	93	80	57	77
Pemalang	Kecamatan D	97	80	57	78
Jawa Tengah		86	64	50	67
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		91	74	56	74

Keterangan: *) Data hanya dari 1 KPB karena 4 KPB lainnya tidak melaksanakan pertemuan rutin.

Sumber: Data primer pemantauan

Kondisi yang cukup berbeda terjadi di Kecamatan C karena terdapat peningkatan kehadiran pengurus dalam pertemuan rutin sebesar 10 titik persen pada Q3 dibandingkan Q2, yaitu dari 60% pada Q2 menjadi 70% pada Q3. Di Kecamatan ini para penguruslah yang justru memotivasi para anggota untuk kembali aktif dalam pertemuan rutin meski pada beberapa pertemuan terakhir para pendamping sudah tidak hadir dalam pertemuan, khususnya setelah para anggota KPB menerima dana pinjaman BLM.

d) Keaktifan Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin

Tingkat keaktifan anggota KPB yang dimaksud adalah jumlah anggota KPB yang hadir dalam pertemuan dan mengutarakan pendapat ataupun pertanyaan. Pada Tabel 19, secara umum rata-rata tingkat keaktifan anggota KPB saat pertemuan rutin selama periode pemantauan hanya sebesar 21% yang terdiri dari 27% laki-laki dan 8% perempuan yang aktif dalam pertemuan.

Jika memperhitungkan kondisi di Kecamatan E, tingkat keaktifan anggota dalam pertemuan pada Q3 menurun dibandingkan saat periode Q1 dan Q2. Namun terjadi sebaliknya jika mengabaikan Kecamatan E¹⁴. Kondisi keaktifan anggota di Kecamatan E semakin meningkat meski tidak signifikan, yaitu sebesar 21% pada Q1, 22% pada Q2, dan 26% pada Q3 (Tabel 19). Hal ini menunjukkan bahwa para anggota KPB sedikit demi sedikit mulai terbiasa untuk aktif mengungkapkan pendapat dalam forum. Hal yang cukup banyak dibicarakan pada Q2 dan Q3 adalah seputar pelatihan, pencairan pinjaman, pelaksanaan usaha, pembayaran angsuran, serta pencatatan/pembukuan keuangan kelompok. Keterlambatan pencairan pinjaman usaha membuat para anggota tertarik berkomentar dan bertanya-tanya kepada pendamping maupun kepada sesama anggota pada saat itu.

Peningkatan keaktifan anggota KPB dalam pertemuan rutin cukup signifikan terjadi di Kecamatan B, yaitu sebesar 40 titik persen pada Q3 terhadap Q1 (Tabel 19). Hal ini terjadi baik pada anggota laki-laki maupun perempuan. Masalah yang hangat dibahas adalah tentang rencana pelaksanaan usaha, pembagian tabungan sukarela menjelang hari raya Idul Fitri, dan rencana penggunaan dana 10% pinjaman anggota yang disisihkan dalam kas kelompok.

¹⁴Hingga periode Q3, jumlah KPB yang masih melaksanakan pertemuan rutin di Kecamatan E hanya tersisa 1 KPB. Hal ini karena sejak awal sosialisasi FK menginformasikan bahwa pertemuan rutin hanya dilaksanakan hingga 12 kali.

Tabel 19. Tingkat Keaktifan Anggota KPB dalam Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% Anggota yang hadir dan aktif									% Rata-rata anggota aktif		
		Total			laki-laki (L)			perempuan (P)			Total	L	P
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Brebes	Kecamatan C	42	41	32	56	38	40	39	39	31	38	45	36
	Kecamatan B	45	41	85	56	22	90	29	38	80	57	56	49
	Kecamatan A	6	10	1	17	13	0	6	9	1	6	10	5
Pekalongan	Kecamatan E	4	19*	0*	8	19*	0*	3	0*	0*	7	9*	1*
	Kecamatan F	11	14	10	18	15	7	4	11	17	12	13	11
Pemalang	Kecamatan D	4	5	1	3	75	0	4	3	1	3	26	2
Jawa Tengah		18	24	22	26	30	25	14	17	22	21	27	18
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		21	22	26	30	32	27	16	20	26	23	30	21

Keterangan: *) Data hanya dari 1 KPB karena 4 KPB lainnya tidak melaksanakan pertemuan rutin.

Sumber: Data primer pemantauan.

Berdasarkan gender, tingkat keaktifan perempuan terus mengalami peningkatan sebesar 8 titik persen dari Q1 hingga Q3 dibandingkan keaktifan laki-laki yang mengalami penurunan sebesar 3 titik persen terutama pada Q2 ke Q3. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini perempuan semakin berani mengungkapkan pendapatnya di dalam forum.

Khusus di Kecamatan D, terjadi peningkatan yang signifikan pada keaktifan anggota laki-laki dalam pertemuan rutin dari 3% pada Q1 menjadi menjadi 75% pada Q2. Pada saat itu mereka banyak membicarakan persoalan pembayaran cicilan per bulan sejak bulan ke-1. Anggota yang pilihan usahanya berternak kambing/sapi merasakan sistem cicilan bulanan sangat berat karena mereka baru akan menerima hasilnya 3-6 bulan setelah usaha dimulai. Usaha ternak kambing/sapi ini sebagian besar dijalankan oleh anggota KPB laki-laki.

3.3.3 Tabungan

Anggota KPB diwajibkan menabung setiap minggu dalam kegiatan pertemuan rutin, yaitu berupa tabungan pokok yang besarnya tergantung pada kesepakatan diantara anggota KPB. Ada juga tabungan sukarela yang jumlah dan waktu penyetorannya dilakukan secara sukarela tergantung kemampuan masing-masing anggota. Besarnya tabungan pokok berkisar antara Rp1.000—Rp10.000 per anggota/minggu. Sedangkan untuk tabungan sukarela bahkan ada yang menyetor hingga antara Rp25.000—Rp100.000 per anggota (tidak selalu perminggu, tergantung ada atau tidak uang yang dimiliki saat akan melakukan pertemuan rutin).

Aturan program mewajibkan peserta menabung saat pertemuan rutin merupakan langkah yang sangat tepat. Hal ini terbukti dari hasil analisis signifikansi dan korelasi antara pertemuan rutin dengan jumlah anggota yang menabung pada Lampiran 5. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan korelasi yang positif serta sangat kuat diantara keduanya. Artinya, kegiatan pertemuan rutin memang sangat penting dilakukan karena mampu mendorong peserta program melakukan kegiatan menabung. Selain itu, kegiatan pertemuan rutin juga mampu mendorong jumlah dana tabungan yang terkumpul dalam setiap pertemuan rutin. Hal ini terbukti dari analisis signifikansi yang menghasilkan hubungan diantara keduanya yang signifikan dan berkorelasi positif sedang (Lampiran 6). Meski demikian, ada saja anggota KPB yang menabung

di luar kegiatan pertemuan rutin KPB dengan mendatangi langsung pengurus kelompok atau menitipkannya pada anggota lain yang hadir dalam pertemuan.

Tabel 20. Persentase Anggota KPB yang Menabung Pokok

Kabupaten	Kecamatan	% anggota KPB menabung tabungan pokok									Rata-rata % anggota menabung pokok		
		Total			Laki - Laki (L)			Perempuan (P)			Total	L	P
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Brebes	Kecamatan C	92	58	55	89	51	51	96	59	43	69	64	66
	Kecamatan B	75	50	29	71	39	26	73	50	27	51	45	50
	Kecamatan A	80	90	63	65	79	38	83	91	65	78	60	80
Pekalongan	Kecamatan E	56	10*	2*	56	16*	4*	58	3*	0*	23	25*	20*
	Kecamatan F	87	57	24	86	64	22	84	53	35	56	57	57
Pemalang	Kecamatan D	93	64	27	90	50	15	94	68	28	61	52	63
Jawa Tengah		80	55	46	76	50	41	81	54	33	60	56	56
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		85	64	40	80	57	30	86	64	39	63	56	63

Keterangan: *) Data hanya dari 1 KPB karena 4 KPB lainnya tidak melaksanakan pertemuan rutin

Sumber: Data primer pemantauan

Secara umum rata-rata sekitar 60% anggota KPB menabung pokok saat pertemuan rutin hingga akhir Q3 (atau 63% jika tidak memperhitungkan Kecamatan E) (Tabel 20). Sementara untuk tabungan sukarela, hanya rata-rata sekitar 34% anggota saja yang menabung sukarela saat pertemuan rutin (atau 39% jika tidak memasukkan Kecamatan E). Berdasarkan perbedaan gender, baik anggota perempuan maupun laki-laki memiliki kecenderungan yang sama untuk menabung pokok yaitu sebesar 56%. Sementara untuk tabungan sukarela, anggota perempuan memiliki kecenderungan yang lebih rajin menabung sukarela dibanding laki-laki, yaitu 34% untuk perempuan dan 27% untuk laki-laki (Tabel 20 dan 21). Jika dibandingkan dengan indikator kinerja utama yang ditargetkan oleh program, persentase jumlah anggota menabung ini masih jauh dari yang direncanakan yaitu sebesar 80% anggotanya melakukan tabungan di kelompok.

Tabel 21. Persentase Anggota KPB yang Menyetor Tabungan Sukarela

Kabupaten	Kecamatan	% anggota KPB menabung sukarela									Rata-rata % anggota menabung sukarela		
		Total			Laki - Laki			Perempuan			Total	L	P
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3			
Brebes	Kecamatan C	91	58	31	89	51	19	73	59	31	60	53	54
	Kecamatan B	33	35	27	23	19	23	38	35	26	32	21	33
	Kecamatan A	50	90	60	50	79	33	50	91	64	67	54	68
Pekalongan	Kecamatan E	23	7*	1*	31	11*	3*	24	3*	0*	11	15*	9*
	Kecamatan F	20	14	7	18	12	6	19	21	6	13	12	15
Pemalang	Kecamatan D	20	25	18	13	0	0	20	25	18	21	4	21
Jawa Tengah		39	38	24	37	29	14	37	39	24	34	27	34
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		43	44	29	38	32	16	40	46	29	39	29	38

Keterangan: *) Data hanya dari 1 KPB karena 4 KPB lainnya tidak melaksanakan pertemuan rutin

Sumber: Data primer pemantauan

Berdasarkan dinamika yang terjadi di setiap periode pemantauan, jumlah anggota KPB yang menabung pada saat pertemuan rutin semakin menurun dari Q1 hingga Q3, baik pada tabungan pokok maupun sukarela. Besarnya penurunan menabung pada anggota KPB ini sebesar 34 titik persen pada tabungan pokok dan 15 titik persen pada tabungan sukarela pada Q3 terhadap Q1 (Tabel 20 dan 21).

Jika dilihat secara terperinci, secara umum penurunan persentase anggota menabung pokok jauh lebih besar terjadi saat periode Q2 terhadap Q1 sebesar 26 titik persen dibandingkan dengan saat periode Q3 terhadap Q2 yang hanya sebesar 9%. Pada periode Q2, para anggota KPB enggan hadir dalam pertemuan rutin dan melakukan tabungan karena mereka mengalami penurunan motivasi yang cukup drastis akibat keterlambatan pengelola program melaksanakan pelatihan dan pencairan dana BLM. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak terjadi di Kecamatan A, Kecamatan F, dan Kecamatan D. Di Kecamatan A dan Kecamatan D, pada akhir Q3 beberapa KPB tidak melakukan pertemuan rutin karena para fasilitator dan pendamping sudah lebih berkonsentrasi melakukan tugas pendampingan KPB untuk PKKPM 2015 sehingga para anggota pun tidak juga melakukan aktifitas menabung. Untuk kasus Kecamatan F, penurunan jumlah anggota menabung yang lebih besar saat Q3 terhadap Q2 dikarenakan ada beberapa KPB yang anggotanya kurang mempercayai pengurus kelompoknya akibat pembukuan kurang jelas dan seringkali pengurus tidak hadir dalam pertemuan.

Berkebalikan dengan intensitas menabung pokok, penurunan jumlah anggota yang menabung sukarela lebih besar terjadi saat periode Q3 terhadap Q2 sebesar 14% dibandingkan dengan saat periode Q2 terhadap Q1 yang hanya 1% (Tabel 21). Memasuki periode Q3, setiap anggota telah menerima pinjaman BLM, melakukan usaha, dan membayar angsuran pinjaman sehingga sebagian anggota lebih mendahulukan pendapatan yang diperolehnya untuk membayar angsuran pinjaman ketimbang menabung khususnya tabungan sukarela. Namun demikian, ada juga sebagian kecil anggota KPB yang justru meningkatkan jumlah tabungan sukarelnya supaya merasa lebih ringan saat harus membayar angsuran pinjaman per bulan, seperti yang terjadi di Kecamatan C dan Kecamatan F.

Lokasi sampel yang para anggota KPBnya sudah nyaris tidak melakukan kegiatan menabung adalah Kecamatan E, khususnya pada periode Q2 dan Q3. Hal tersebut terjadi karena kegiatan kelompok memang sudah tidak aktif di kecamatan ini. Dari 5 KPB sampel, hanya 1 KPB yang aktif melakukan pertemuan. Sementara KPB-KPB yang tidak aktif tidak lagi mengadakan kegiatan apapun selain menerima pembayaran angsuran pinjaman anggota.

Dilihat berdasarkan gender, meski tidak jauh berbeda, anggota perempuan cenderung lebih aktif menabung dibanding laki-laki pada setiap periodenya kecuali di Kecamatan E untuk tabungan pokok dan sukarela, serta di Kecamatan F untuk tabungan pokok saja. Hal ini disebabkan di kedua kecamatan tersebut pertemuan rutin seringkali dilaksanakan pada malam hari sehingga anggota perempuan sulit untuk hadir dan mereka tidak menabung pokok dalam pertemuan rutin.

Sementara itu, jika dilihat kecenderungan perubahannya, terjadi penurunan persentase anggota menabung baik pada anggota laki-laki maupun perempuan selama periode pemantauan. Hal tersebut tidak berlaku pada tabungan sukarela. Kecenderungan menabung sukarela pada anggota perempuan meningkat khususnya pada periode Q2 dibandingkan Q1. Hal ini disebabkan kesadaran akan pentingnya berjaga-jaga atas kebutuhan mendesak pada anggota perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan hasil analisis *scorecard*, penilaian tentang pelaksanaan kegiatan menabung (tabungan pokok) dari anggota pada KPB sampel *scorecard* cenderung lebih rendah dibanding pada KPB sampel utama. Hal ini terlihat pada perkembangan kegiatan menabung anggota dari Q1 hingga Q3 pada KPB sampel *scorecard* yang berubah dari warna hijau pada Q1 menjadi warna kuning pada Q3, sedangkan pada KPB sampel utama cenderung lebih stabil dengan berwarna hijau sejak Q1 hingga Q3 pemantauan. Perkembangan yang cukup besar pada penurunan kegiatan menabungnya adalah di Kecamatan E, baik pada KPB sampel *scorecard* maupun KPB sampel utama (Tabel 22).

Tabel 22. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Menabung Antara KPB Sampel *Scorecard* dan KPB Sampel Utama*

Kabupaten	Kecamatan	KPB Sampel SC			KPB Sampel Inti		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow
	Kecamatan B	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Yellow
	Kecamatan A	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
Pekalongan	Kecamatan E	Green	Green	Red	Green	Yellow	Yellow
	Kecamatan F	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Pemalang	Kecamatan D	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
Jawa Tengah		Green	Green	Yellow	Green	Green	Green

Keterangan: *) Kegiatan menabung yang dimaksud adalah persentase anggota KPB menabung, kepemilikan buku tabungan anggota, dan pemutakhiran buku tabungan saat pertemuan rutin KPB

Sumber: Data primer pemantauan

Jumlah Dana Tabungan KPB

Meski terjadi penurunan jumlah anggota yang hadir dan menabung dalam pertemuan rutin, namun jumlah rata-rata dana tabungan anggota KPB meningkat dari sekitar Rp1.302.167 per KPB (Rp51.478 per anggota) pada akhir Q1 menjadi sekitar Rp2.668.272 per KPB (Rp217.350 per anggota) pada akhir Q3 (Tabel 23). Hal ini selain karena sebagian anggota menambah besaran dana tabungan, namun juga karena tidak sedikit anggota yang menabung di luar kegiatan pertemuan rutin KPB. Mereka tetap menyetor tabungan meski tidak hadir dalam pertemuan karena telah menyadari dan merasakan manfaat menabung terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam rumah tangga, seperti membeli/membayar keperluan sekolah anak, membeli kebutuhan makan sehari-hari, memenuhi undangan perkawinan, dll. Namun demikian, terdapat beberapa pengurus KPB di beberapa lokasi sampel telah membagikan uang tabungan kepada para anggotanya, seperti di Kecamatan B, Kecamatan D, dan di Kecamatan E. Terutama di Kecamatan E, bahkan sebagian besar pengurus KPB telah membagikan tabungan kepada seluruh anggotanya.

Tabel 23. Jumlah Dana Tabungan per KPB (Rupiah)

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah rata-rata tabungan (Rp)		
		Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	1.700.900	3.923.650	5.731.642
	Kecamatan B	358.700	903.800	1.177.958
	Kecamatan A	1.448.400	3.114.800	3.156.550
Pekalongan	Kecamatan E	1.733.100	2.055.200	1.114.900
	Kecamatan F	667.300	1.336.000	1.808.617
Pemalang	Kecamatan D	1.904.600	3.386.200	3.019.967
Jawa Tengah		1.302.167	2.453.275	2.668.272

Sumber: Data primer pemantauan

Keseluruhan data tabungan di atas, pada dasarnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya mempunyai potensi dan kemampuan menabung, betapapun kecilnya. Jika selama ini mereka tidak mau menabung, faktor penyebabnya antara lain terkait dengan aspek kebiasaan, pemahaman, dan/atau pengetahuan yang kurang baik tentang manfaat tabungan (Kotak 5).

Kotak 5

Masyarakat Miskin Mampu Menabung?

Salah satu terobosan program PKKPM dalam mendidik dan atau memberdayakan masyarakat miskin adalah adanya kewajiban bagi mereka untuk menabung secara rutin sebagai pra-syarat kesertaannya dalam program. Ketika pra-syarat ini menjadi salah satu kriteria kesertaan program, tidak sedikit para pemangku kepentingan program yang bersikap skeptis. Umumnya skeptisisme ini muncul karena alasan yang wajar. *“Jangankan untuk menabung, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari saja mereka masih kekurangan”*, merupakan alasan umum yang kerap terdengar.

Di lain pihak, sebagian pemangku kepentingan berpendapat bahwa ketidakmampuan masyarakat miskin untuk menabung bukan semata disebabkan oleh pendapatannya yang terbatas. Namun, dalam beberapa segi hal ini terkait dengan pola pikir dan pola tindak yang keliru dalam menyiasati tingkat pendapatannya yang terbatas tersebut. Umumnya masyarakat miskin berpendapat bahwa justru karena pendapatannya yang terbatas maka semuanya harus dibelanjakan sehingga tidak tersisa untuk tabungan. Akibatnya, beberapa jenis kebutuhan yang sebenarnya kurang perlu dan bisa ditunda pemenuhannya, justru mereka kejar pemenuhannya. Bahkan jika perlu dengan cara berhutang. Kondisi demikian tidak saja membuat mereka tidak mampu menabung, melainkan justru terjebak hutang dan kemudian berada dalam lingkaran “gali lubang tutup lubang”.

PKKPM mencoba membalik pola pembelanjaan masyarakat miskin seperti itu dengan memperkenalkan mekanisme pengelolaan keuangan rumahtangga yang baru. Yakni, mereka diminta menyisihkan pendapatannya untuk tabungan lebih dahulu – berapapun jumlahnya – sebelum dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Melalui pelatihan tentang *Pengelolaan Keuangan Keluarga* dan adanya keharusan kegiatan menabung sebagai pra-syarat kesertaan, upaya ini ternyata berhasil. Mayoritas masyarakat miskin yang sebelum bergabung PKKPM tidak pernah mampu menabung, akhirnya mampu menabung. Mereka bahkan tidak hanya melakukan kegiatan tabungan pokok yang menjadi syarat kesertaan, melainkan banyak diantaranya yang juga melaksanakan tabungan sukarela yang tidak menjadi syarat kesertaan program.

Data yang disajikan pada Tabel 21 menunjukkan bahwa jika masyarakat miskin mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan perlakuan yang semestinya, sebenarnya mereka mempunyai potensi yang cukup untuk mulai “menolong” dirinya sendiri. Melalui kegiatan dan kebiasaan menabung, mereka bisa belajar bagaimana mengakumulasi asset atau modal yang juga sangat mereka butuhkan untuk mengembangkan penghidupannya dan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting di masa depan.

PKKPM telah membuktikan bahwa dalam batas-batas tertentu masyarakat miskin tidak sepenuhnya *powerless* dalam semua segi kehidupannya. Mereka punya potensi betapapun kecilnya. Tugas pembangunan umumnya dan pemberdayaan khususnya adalah bagaimana mengungkit potensi itu menjadi kekuatan yang akhirnya akan menolong masyarakat miskin itu sendiri. Lampiran 8 merupakan contoh bahwa masyarakat miskin juga mempunyai kemampuan untuk menabung.

3.3.4 Pinjaman Dalam Kelompok (Interloaning)

Selain melakukan kegiatan menabung, anggota KPB juga dianjurkan untuk melakukan kegiatan peminjaman di dalam kelompok (*interloaning*). Dana yang digulirkan untuk kegiatan peminjaman berasal dari tabungan anggota KPB sendiri. Dalam mengelola pinjaman, sebagian besar KPB memberlakukan sistem bunga pinjaman yang besarnya berkisar antara 1-5% per bulan dengan jangka waktu pinjaman antara 1 minggu hingga 3 bulan. Bahkan di beberapa KPB tidak menerapkan sistem bunga dalam pinjaman, seperti yang terjadi pada beberapa KPB di Kecamatan B.

a) Jumlah Anggota KPB Mengakses Pinjaman Dalam Kelompok

Persentase anggota KPB yang melakukan kegiatan peminjaman terus bertambah dari sekitar 34% pada Q1 menjadi sekitar 69% pada Q2 dan 75% pada Q3 (Tabel 24). Pertambahan tersebut menunjukkan akses yang semakin baik dan kebutuhan yang semakin besar anggota KPB terhadap dana pinjaman. Di sisi lain, secara ekonomis, peningkatan dalam aktifitas peminjaman mengindikasikan semakin besarnya kesadaran para anggota KPB untuk menggulirkan dana dalam rangka memperoleh keuntungan, selain untuk tujuan sosial di antara para anggota KPB.

Tabel 24. Persentase Anggota KPB yang Melakukan Peminjaman

Kabupaten	Kecamatan	% akumulasi anggota yang mengakses pinjaman								
		Total			Laki-laki			Perempuan		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	65	80	89	42	76	88	69	79	92
	Kecamatan B	5	60	63	5	75	85	6	50	50
	Kecamatan A	8	38	46	0	8	8	9	40	50
Pekalongan	Kecamatan E	69	88	89	39	74	74	65	84	90
	Kecamatan F	23	67	75	25	60	77	23	74	74
Pemalang	Kecamatan D	37	83	89	5	68	81	45	91	96
Jawa Tengah		34	69	75	19	60	69	36	70	75

Sumber: Data primer pemantauan

Peningkatan proporsi anggota KPB yang mengakses pinjaman di atas tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi per periodenya. Pada periode Q1, terdapat beberapa lokasi sampel yang akses pinjaman anggotanya sangat rendah, seperti di Kecamatan B, Kecamatan A, dan Kecamatan F, yaitu masing-masing hanya sebesar 5%, 8%, dan 23%. Di Kecamatan B dan Kecamatan F, hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya dana tabungan yang terkumpul di kelompok sehingga para pengurus kelompok membatasi jumlah orang yang meminjam dana kelompok. Sementara di Kecamatan A, rendahnya proporsi anggota KPB yang mengakses pinjaman ini akibat adanya kebijakan para pengurus beberapa KPB yang melarang anggotanya meminjam dana tabungan KPB karena khawatir dana tabungan akan habis. Namun demikian kondisi tersebut tidak bertahan lama karena memasuki awal periode Q2 para pengurus dan anggota sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan dari menggulirkan dana tabungan kelompok. Oleh karenanya, jumlah anggota KPB yang mengakses pinjaman di kecamatan ini meningkat menjadi sebesar 38% pada Q2 menjadi 46% pada Q3.

Dilihat berdasarkan gender, anggota perempuan terlihat lebih aktif meminjam dibandingkan anggota laki-laki (Tabel 24). Anggota KPB, khususnya perempuan, cenderung memanfaatkan

pinjaman ini untuk tujuan konsumsi, seperti membayar uang sekolah, biaya pengobatan, sumbangan acara keluarga, dan untuk keperluan makan sehari-hari. Untuk pinjaman hingga jumlah yang cukup besar (Rp500.000—Rp1.000.000) digunakan untuk menambah modal usaha baik pada anggota laki-laki maupun perempuan (Kotak 6).

Kotak 6

Pinjaman bagi orang miskin: untuk konsumsi atau investasi sama pentingnya

Penghidupan yang sering terdesak mengajarkan kepada orang miskin betapa pentingnya memiliki dan menjaga hubungan dengan sumber-sumber pinjaman demi keterjaminan akan kebutuhan mendesak mereka. Sumber utama pinjaman mereka adalah keluarga, warung, dan tetangga. Di daerah pilot PKKPM kebutuhan mendesak orang miskin mulai dari untuk makan sehari-hari, uang sekolah, ongkos berobat, sampai biaya melahirkan. Lampiran 9 memberikan ilustrasi bagaimana anggota PKKPM menyiasati penghasilannya yang kurang dalam mencukupi kebutuhan hariannya melalui pinjaman.

Ketika masyarakat miskin sendiri mampu menghimpun dana melalui kegiatan tabungan kelompok, mereka dengan mudah sepakat meminjamkannya, terutama untuk menalangi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Dari enam kecamatan lokasi pilot PKKPM hanya satu kecamatan yang memiliki kecenderungan tingkat peminjaman yang rendah. Tidak ada pinjaman gratis, bukan hanya angsuran yang wajib dibayar tepat waktu, peminjam pun dikenakan bunga, meskipun ringan. Aturan ini tercantum dalam tata tertib KPB. Adanya kesadaran masyarakat miskin seperti ini sangat diperlukan bagi masa depan PKKPM karena di masa lalu pinjaman yang diberikan melalui program pemerintah banyak yang menganggapnya sebagai “hibah,” sesuatu yang tidak perlu dikembalikan.

Nilai pinjaman dan kemampuan mengangsur rumah tangga miskin cukup besar. Hal ini tercermin dari banyaknya anggota KPB yang pernah mengambil kredit sepeda motor yang harganya di atas sepuluh juta rupiah. Beberapa anggota KPB yang sudah melunasi kredit sepeda motor kemudian mengagunkan BPKB-nya untuk memperoleh modal usaha. Mereka yang mempunyai sertifikat tanah mengagunkannya untuk meminjam pada lembaga keuangan untuk tujuan investasi.

Gambaran di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin mempunyai potensi untuk meminjam dalam jumlah relatif besar yang cukup memadai untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha lama. Dengan manajemen pinjaman yang baik, bantuan pinjaman modal usaha melalui PKKPM akan bermanfaat bagi banyak rumah tangga miskin. Pelatihan usaha yang terprogram dengan baik kepada peminjam merupakan penopang utama bagi keberhasilan PKKPM dalam usaha membantu orang miskin keluar dari jerat kemiskinan.

b) Kedisiplinan Anggota KPB Dalam Membayar Angsuran Pinjaman Dalam Kelompok

Hal yang sangat penting dalam kegiatan peminjaman adalah kedisiplinan dalam melakukan pembayaran angsuran. Anggota KPB diwajibkan membayar angsuran saat kegiatan pertemuan rutin dan tidak menunggak melampaui masa jatuh tempo pinjaman. Tabel 25 menunjukkan bahwa kedisiplinan anggota KPB semakin menurun untuk membayar angsuran saat pertemuan rutin, yaitu dari sekitar 75% pada Q1 menjadi hanya sekitar 14% dan 25% saja pada Q2 dan Q3.

Jika dilihat berdasarkan gender, anggota perempuan terlihat kurang disiplin dibanding anggota laki-laki. Meski di sebagian besar KPB menerapkan sanksi (bunga ditambahkan setiap pertemuan), namun faktor tidak adanya ketegasan dari para pengurus KPB maupun pendamping untuk menerapkan sanksi tersebut menyebabkan para anggota lalai dalam mengangsur pinjaman saat pertemuan rutin. Meski demikian, tidak ditemukan anggota KPB yang menunggak melewati batas waktu periode pinjaman (tidak ada *Non Performing Loan/NPL*).

Tabel 25. Persentase anggota KPB Yang Melakukan Pembayaran Angsuran Tepat Waktu Saat Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% Anggota yang telah melakukan angsuran saat pertemuann rutin								
		Total			Laki-laki			Perempuan		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	93	4	54	NA	33	100	NA	0	-
	Kecamatan B	-	35	35	NA	55	34	NA	26	46
	Kecamatan A	44	0	33	NA	-	50	NA	0	-
Pekalongan	Kecamatan E	46	25	0	NA	0	0	NA	25	25
	Kecamatan F	100	17	0	NA	17	0	NA	17	0
Pemalang	Kecamatan D	90	0	-	NA	0	-	NA	0	-
Jawa Tengah		75	14	25	NA	21	37	NA	11	24

Sumber: Data primer pemantauan

c) Penilaian KPB Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Peminjaman

Tabel 26 menampilkan perbandingan hasil analisis *scorecard* tentang penilaian antara KPB sampel *scorecard* dan KPB sampel utama dalam melaksanakan kegiatan *interloaning*. Meski kondisi pada kedua jenis sampel KPB kurang memuaskan, namun kondisi dan perkembangan kegiatan *interloaning* pada KPB sampel utama lebih buruk dibandingkan pada KPB sampel *scorecard*. Kondisi ini dilihat berdasarkan pada kelancaran para anggota membayar angsuran dan keberadaan sanksi jika ada anggota yang tidak disiplin dalam pembayaran angsuran tersebut. Tentu saja hal ini juga dipengaruhi pada subjektivitas para anggota dalam menilai kelompoknya sendiri.

Tabel 26. Perbandingan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Peminjaman Antara KPB Sampel Scorecard dan KPB Sampel Utama

Kabupaten	Kecamatan	KPB sampel scorecard			KPB sampel utama		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	Yellow	Yellow	Red	Green	Red	Yellow
	Kecamatan B	Red	Yellow	Yellow	-	Yellow	Yellow
	Kecamatan A	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red
Pekalongan	Kecamatan E	Green	Green	Red	Yellow	Red	Red
	Kecamatan F	Red	Yellow	Yellow	Green	Red	Red
Pemalang	Kecamatan D	Green	Yellow	Green	Green	Red	-
Jawa Tengah		Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Red

Sumber: Data primer pemantauan

d) Jumlah Dana Pinjaman

Dilihat dari besaran dana yang bergulir, jumlah dana yang dipinjam oleh para anggota KPB meningkat dari Q1 hingga Q3, yaitu rata-rata sebesar Rp1.119.410 per KPB pada Q1 menjadi rata-rata sebesar Rp4.044.875 per KPB pada Q3 (Tabel 27). Kecamatan C, Kecamatan D, dan Kecamatan E, secara berurutan merupakan lokasi sampel yang memiliki nilai pinjaman paling besar dibanding lokasi lainnya.

Tabel 27. Jumlah Dana Pinjaman Yang Bergulir (Rupiah)

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah rata-rata dana pinjaman per KPB (Rp)		
		Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	1.730.000	4.945.900	9.693.800
	Kecamatan B	243.800	791.900	1.087.800
	Kecamatan A	430.000	1.435.000	1.850.000
Pekalongan	Kecamatan E	1.676.250	1.820.050	4.379.700
	Kecamatan F	NA	1.841.300	2.602.550
Pemalang	Kecamatan D	1.517.000	4.094.700	4.655.400
Jawa Tengah		1.119.410	2.488.142	4.044.875

Sumber: Data primer pemantauan

3.3.5 Pemutakhiran Pembukuan Kelompok

Kegiatan pertemuan kelompok yang rutin dilakukan dengan berbagai transaksi antar anggota yang terjadi di dalamnya tentu saja membutuhkan pencatatan pembukuan yang lengkap dan akurat. Tidak hanya itu, pencatatan ini perlu dimutakhirkan pada setiap pertemuannya untuk menghindari adanya hal-hal yang terlewat untuk dicatat. Beberapa jenis pembukuan yang perlu dimutakhirkan tersebut adalah buku kas kelompok, buku tabungan anggota dan kelompok, serta buku pinjaman anggota dan kelompok. Kegiatan pencatatan/pembukuan kelompok dilakukan oleh pengurus kelompok, yaitu bendahara atau sekretaris, bahkan ketua kelompok.

Tabel 28. Persentase KPB yang melakukan pemutakhiran Buku Tabungan Kelompok dan Anggota Pada Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% KPB memutakhirkan buku kas		% KPB memutakhirkan buku tabungan kelompok		% KPB memutakhirkan buku tabungan anggota		% KPB yang memutakhirkan buku pinjaman kelompok		% KPB yang memutakhirkan buku pinjaman anggota	
		Q2	Q3	Q2	Q3	Q2	Q3	Q2	Q3	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	30	30	70	60	60	70	50	70	0	20
	Kecamatan B	50	40	60	50	60	60	60	60	40	60
	Kecamatan A	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
Pekalongan	Kecamatan E	20	20	30	20	30	20	20	20	-	-
	Kecamatan F	78	65	80	78	58	88	78	33	-	-
Pemalang	Kecamatan D	60	60	80	90	80	90	40	40	80	90
Jawa Tengah (Kecamatan E)		56	53	70	66	65	71	50	45	40	57
Jawa Tengah (tanpa Kecamatan E)		64	59	78	76	72	82	57	51	40	57

Sumber: Data primer pemantauan

a) Pemutakhiran Buku Kas

Mereka mendapatkan format buku kas dari para fasilitator (FK ataupun KPMD). Pencatatan buku kas yang harus dilakukan oleh pengurus kelompok cukup sederhana. Secara umum, persentase KPB yang melakukan pemutakhiran buku kas pada saat pertemuan rutin tergolong rendah, yaitu sekitar 56%-53% pada periode Q2 dan Q3 (Tabel 28). Hal ini selain faktor ketidaksiplinan pengurus dalam pencatatan juga karena faktor kurangnya pemahaman para pengurus kelompok dalam pencatatan.

Persentase KPB yang melakukan pemutakhiran pembukuan kelompok di Kecamatan A sebanyak 100% dan merupakan capaian tertinggi baik pada periode Q2 maupun Q3 dibanding lokasi sampel lainnya. Capaian terendah terjadi di Kecamatan E yaitu hanya 20%. Di Kecamatan A, memasuki periode Q2 para pendamping dan anggota KPB kembali bersemangat melakukan kegiatan pertemuan rutin dan melakukan pemutakhiran pembukuan secara rutin justru setelah fasilitator tidak lagi bertugas pada akhir Desember 2014 (kontrak fasilitator dengan PNPM Perdesaan habis). Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiplinan para pendamping dan anggota KPB dengan kinerja fasilitator tersebut yang dinilai buruk. Sementara di Kecamatan E, pembukuan hanya dilakukan pada awal pembentukan KPB hingga pertemuan ke-12 saja (sekitar awal periode Q2) sesuai dengan kegiatan pertemuan rutin mereka yang juga hanya sampai pertemuan ke-12. Hingga akhir Q3, hanya ada 1 KPB di Kecamatan E yang masih melakukan pertemuan rutin dan melakukan pencatatan pembukuan.

b) Pemutakhiran Buku Tabungan Anggota dan Kelompok

Semua KPB sudah memiliki buku tabungan kelompok, buku tabungan anggota, dan rekening tabungan di bank. Akan tetapi, dalam hal pemutakhirannya, hanya di Kecamatan A yang KPBnya disiplin (100%) melakukan pemutakhiran buku tabungan kelompok maupun anggota dalam setiap pertemuan rutin baik pada Q2 maupun Q3 (Tabel 28). Hal ini dikarenakan para pengurus KPB mendapatkan motivasi dan pendampingan yang baik dari para fasilitator. Sementara itu, alasan beberapa KPB di lokasi sampel lain yang tidak melakukan pemutakhiran saat pertemuan adalah karena lupa membawa buku catatan, malas/lebih senang menunda, tidak ada pengawasan dari fasilitator, dll. Namun demikian, para pengurus tersebut tetap melakukan pencatatan meski di luar kegiatan pertemuan.

Dilihat secara umum, pengurus KPB yang disiplin melakukan pemutakhiran buku tabungan kelompok hanya mencapai 70% pada periode Q1 dan menurun menjadi 66% pada Q3. Sementara untuk KPB yang melakukan pemutakhiran buku tabungan anggota justru meningkat sebesar 6 titik persen dari 65% pada Q2 menjadi 71% pada Q3 (Tabel 28). Kecenderungan menurunnya kehadiran para pengurus dalam pertemuan, khususnya pengurus yang memegang buku tabungan kelompok, menyebabkan menurunnya persentase KPB yang melakukan pemutakhiran buku tabungan kelompok. Sementara untuk buku tabungan anggota, sebagian besar anggota KPB menyimpan sendiri buku tabungan mereka dan membawanya saat pertemuan rutin. Karenanya, hanya buku tabungan anggota yang dimutakhirkan oleh pengurus pada saat pertemuan KPB. Hal ini seringkali menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan dan kesalahpahaman antara anggota dan pengurus kelompok. Adakalanya terjadi ketidakcocokan pencatatan yang terdapat dalam buku kelompok dan buku anggota, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan F. Oleh sebab itu, pencatatan pembukuan kelompok harus dilakukan secara rutin dan transparan pada saat pertemuan untuk menghindari hal-hal tersebut.

c) Pemutakhiran Buku Pinjaman Anggota dan Kelompok

Secara umum persentase KPB yang melakukan pemutakhiran buku pinjaman kelompok menurun sebesar 5 titik persen dari 50% pada Q2 menjadi 45% pada Q3, sedangkan pada pemutakhiran buku pinjaman anggota terjadi sebaliknya, yaitu meningkat 17 titik persen dari 40% pada Q2 menjadi 57% pada Q3 (Tabel 26). Penurunan persentase pengurus KPB yang melakukan pemutakhiran buku kelompok cukup drastis terjadi di Kecamatan F, sementara di lokasi lainnya cenderung tetap. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, faktor ketidakhadiran pengurus (bendahara) menyebabkan tidak terbaharuinya pencatatan buku pinjaman kelompok saat pertemuan rutin. Sementara itu, peningkatan persentase pemutakhiran buku pinjaman anggota karena buku pinjaman anggota disimpan sendiri oleh para anggota sehingga langsung diperbaharui saat pertemuan meski pengurus tidak hadir. Selain itu, memasuki Q3 para anggota sudah mulai mengangsur pinjaman BLM sehingga cenderung lebih tertib dalam pencatatan pembukuannya.

3.3.6 Kegiatan Lain KPB

Selain kegiatan simpan pinjam, KPB juga melakukan kegiatan lain. Di Kecamatan B, Kecamatan C dan Kecamatan E beberapa KPB melakukan kegiatan arisan dan mengaji (yasinan). Di Kecamatan B ada beberapa KPB yang melakukan kegiatan usaha kelompok seperti menjual bensin, gas, kopi, mengumpulkan barang bekas, dan memproduksi keripik. Begitu juga di Kecamatan D, beberapa KPB memproduksi barang-barang seperti kentongan, bros untuk dijual dengan dititipkan ke warung, dan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam apotek hidup. Hasil penjualannya dibagikan pada anggota kelompok, dimasukkan ke kas kelompok, atau dipakai untuk membeli makanan keperluan pertemuan rutin KPB.

Sebagai kegiatan pengantar sebelum melakukan kegiatan inti dalam pertemuan rutin, ada beberapa variasi kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anggota KPB. Di Desa C1 (Kecamatan C) semua anggota KPB selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan membaca bersama-sama janji kelompok dengan suara keras. Sementara itu, di Desa D1, selain membacakan janji kelompok para anggota juga memiliki “yel-yel” berupa nyanyian yang diciptakan sendiri oleh setiap KPB sebagai penyemangat mereka dalam melakukan aktifitas kelompok.

3.4 Pendampingan KPB

Kegiatan pendampingan merupakan komponen yang sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Karenanya, seorang fasilitator sangat dituntut untuk terlibat dalam penguatan partisipasi masyarakat, khususnya para penerima program, baik dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi program bersangkutan, bukan sekedar sebagai pemecah masalah secara langsung.

Dalam program PKKPM, selain KPMD/kader dusun, pihak yang juga cukup berpengaruh dalam proses pendampingan adalah fasilitator kecamatan (FK). Beberapa tugas pendampingan yang mereka lakukan diantaranya adalah pendampingan saat pembentukan kelompok/pengurus, penyusunan tata tertib dan rencana kerja kelompok, fasilitasi pelaksanaan pelatihan, pendampingan dalam penyusunan rencana usaha/kerja dan pelaksanaannya, kehadiran dan pemberian pengarahan/materi pada pertemuan rutin, dan fasilitasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan serta masalah kelompok (kebutuhan pelatihan usaha, informasi, pembukuan, dll).

Tabel 29. Persentase Kehadiran Fasilitas dalam Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% FK hadir			% FK ikuti kegiatan awal-akhir			% FK memberi arahan		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	Kecamatan B	23	0	0	0	-	-	50	-	-
	Kecamatan A	10	0	10	100	-	100	100	-	100
Pekalongan	Kecamatan E	10	0	0	0	-	-	100	-	-
	Kecamatan F	20	0	0	50	-	-	50	-	-
Pemalang	Kecamatan D	40	0	13	100	-	80	75	-	80
Jawa Tengah		17	0	4	47	-	-	58	-	-
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		19	0	5	63	-	-	69	-	-

Sumber: Data primer pemantauan

Perkembangan tingkat kehadiran FK pada periode Q1 hingga Q3 belum memberikan gambaran yang menggembirakan. Tidak ada FK yang hadir dalam pertemuan selama periode Q2, padahal pada saat Q1 sekitar 17% pertemuan dihadiri oleh FK. Hal ini terkait dengan kontrak kerja FK dengan program PNPM Perdesaan yang telah habis pada akhir Desember 2014 (awal Q2) sehingga tidak ada lagi FK yang bertugas hingga akhir Maret 2015. Namun demikian, ada sekitar 4% KPB yang pertemuannya dihadiri oleh FK pada periode Q3 dan itupun hanya terjadi di Kecamatan A dan Kecamatan D.. Peningkatan kehadiran FK ini terutama terjadi pada awal periode Q3, yaitu sekitar April-Mei 2015 yang merupakan masa awal tim FK yang baru bertugas untuk PKKPM 2015. Akan tetapi, pada akhir Q3 kehadiran FK kembali menurun karena mereka mulai berkonsentrasi mendampingi KPB pada PKKPM 2015 yang sudah terbentuk dan melakukan pertemuan rutin (Tabel 29). Meski demikian, setiap kali kehadiran FK dalam pertemuan rutin selalu diikuti dengan pemberian pengarahan kepada anggota KPB, baik berupa motivasi kepada anggota KPB, dan penjelasan lainnya yang dirasa dibutuhkan dalam kelompok.

Tabel 30. Persentase Kehadiran KPMD dalam Pertemuan Rutin

Kabupaten	Kecamatan	% Kehadiran pendamping			% pendamping ikuti kegiatan dari awal-akhir			% Pendamping memberi arahan		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C	60	40	35	84	100	75	100	100	100
	Kecamatan B	100	20	0	45	100		100	50	-
	Kecamatan A	100	90	70	80	88	100	50	35	50
Pekalongan	Kecamatan E	40	10	0	100	-	-	84	-	-
	Kecamatan F	50	30	50	88	100	100	84	100	83
Pemalang	Kecamatan D	90	30	30	100	75	50	68	100	50
Jawa Tengah		73	37	31	83	93	81	81	77	71
Jawa Tengah Tanpa Kecamatan E		80	42	37	79	93	81	80	77	71

Sumber: Data primer pemantauan

Untuk kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin KPB, hanya sekitar 47% KPB yang pertemuan rutinnya dihadiri oleh pendamping sejak periode Q1 hingga Q3 pemantauan (jika tidak memperhitungkan Kecamatan E menjadi sebesar 53%). Dari angka tersebut, sekitar 85% diantaranya pertemuan rutin KPB dihadiri oleh KPMD sejak pertemuan dimulai hingga berakhir dan sekitar 71% dari pertemuan tersebut yang KPMDnya memberikan arahan/materi selama pertemuan (Tabel 30).

KPMD yang hadir dalam pertemuan di tiap periodenya semakin lama semakin menurun, yaitu dari 73% pada Q1 dan merosot menjadi 37% pada Q2 dan kembali menurun menjadi 31% pada Q3. Begitu pula dengan kegiatan KPMD dalam memberi pengarahan saat pertemuan KPB semakin menurun (menurun 10 titik persen pada Q3 terhadap Q1). Kondisi ini bermula dari adanya kekosongan jabatan FK sejak Januari hingga April 2015 dan keterlambatan pencairan dana pelatihan dan pinjaman usaha yang tidak kunjung terlaksana hingga Januari 2015, khususnya di Brebes. Para KPMD merasa khawatir dan takut akan pertanyaan para anggota KPB tentang kapan pelatihan usaha akan dilaksanakan dan kapan dana pinjaman usaha akan dicairkan. Bahkan di Kecamatan B dan Desa C1 tidak jarang para anggota berkata kasar atau menuduh para KPMD menggelapkan uang tersebut. Memasuki periode Q3 pemantauan, para KPMD kembali jarang hadir saat pertemuan KPB karena waktu dan konsentrasinya mulai tersita dengan adanya tugas baru untuk mendampingi KPB-KPB baru di PKKPM 2015 yang telah terbentuk dan melakukan kegiatan.

Komponen kehadiran KPMD di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan pertemuan rutin, kehadiran anggota dan pengurus dalam pertemuan. Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi diantara ketiga komponen tersebut (Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kehadiran KPMD dengan terlaksananya pertemuan rutin. Selain itu, terdapat pula hubungan yang positif dan signifikan antara kehadiran KPMD dengan kehadiran pengurus dan anggota KPB. Artinya, jika tingkat kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin tinggi (pendamping sering hadir) maka pertemuan rutin cenderung akan terlaksana dan kehadiran pengurus serta anggota KPB juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika kehadiran pendampingnya rendah. Oleh karenanya, kehadiran pendamping sangat berperan terhadap terselenggaranya aktivitas kelompok

Jika dilihat berdasarkan hasil penilaian para pengurus KPB terhadap kinerja KPMD melalui sistem *scorecard*, secara umum, baik pada KPB sampel *scorecard* maupun sampel utama, terlihat bahwa kinerja KPMD tergolong baik (warna hijau pada Q2 dan Q3). Bahkan hasil penilaian dari KPB sampel *scorecard* menunjukkan bahwa kinerja para KPMD membaik dari Q1 hingga Q3 (warna kuning pada Q1 menjadi warna hijau pada Q3). Namun demikian, pendamping di beberapa kecamatan dinilai memiliki kinerja yang semakin berkurang, seperti di Kecamatan E dan Kecamatan F pada KPB sampel *scorecard* dan di Kecamatan B, Kecamatan E serta Kecamatan D pada KPB sampel utama (Tabel 31).

Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian para pendamping pada KPB sampel *scorecard* dan KPB sampel utama terhadap kinerja dirinya sendiri terlihat bahwa secara umum mereka merasa kinerjanya cukup baik dan stabil (warna hijau dari Q1 hingga Q3). Namun demikian, jika dilihat per kecamatan, para pendamping pada KPB sampel *scorecard* di Kecamatan C, Kecamatan B, dan Kecamatan E merasa kinerja mereka cenderung menurun dari Q1 hingga Q3. Berbeda dengan penilaian para pendamping pada KPB sampel utama, yaitu terjadi penurunan kinerja pendamping di Kecamatan D, sedangkan terjadi peningkatan kinerja pendamping di Kecamatan F dari Q2 ke Q3 (Tabel 31).

Tabel 31. Hasil Penilaian KPB Terhadap Kinerja KPMD dan Penilaian KPMD Terhadap Kinerja Dirinya Sendiri Pada KPB Sampel Scorecard (15 KPB) dan KPB Sampel Utama (30 KPB)

Kabupaten	Kecamatan	Penilaian KPB terhadap kinerja pendamping						Penilaian pendamping terhadap kinerja diri sendiri					
		KPB sampel scorecard			KPB sampel utama			KPB sampel scorecard			KPB sampel utama		
		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Brebes	Kecamatan C				NA						NA		
	Kecamatan B				NA						NA		
	Kecamatan A				NA						NA		
Pekalongan	Kecamatan E				NA						NA		
	Kecamatan F				NA						NA		
Pemalang	Kecamatan D				NA						NA		
Jawa Tengah					NA						NA		

Berdasarkan hasil analisis *scorecard* di atas, baik menurut penilaian pihak KPB sampel *scorecard* maupun KPB sampel utama menunjukkan bahwa beberapa kinerja KPMD yang cenderung dinilai rendah (nilai rata-rata di bawah 50%) adalah komponen pendampingan dalam penyusunan rencana kerja, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kelompok, dan informasi tentang lowongan kerja. Sementara untuk penilaian dari KPMD terhadap kinerja dirinya sendiri, bagi pihak KPB sampel *scorecard*, masalah upaya para KPMD dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam usaha/kerja merupakan komponen yang masih dirasa rendah (rata-rata di bawah 50%). Sementara itu, bagi pihak KPB sampel utama, masalah upaya penyediaan informasi kesempatan kerja adalah komponen pendampingan yang dirasa masih belum bisa disediakan oleh para KPMD bagi para anggota KPB.

Jika dilihat berdasarkan tren perubahan yang terjadi dari periode Q1 hingga Q3, hasil penilaian KPB sampel *scorecard* terhadap KPMD menunjukkan bahwa tiga komponen pendampingan yang menurun drastis adalah komponen kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin KPB dan komponen peran KPMD dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi KPB secara umum. Sementara itu, untuk penilaian KPB sampel utama terhadap KPMD terkait dengan komponen pendampingan yang menurun drastis adalah tentang kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin, peran KPMD dalam penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan usaha/kerja, dan penyediaan informasi lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, tren penurunan terbesar hasil penilaian KPMD terhadap kinerja dirinya sendiri pada KPB sampel *scorecard* adalah pada komponen kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin dan pada komponen perannya dalam penyediaan sarana dan prasarana usaha/kerja yang dibutuhkan anggota. Sedangkan penilaian para KPMD terhadap dirinya sendiri pada KPB sampel utama terkait dengan tren penurunan terbesar adalah pada komponen kehadiran KPMD dalam pertemuan rutin dan pada perannya dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi KPB secara umum.

IV. PERSIAPAN AKTIVITAS USAHA DAN KERJA

4.1 Penyusunan Proposal Usaha dan Kerja

Para anggota KPB dalam membuat rencana usaha atau kerja berdasarkan pertimbangan pragmatis dan masuk akal. KPB yang lokasi rumah anggotanya berjauhan dan dengan pengalaman usaha yang berbeda satu sama lain, misalnya, cenderung akan memilih usaha individual. Alasan lain dalam memilih usaha individual adalah untuk menghindari konflik di antara sesama anggota dalam menjalankan kegiatannya. Terkait dengan hal ini, apakah usaha atau kerja yang akan dilaksanakannya tersebut bersifat sebagai usaha atau kerja sampingan atau pokok, tergantung dari seberapa besar potensi pendapatan dari usaha atau kerja ini dibanding dengan penghasilan dari pekerjaannya selama ini. Dalam hal ini terdapat kecenderungan bahwa anggota KPB yang akan menjadikan usaha atau kerja Program PKKPM sebagai sumber penghasilan utama adalah mereka yang selama ini menjadi buruh tani/buruh serabutan lainnya dengan penghasilan dan status sosial rendah atau bahkan pengangguran. Alasan lainnya adalah usaha tersebut sedang atau pernah sebagai sumber penghasilan utama keluarga, namun terhenti atau kurang berkembang karena terkendala berbagai hal, termasuk keterbatasan modal. Sementara itu, anggota KPB yang menjadikan usaha atau kerja Program PKKPM sebagai sumber pendapatan sampingan adalah mereka yang ingin memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan yang selama ini dinilai sudah lumayan.

Di pihak lain, anggota KPB yang mengajukan usaha kelompok beralasan bahwa dengan berkelompok memungkinkan terjadi pembagian kerja, saling berbagi pengalaman, dan meningkatkan semangat usaha. Tidak semua anggota memiliki pengetahuan yang sama tentang suatu usaha atau kerja. Salah satu anggota KPB yang ikut dalam usaha kelompok pembuatan kripik¹⁵ mengatakan: *“kalau bekerja sendiri khawatir semangatnya makin lama makin menurun.”* Alasan lain dalam memilih usaha kelompok disebabkan jika usaha yang sama dilakukan oleh banyak anggota akan menyulitkan pemasaran karena akan memunculkan persaingan antaranggota.

Selain aspek pengalaman dan keterampilan, besarnya pasar yang tersedia di sekitar maupun di luar daerah tempat tinggal anggota KPB atas produk yang akan mereka tawarkan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan proposal usaha. Tentu pertimbangan-pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan anggota KPB yang relatif terbatas. Oleh karena itu, kepada mereka disediakan bantuan yang salah satunya melalui PKKPM. Program ini menyediakan bimbingan melalui fasilitasi dan pendampingan, serta pelatihan usaha dan kerja untuk mempersiapkan agar anggota KPB dapat menjalankan usaha atau kerjanya secara baik.

Cara KPMD mengerjakan tugasnya membimbing anggota KPB dalam menyusun proposal bervariasi. Lima dari 30 KPB sampel yang setiap anggotanya mengajukan proposal usaha individual adalah yang rapat penyusunan proposalnya tidak dipimpin oleh pengurus KPB tetapi oleh KPMD. Dalam rapat di lima KPB tersebut tidak satu pun anggota yang ikut berbicara membahas rencana proposal mereka. Rapat lebih merupakan forum bagi KPMD untuk menyampaikan rencana proposal menurut apa yang sudah diputuskannya sendiri. Untuk 25 KPB lainnya, KPMD melibatkan anggota dalam penyusunan proposal baik KPMD yang menuliskan proposal setelah melakukan diskusi kebutuhan

¹⁵Pembuatan kripik merupakan usaha baru bagi beberapa anggota kelompok, tetapi anggota lainnya ada yang sudah berpengalaman dalam pembuatan dan penjualannya.

pengajuan proposal bersama anggota, maupun anggota menulis sendiri proposal dengan panduan KPMD.

Setelah mengikuti pelatihan pembuatan proposal usaha dan kerja, memang ada beberapa FK dan KPMD yang menyimpulkan bahwa anggota KPB yang berkemampuan rendah tidak mungkin dapat menyusun proposal dengan kesulitan dan kerumitan tinggi seperti yang dituntut materi pelatihan. Menurut seorang FK, *“para fasilitator saja sulit mencerna cara-cara pembuatan proposal usaha dan kerja tersebut apalagi anggota KPB yang kemampuannya lebih rendah daripada fasilitator.”* Seorang peserta pelatihan bahkan mengeluh, *“pusing mengikuti tiga hari pelatihan pembuatan proposal di Semarang.”* Peserta lain menyatakan, *“pembuatan proposal seperti disampaikan pada pelatihan tidak bisa direalisasikan langsung kepada anggota KPB; Bappenas perlu menyederhanakan format penulisan proposal usaha dan kerja tersebut.”*

Kesulitan membuat proposal usaha dan kerja bagi FK dan KPMD terungkap juga ketika diadakan rapat koordinasi di salah satu UPK. Beberapa FK dan KPMD tampak tidak paham cara pembuatan proposal, padahal mereka sudah mengikuti pelatihannya. Komentar para peserta rapat koordinasi, antara lain, bahwa pembuatan proposal terlalu sulit untuk diserahkan kepada RTM karena kemampuan mereka rendah. Bagi anggota KPB sendiri, kesulitan membuat proposal bukan saja terbatas pada aspek teknis penyusunannya. Lebih dari itu, khususnya untuk proposal yang berupa usaha baru, mereka kesulitan membuat perkiraan tentang berbagai jenis barang/alat produksi yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman ini, sebaiknya anggota KPB terlebih dulu mendapatkan pelatihan vokasional tentang usaha/kerja yang akan dijalankannya dan kemudian baru diminta membuat proposal. Mereka yang mempunyai rencana usaha dan kerja yang sebelumnya tidak pernah dikenal di desa bersangkutan hanya mungkin mampu menyusun proposalnya setelah mereka mengikuti pelatihan jenis usaha dan kerja tersebut.

Pada praktiknya, setiap FK dan KPMD memiliki cara sendiri dalam proses penyusunan proposal usaha dan kerja. Paling tidak terdapat tiga pendekatan dalam aktivitas ini, pertama, FK dan KPMD mendiskusikan berbagai kebutuhan untuk pilihan usaha atau kerja dengan calon pelakunya. Kedua, FK dan KPMD meminta anggota KPB menuliskan rincian kebutuhan untuk rencana usaha yang diinginkannya. Namun, pada kedua pendekatan ini pada akhirnya FK dan KPMD juga yang menyelesaikan rumusan proposalnya. Pendekatan ketiga, FK dan KPMD menyusun sendiri kebutuhan untuk setiap rencana usaha yang akan ditawarkan kepada anggota KPB. Ketiga pendekatan itu menggunakan berbagai formulir isian yang telah dijelaskan dan dibagikan kepada FK dan KPMD pada waktu mereka mengikuti pelatihan. Dalam keseluruhan proses tersebut, anggota KPB yang pernah menjalankan usaha seperti yang direncanakan oleh anggota lainnya cukup membantu proses penyusunan proposal terutama pada pembuatan RAB (rencana anggaran biaya) usaha..

Pendekatan itu membuat proses penyusunan proposal antara satu KPB dengan lainnya berbeda. Perbedaannya terlihat mulai dari waktu dan lama pertemuan, jenis usaha dan kerja yang dipilih, sifat proposal (individual, kelompok) sampai prosedur pengambilan keputusan. Perbedaan tersebut banyak dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan kerja fasilitator dan pendamping.¹⁶ Tentu saja kemauan dan kemampuan berusaha anggota KPB sendiri juga ikut berperan, namun kondisi itu harus diterima “apa adanya.” Sebab, tujuan Program PKKPM melalui pendampingan dan pelatihan itu justeru untuk meningkatkan kemampuan anggota KPB dalam menemukembangkan usaha atau kerja yang berkelanjutan bagi perbaikan kesejahteraan hidup mereka.

¹⁶Para pengelola program tingkat desa di sebuah kecamatan merasa lebih bersemangat bekerja ketika FKnya habis kontrak. Selama ini FK memerintah “semaunya” tanpa arah dan tidak memberi jalan keluar, sekarang mereka dapat bekerja sesuai dengan PTO P2B.

Kebanyakan KPB melakukan pertemuan untuk menyusun proposal usaha dan kerja di siang hari, terutama pada sore hari; lainnya di malam hari. Hanya satu KPB yang melakukan pertemuan penyusunan proposal di pagi hari. Pola waktu pertemuan seperti ini mengindikasikan bahwa anggota KPB adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, walaupun penghasilan mereka rendah. Jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka umumnya dilakukan di siang hari, khususnya pada waktu pagi, seperti bertani atau berjualan (*bakulan*).

Terdapat satu KPB yang memerlukan waktu pertemuan penyusunan proposal kurang dari satu jam. Selebihnya melakukan pertemuan lebih dari satu jam, bahkan di antaranya ada enam KPB yang melaksanakannya lebih dari satu setengah jam. Mayoritas KPB dapat menyelesaikan proposal dalam sekali pertemuan. Beberapa lainnya memerlukan beberapa kali pertemuan dengan memanfaatkan sebagian waktu dalam pertemuan rutin mereka.

Jenis usaha dan kerja yang dipilih umumnya pada sektor yang banyak dikerjakan oleh warga di lingkungannya, atau pekerjaan yang sudah mereka kenal bahkan usaha lama yang sedang atau pernah dilakukannya namun terhenti, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, jasa (menjahit, sopir), membuat dan menjual makanan (ringan), dan lain-lain. Hanya sedikit yang berkeinginan mencoba pekerjaan yang selama ini belum ada di lingkungannya. Kecenderungan demikian dilatari oleh ketidakberanian/ketidaktahuan menghadapi resiko usaha baru, informasi peluang usaha terbatas, dan merasa sudah memiliki keterampilan tentang usaha lama. Baik fasilitator dan pendamping apalagi anggota KPB tidak mengetahui sumber informasi tentang berbagai potensi usaha/kerja yang baru.

Pada akhirnya KPB sampel pemantauan dengan jumlah 427 anggota, 418 orang atau 98% diantaranya berhasil mengajukan proposal (375 proposal) yang terdiri dari 82,2% usaha individual (354 proposal), 12,9% usaha kelompok (9 proposal), dan 2,8% kerja (12 proposal) (Tabel 32). Fakta ini mengindikasikan bahwa kelembagaan dan kegiatan PKKPM sebagai wadah pembinaan kerja kelompok belum berhasil mengarahkan KPB ke misi itu. Penyebab utamanya, banyak FK dan KPMD tidak melaksanakan tugasnya secara profesional, tidak memperhatikan PTO Program PKKPM, bahkan cenderung mencari cara kerja mudah. Misalnya, mereka saling mengkopi proposal antar anggota dan antar KPB dan berpikir untuk membagi rata dana yang tersedia kepada setiap anggota KPB. Selain itu, faktor keterbatasan pengetahuan anggota tentang usaha kelompok karena belum berpengalaman menjalankan usaha kelompok juga menyebabkan mereka tidak berani mengajukan usaha kelompok.

Tabel 32. Persentase Anggota KPB Yang Mengajukan Proposal dan Jumlah Proposal Yang Terkumpul

Kecamatan	% Anggota yang mengajukan proposal			% Total anggota mengajukan proposal	Jumlah proposal yang dihasilkan (buah)			Total proposal (buah)
	Usaha		Kerja		Usaha		Kerja	
	Individu	Kelompok			Individu	Kelompok		
Kecamatan C	86,3	12,3	1,4	100	63	3	1	67
Kecamatan B	94,2	5,8	0	100	49	1	0	50
Kecamatan A	98,5	0	1,5	100	64	0	1	65
Kecamatan E	79,7	0	12,2	91,9	62	0	9	71
Kecamatan F	76,7	17,8	1,4	95,9	56	1	1	58
Kecamatan D	66,7	33,3	0	100	60	4	0	64
Jawa Tengah	82,2	12,9	2,8	97,9	354	9	12	375

Sumber: Data primer pemantauan

Sembilan orang anggota KPB (2,1%) sengaja tidak mau mengajukan proposal usaha atau kerja karena khawatir tidak mampu membayar pinjamannya. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tetap menjadi anggota KPB karena tertarik mengikuti berbagai kegiatan pelatihan. Salah seorang dari kelompok ini mengatakan, *“Saya tidak mau lagi menambah hutang, takut tidak bisa membayar jika meminjam untuk melakukan usaha tanpa pengetahuan dan keterampilan.”*

Tabel 33. Persentase Anggota KPB yang Proposalnya Lolos Verifikasi dan Banyaknya Proposal yang Lolos Verifikasi

Kecamatan	% Anggota yang proposalnya lolos verifikasi				Banyaknya proposal lolos verifikasi			
	Usaha		Kerja	Total	Usaha		Kerja	Total
	Individu	Kelompok			Individu	Kelompok		
Kecamatan C	100	100	100	100	63	3	1	67
Kecamatan B	100	100	-	100	49	1	0	50
Kecamatan A	100	-	100	100	64	0	1	65
Kecamatan E	100	-	100	100	59	0	9	68
Kecamatan F	98,2	100	100	98,6	55	1	1	57
Kecamatan D	100	100	-	100	60	4	0	64
Jawa Tengah	99,7	100	100	99,8	350	9	12	371

Sumber: Data primer pemantauan

Dari sebesar 418 anggota KPB yang mengajukan proposal, 417 orang (99,7%) lolos verifikasi, yaitu dengan jumlah proposal lolos verifikasi sebanyak 371 proposal dari 375 proposal yang diajukan (Tabel 33). Dari jumlah proposal yang lolos tersebut, 350 proposal adalah proposal individu, 9 proposal kelompok, dan 12 proposal kerja. Hanya 1 orang/1 proposal (individu) yang tidak lolos verifikasi karena proposal yang diajukan bukan atas nama anggota KPB yang bersangkutan, namun atas nama orang lain (anakny) yang bukan anggota rumah tangganya.

Selanjutnya, dari 371 proposal usaha/kerja lolos verifikasi, terdapat proposal usaha yang sudah direalisasikan sebanyak 349 proposal (402 anggota) KPB yang terdiri dari 344 proposal individu dan 5 proposal kelompok. Di pihak lain, terdapat 15 proposal (17 orang) yang belum direalisasikan, yaitu 3 proposal individu, 5 proposal kelompok, dan 10 proposal kerja. Alasan utamanya adalah tidak ada relasi yang dapat memberikan informasi lowongan kerja, belum mahirnya keterampilan kerja yang dimiliki, pinjaman belum dicairkan (pengajuan bulan Juni 2015), dan modal usaha dipakai untuk kegiatan konsumtif. Sisanya, terdapat tujuh proposal yang tidak terealisasi sama sekali karena karena 2 kelompok usaha akhirnya melakukan usaha individu, tiga anggota (3 proposal individu) tidak menjalankan hasil pelatihan usaha/kerja, dua anggota (2 proposal individu) mengundurkan diri sebelum pencairan BLM.

Keterbatasan wawasan, baik anggota KPB maupun fasilitator dan pendamping, membuat 359 proposal usaha dan 12 proposal kerja cenderung merupakan jenis-jenis usaha atau kerja yang serupa. Mayoritas pilihannya adalah berjualan atau berdagang yang mencakup 13 jenis barang dagangan, terutama bermacam jenis makanan kecil. Mereka yang memilih usaha jualan kebanyakan sekaligus juga menjadi produsennya. Pilihan usaha lain yang cukup banyak adalah beternak, terutama kambing, ayam, atau bebek. Pada proposal kerja, pilihan yang muncul hanya dua jenis yaitu sopir dan penjahit yang diajukan di lima KPB. Hambatan untuk memilih proposal kerja antara lain adalah kekhawatiran keharusan bekerja di luar daerah karena lapangan kerja yang

dipilih tidak tersedia di sekitar desanya dan tidak adanya informasi lowongan kerja yang diperoleh anggota baik dari KPMD, FK, maupun pihak luar program.

Sangat kuat kesan bahwa tingkat keberhasilan dari aktivitas ini tergantung pada kemauan dan kemampuan FK dan KPMD dalam melaksanakan kewajibannya membimbing KPB. Di samping beberapa cerita yang bernada pesimis terhadap aktivitas penyusunan proposal usaha dan kerja, ada FK dan KPMD yang bahkan berhasil mendorong KPB menjalankan usaha secara mandiri, yaitu penjualan bensin eceran, gas elpiji, usaha pinjaman (Kotak 7).

Kotak 7 **Usaha Bersama KPB Bina Karya**

KPB Bina Karya berada di Desa B1 Kecamatan B Kabupaten Brebes. Sebagian besar anggota KPB ini adalah laki-laki (10 laki-laki dan 3 perempuan). Meski demikian, KPB ini termasuk dalam KPB yang aktif dalam melaksanakan kegiatan kelompok (melaksanakan pertemuan rutin, menabung, dll). Tidak hanya itu, mereka juga berhasil mendirikan usaha kelompok pada September 2014 berupa usaha menjual kopi (saat pertemuan rutin) dan menjual bensin eceran. Modal usaha yang digunakan berasal dari dana tabungan anggota yang dikumpulkan setiap minggunya. Keberhasilan kelompok menjalankan usaha ini tidak terlepas dari bimbingan pendamping kelompoknya (KPMD) yang selalu memberikan pengarahan pentingnya berkelompok dan memotivasi para anggota untuk berupaya merubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik.

Pada setiap pertemuan rutin, selain melaksanakan kegiatan menabung, anggota KPB melakukan pengisian botol bensin dan membahas laporan perkembangan usaha. Pelayanan penjualan bensin pada saat itu masih dijalankan oleh ketua kelompok di rumahnya. Keuntungan usaha penjualan kopi disimpan sebagai kas kelompok, sedangkan keuntungan penjualan bensin dibagi dua antara ketua dan kas KPB. Keberhasilan usaha ini mendorong anggota KPB ini untuk mencari dan membahas kemungkinan usaha lain dalam setiap pertemuan rutin. Hasilnya, KPB ini berhasil menambah usaha berupa penjualan gas elpiji 3kg. Usaha ini dicetuskan selain untuk menambah kas kelompok juga untuk menolong masyarakat di luar kelompok memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, warga dusun ini harus membeli gas keluar dusun (sekitar 1 Km dari dusun) dengan tambahan sebesar Rp1.500 untuk pesan antar. Setelah KPB Bina Karya membuka usaha penyediaan gas, sekarang warga lebih dekat dan mudah mendapatkan gas elpiji. Hingga laporan ini dibuat, KPB Bina Karya sudah memiliki tabung gas elpiji sendiri sebanyak 10 tabung.

Tidak selesai sampai di situ, setelah dana BLM cair, KPB Bina Karya kembali mengembangkan usaha berupa usaha memberikan pinjaman pada masyarakat di luar anggota dengan bunga yang rendah. Para anggota KPB Bina Karya memanfaatkan dana cadangan modal dari dana BLM sebesar 10% untuk usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh KPB untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bank harian yang beredar di dusunnya dengan bunga tinggi. Ide perluasan usaha juga tetap bermunculan. Para anggota KPB berencana membuka warung untuk menampung barang jualannya dan memberdayakan para istri untuk mengelola warung bersama.

4.2 Verifikasi Proposal (Pemilihan dan Penetapan Proposal)

Proses pembentukan tim verifikasi dan cara memverifikasi proposal usaha/kerja bervariasi antar kecamatan. Pelaksana program kelihatannya tidak taat pada tata cara memverifikasi proposal usaha dan kerja sebagaimana diatur dalam PTO Program PKKPM. Terdapat tiga proses yang berbeda dalam pembentukan tim verifikasi, yaitu (i) melalui MAD, (ii) melalui rapat koordinasi para fasilitator dan pendamping, dan (iii) menunjuk tim verifikasi PNPM reguler. Meskipun proses pemilihan dan penetapan tim berbeda, tetapi mereka yang terpilih relatif sama, yaitu orang-orang yang selama ini menjadi tim verifikasi PNPM reguler. Hal ini disebabkan di setiap kecamatan anggota tim verifikasi diusulkan oleh fasilitator kecamatan dan salah satu kriteria yang mereka putuskan adalah pernah menjadi anggota tim verifikasi PNPM. Menurut salah seorang fasilitator kecamatan sekarang ini sulit mencari orang yang mau diajak berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini. Jadi yang paling mudah adalah dengan meminta bantuan tim verifikasi yang sudah ada. Padahal PTO Program PKKPM menyatakan bahwa tim verifikasi proposal usaha dan kerja bersifat *ad hoc*.

Ada juga KPMD yang menyampaikan saran tentang beberapa kriteria lain, seperti tokoh yang memiliki pamor di desa, wiraswasta yang sukses di desa, dan tokoh wanita. Sejauh ini hanya satu tim verifikasi yang mempunyai anggota wanita, itu pun hanya satu orang dari tujuh anggota tim. Kecamatan lain membuat persyaratan bahwa tim verifikasi yang akan mereka bentuk harus ada anggota perempuan. Dalam proses pembentukan tim di salah satu kecamatan terjadi konflik antara KPMD dengan FK karena nama yang diusulkannya tidak masuk dalam tim verifikasi. Dia bahkan meminta agar tim dibubarkan, namun protesnya kemudian dapat diredam.

Salah satu tim verifikasi melakukan tugasnya dengan mewawancarai anggota KPB pengusul proposal usaha dan kerja. Tim memilih 15 jenis proposal sebagai sampel untuk diverifikasi. Penilaian proposal diberikan berdasarkan lima pertimbangan. (i) potensial dalam pengembangan ekonomi perdesaan, (ii) mampu dikelola masyarakat miskin, (iii) memiliki prospek pemasaran yang keberlanjutan, (iv) resiko usaha, dan (v) potensial dalam meningkatkan penghasilan.¹⁷

Cara verifikasi lainnya adalah dengan mengelompokkan proposal usaha dan kerja yang sejenis. Setiap rencana usaha dan kerja jenis tertentu diwawancarai oleh satu anggota tim verifikasi yang dinilai mempunyai keahlian atau pengetahuan di bidang jenis usaha dan kerja yang diajukan KPB.¹⁸ Kemudian tim verifikasi melakukan pembahasan bersama untuk menilai kelayakan setiap jenis proposal.

Dalam perkembangannya terdapat cukup banyak proposal yang sudah lolos verifikasi yang ketika akan direalisasikan terpaksa diubah. Perubahan dapat terjadi karena persyaratan infrastruktur usaha tidak terpenuhi. Misalnya, pengusul ternyata tidak mempunyai lahan untuk melaksanakan rencana usahanya. Dalam hal seperti ini, dia harus mengubah usahanya, bahkan dengan jenis usaha yang sama sekali berbeda. Selain itu, jumlah dana yang disediakan untuk KPB yang diketahui setelah verifikasi proposal dapat juga mengubah besaran realisasi usaha dibanding RAB dalam proposal yang diajukan. Perubahan realisasi usaha seperti ini dapat menjadi peluang anggota menggunakan dana pinjaman tidak hanya untuk kegiatan usaha, melainkan kegiatan konsumtif dan lainnya.

4.3 Pelatihan Usaha dan Kerja

Salah satu komponen program Pilot Program PKKPM yang menonjol adalah adanya pelatihan ketrampilan baik ketrampilan usaha maupun ketrampilan kerja kepada peserta program. Melalui kegiatan ini peserta program diharapkan mempunyai ketrampilan yang memadai sebagai bekal menyelenggarakan kegiatan penghidupan dalam menopang kegiatan ekonomi rumah tangga. Mengingat peserta program mempunyai aspirasi yang beragam, maka jenis kegiatan pelatihan bersifat open menu, yakni sesuai dengan keinginan para peserta program. Prinsip ini dilandasi oleh asumsi bahwa jenis pelatihan ketrampilan yang sesuai keinginan peserta akan memberikan dampak lebih besar dalam meningkatkan kegairahan kerja dan kemungkinan keberhasilan usahanya.

¹⁷Menurut PTO P2B, mekanisme penilaian proposal disusun agar bisa merengking seluruh proposal dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan mempertimbangkan (i) kesesuaian dengan peta potensi ekonomi daerah, (ii) kesesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas masyarakat miskin, (iii) jumlah orang miskin yang terlibat, (iv) aksesibilitas pasar yang jelas, (v) skala ekonomi usaha, dan (vi) berkelanjutan.

¹⁸PTO P2B mengatur bahwa setiap proposal dinilai oleh tiga verifikator.

4.3.1 Jenis dan Waktu Pelatihan

Berdasarkan prinsip open menu, jenis pelatihan usaha di masing-masing KPB beragam. Baik keragaman menyangkut jenis pelatihannya maupun jumlahnya. Tabel 34 menunjukkan bahwa ragam jenis pelatihan antar desa mempunyai variasi yang besar, yakni dari 1 jenis pelatihan (Desa F4, Kecamatan F) hingga 27 jenis pelatihan (Desa C1, Kecamatan C). Prinsip open menu ini juga membawa konsekuensi antara lain kemungkinan satu jenis pelatihan hanya diikuti oleh 1 orang saja¹⁹.

Untuk berbagai jenis pelatihan, durasi waktu pelaksanaannya juga berbeda-beda. Ada jenis pelatihan usaha hanya membutuhkan waktu satu hari kerja, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu cukup lama, sampai 30 hari kerja. Pelatihan yang memerlukan waktu pendek umumnya bersifat pengetahuan dan keterampilan praktis, seperti pembuatan kue kering dan pembuatan dawet. Sementara itu, pelatihan yang memerlukan waktu lama umumnya adalah pelatihan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan “tinggi”, seperti menjahit, elektronik dan perbengkelan. Instruktur atau pelatih umumnya berasal dari instansi pemerintah terkait atau BLK dan dari kalangan pengusaha lokal yang dianggap telah mahir dalam bidang bersangkutan.

Tabel 34 juga menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pelatihan antardesa/KPB tidak berlangsung serentak. Di Desa F4, Kecamatan F kegiatannya telah selesai pada 26 November 2014. Sebaliknya, di Desa B1, Kecamatan B, pelatihan selesai pada 31 Maret 2015. Perbedaan waktu pelaksanaan pelatihan ini merupakan imbas dari perbedaan tahapan-tahapan pelaksanaan program sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Faktor penyebab lainnya adalah adanya perbedaan sikap para pelaksana program di lapangan ketika peran FK telah berakhir pada Desember 2014. Di Kecamatan A, misalnya, keterlambatan pelaksanaan pelatihan terjadi karena ketidakjelasan koordinasi antara FK dengan pelaksana program di tingkat desa. Ketika memasuki Januari 2015 persoalan lain yang muncul dalam merencanakan kegiatan pelatihan adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara pihak UPK dan BKAD dengan Tim Desa (TPK, KPMD/Kader dusun). Di satu pihak Tim Desa menganggap pengelolaan kegiatan pelatihan menjadi tanggungjawabnya dan posisi UPK dan BKAD hanya bersifat koordinatif. Di lain pihak UPK dan BKAD juga ingin mengelola secara langsung kegiatan pelatihan. Akibatnya, Musdes Penetapan Dana Pelatihan dan Pembukaan Pelatihan baru terlaksana pada 16 Januari 2015. Untuk kasus Kecamatan C dan Kecamatan B, pelaksanaan pelatihan yang terlambat (masing-masing baru mulai terlaksana pada awal dan pertengahan Februari 2015) terjadi karena FK di masing-masing kecamatan ini lebih mendahulukan menyelesaikan aspek pembukuan program PNPM Perdesaan pada Desember 2014 ketimbang menyelesaikan RAB pelatihan Program PKKPM. Setelah memasuki Januari 2015 tanpa adanya FK, TPK pun tidak berani bergerak untuk melakukan pelatihan karena tidak adanya penanggung jawab tingkat kecamatan. Pelatihan terlaksana setelah TPK melakukan koordinasi dengan UPK.

Terkait dengan pelaksanaan jadwal pelatihan, sebagian besar anggota KPB mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam menentukan waktu pelatihan. Akibatnya, sebagian jadwal pelatihan tersebut berbarengan dengan waktu ketika mereka sedang sibuk bekerja.

¹⁹Sebagai contoh, di Desa F5, Kecamatan F: pelatihan pengolahan tahu dan pelatihan pengolahan kopi; Desa B1, Kecamatan B: ternak kroto, bertani tomat, ternak itik; Desa C1, Kecamatan C: pijat refleksi dan salon kecantikan.

Tabel 34. Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Anggota KPB

Desa	Jumlah Jenis Pelatihan	Total Peserta	Waktu pelaksanaan	Durasi per jenis pelatihan (hari)
Desa D1	6	469	10 Desember - 2 Januari	2 –15
Desa A1	6	316	19 Januari - 4 Februari	1 – 15
Desa B1	16	265	19 Februari - 31 Maret	1-40
Desa C1	27	417	11 februari- 10 Maret	1 – 15
Desa E1	15	389	18 Nov - 18 Januari	3 – 20
Desa F4	1	19	13-26 Novmber	5
Desa F2	7	50	10 Nov - 30 Desember	2 – 30
Desa F3	1	24	12 - 26 November	5
Desa F1	5	47	11 Nov - Januari	2 – 30
Desa F5	8	35	10 Nov -30 Desember	3 – 30

Sumber: Data primer pemantauan

Secara umum jenis pelatihan usaha yang diminati peserta Program PKKPM adalah pengetahuan/ketrampilan yang selama ini sudah mereka kenal, baik yang sudah mereka laksanakan sendiri maupun yang ada di lingkungannya. Seperti peternakan (penggemukan sapi, kambing, ternak ayam, dsb), pembuaan kue kering, dan sebagainya. Hanya sedikit pelatihan usaha yang merupakan pengetahuan atau ketrampilan baru bagi mereka, seperti *service handphone*, pembuatan ayam “kentucky”, salon kecantikan dan pembuatan sandal. Mereka memilih jenis pelatihan usaha yang sudah mereka kenal dengan alasan mereka sudah mempunyai (sedikit) pengalaman dan atau sudah mengetahui hasil dari bidang usaha tersebut, baik karena pengalaman sendiri maupun karena mereka lihat di lingkungannya. Alasan ini mengindikasikan bahwa peserta Program PKKPM umumnya tidak mempunyai keberanian untuk mencoba usaha baru. Hal ini sebenarnya sangat logis sebagai bagian dari upaya menghindari resiko gagal.

4.3.2 Metode Pelatihan Usaha dan Kerja

Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha dan kerja umumnya terbagi menjadi atau kombinasi dari tiga metode, yakni (i) pelatihan teoritis dalam kelas, (ii) praktek, dan (iii) untuk sebagian jenis pelatihan juga dilengkapi dengan studi banding atau kunjungan lapangan. Secara umum pelaksanaan pelatihan berlangsung lancar. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang membuat proses pelatihan tidak berlangsung optimal. Misalnya di Desa A1, sebagian pelatihan teori menggunakan rumah warga yang kondisinya kurang kondusif (panas dan sumpeg). Selain itu, di tempat pelatihan lainnya sebagian peserta juga mengajak anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini, antara lain, membuat suasana pelatihan agak terganggu oleh lalu-lalang dan atau suara tangis anak.

Terlepas dari kondisi tersebut, anggota KPB dalam mengikuti pelatihan menunjukkan semangat besar, antara lain, ditunjukkan oleh kesertaan mereka dalam mengikuti pelatihan yang mencapai 99,8%. Kondisi demikian merupakan cerminan bahwa peserta Program PKKPM memang mempunyai niat besar untuk menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan yang diajarkan. Motivasi ini antara lain didorong oleh kenyataan bahwa selama ini sebagian besar dari mereka belum pernah mendapatkan pelatihan. Mereka berpendapat bahwa mendapatkan kesempatan pelatihan ketrampilan usaha atau kerja merupakan langkah awal agar dapat memperbaiki kehidupannya.

4.3.3 Kualitas Pelatih

Pelatih yang memberikan bimbingan usaha/kerja berasal dari instansi pemerintah atau pengusaha lokal. Menurut penilaian peserta, sebagian besar pelatih mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga mampu memberikan bahan ajar yang memadai kepada mereka. Peserta merasa puas dengan kinerja pelatih baik menyangkut aspek kejelasan penyampaian, kesempatan bertanya, kepuasan atas jawaban dan tanggapan yang diberikan, cara penyampaian pelatih, pemahaman terhadap pelajaran yang diberikan, serta kesesuaian antara pelajaran dengan kebutuhan. Setelah mengikuti pelatihan, peserta merasa pengetahuan dan keterampilannya bertambah. Dalam konteks ini, peserta umumnya juga lebih menyukai metode pelatihan yang bersifat praktek karena bisa langsung melihat hasilnya. Untuk pelatihan pembuatan sandal, misalnya, empat orang pelatih terlibat langsung dalam setiap tahapan pembuatan sandal. Melalui pendekatan ini, peserta merasa benar-benar sedang “praktik,” bukan “teori.” Begitu pula dengan pelatihan pembuatan dawet, pelatih dan peserta seolah-olah sama-sama sedang berjualan dawet, bukan tengah dalam proses belajar dan mengajar.

Sebagian kecil pelatih mempunyai kinerja kurang baik karena pengetahuannya tidak lebih banyak dari peserta. Di Desa C1, misalnya, tidak semua materi pelatihan memuaskan peserta. Untuk materi pelatihan pembuatan kripik, sebagai contoh, peserta menyatakan “*kalau keripik seperti ini, di rumah saya juga sering membuatnya*”. Demikian juga halnya dengan pelatihan beternak itik yang mendapatkan komentar dari anggota TPK “*pesertane luweh ngerti ketimbang pelatih, yo keder*” (artinya “*pesertanya lebih paham daripada pelatihnya, jadinya bingung*”). Pelatih ini, seorang perangkat desa, dipilih karena dulu pernah beternak itik. Pelatihan beternak itik berlangsung paling singkat dibandingkan pelatihan lain, hanya 30 menit, dan mekanisme pelatihannya hanya “*ngobrol-ngobrol*” saja dan foto-memfoto. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa di sebagian kasus pemilihan pelatih tidak dilakukan secara serius.

4.3.4 Keikutsertaan Anggota KPB Dalam Pelatihan Usaha/Keterampilan

Dalam program PKKPM kegiatan pelatihan usaha/keterampilan merupakan proses penting yang harus dilalui oleh penerima program guna meningkatkan kapasitas anggota dan menjadi bekal dalam melakukan usaha/kerja yang telah diajukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya di lapangan, hampir seluruh anggota KPB mengikuti pelatihan usaha/keterampilan (99,8%), kecuali 1 orang di Kecamatan D. Hal ini karena anggota tersebut mengundurkan diri akibat nominal pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Anggota KPB yang mengajukan proposal usaha tentunya memerlukan jenis pelatihan usaha yang sesuai dengan proposalnya. Dalam kasus ini, ternyata tidak semua anggota KPB memperoleh jenis pelatihan usaha yang sesuai dengan proposalnya. Tabel 35 menunjukkan bahwa terdapat 18,5% pelatihan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, terdiri dari 21,7% pada usaha individu dan 8,3% pada pengajuan untuk kesempatan kerja.

Tingkat ketidaksesuaian antara proposal dengan pelatihan terbesar terjadi di Desa A1 (Kecamatan A) yang mencapai 85,9%. Hal ini terjadi karena pihak UPK membatasi jumlah pelatihan hanya sebanyak 6 jenis. Sebagai contoh, anggota KPB membuat proposal usaha kue kering dengan pertimbangan kue kering lebih tahan lama ketimbang kue basah. Jika tidak laku hari ini, besok masih bisa dijual. Namun ketua UPK setempat hanya menyediakan paket pelatihan pembuatan kue basah (donat dan brownies). Alasannya, pelatih yang diminta memberikan bimbingan adalah seorang pengusaha donat dan brownies yang telah sukses memasarkan produknya hingga ke luar Jawa. Meskipun alasan ini tidak terkait langsung dengan proposal usaha anggota Program PKKPM, namun UPK menganggap pelatihan tersebut sudah mencukupi karena prinsipnya adalah pelatihan

pembuatan kue, tidak peduli apakah kue basah atau kering. Contoh lainnya, anggota KPB yang mengajukan proposal untuk berjualan pulsa mendapat pelatihan tentang servis telepon genggam.

Tabel 35. Persentase Keikutsertaan Anggota KPB Sampel dalam Pelatihan dan Kesesuaian Proposal Usaha/Kerja yang Diajukan dengan Pelatihan Usaha/Kerja yang diikuti

Kecamatan	% Anggota mengikuti pelatihan	Proporsi kesesuaian pelatihan dengan proposal (%)						Total (%)		
		Usaha/Wirausaha (%)						Kerja (%)	Sesuai	Tidak
		Individu			Kelompok					
		Sesuai	Tidak	Belum mulai	Sesuai	Tidak	Belum mulai			
Kecamatan C	100	98.4	1.6	100	0	100	0	98.6	1.4	
Kecamatan B	100	81.6	18.4	100	0	-	-	82.7	17.3	
Kecamatan A	100	14.1	85.9	-	-	0	100	13.8	86.2	
Kecamatan E	100	100	0	-	-	100	0	100	0	
Kecamatan F	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
Kecamatan D	98.9	80.0	18.3	100	0			86.7	12.2	
Jawa Tengah	99.8	78.0	21.7	100	0	91.7	8,3	81.3	18.5	

Sumber: data primer pemantauan

Selain masalah ketidaksesuaian antara proposal usaha/kerja dan jenis pelatihan, Tabel 36 menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelatihan yang diikuti dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota KPB (29,3%). Ketidaksesuaian tersebut sebesar 33,5% pada usaha individu, 8,7% usaha kelompok, dan 20% kerja. Lokasi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keadaan ini adalah usaha individu di Desa A1 (85,9%).

Tabel 36. Persentase Kesesuaian antara Jenis Pelatihan Usaha dengan Realisasi Usaha

Kecamatan	Proporsi Kesesuaian realisasi usaha dengan pelatihan (%)									Total (%)			
	Usaha/Wirausaha (%)									Kerja (%)	Sesuai	Tidak	Belum mulai
	Individu			Kelompok									
	Sesuai	Tidak sesuai	Belum mulai	Sesuai	Tidak	Belum mulai	Sesuai	Tidak	Belum mulai				
Kecamatan C	90.5	7.9	1.6	0	0	100	-	-	-	78.1	8.2	6.8	
Kecamatan B	75.0	25.0	0	-	-	-	-	-	-	69.2	28.8	0	
Kecamatan A	14.1	85.9	0	-	-	-	-	-	-	13.8	86.2	0	
Kecamatan E	61.4	42.1	0	-	-	-	0	0	100	51.5	35.3	13.2	
Kecamatan F	76.4	16.4	3.6	100	0	0	0	0	100	79.7	13.0	4.3	
Kecamatan D	81.4	18.6	0	100	3.4	0	-	-	-	85.6	13.3	0	
Jawa Tengah	65.6	33.5	0.9	91.3	8.7	8.7	0	20	100	64.5	29.3	4,1	

Sumber: data primer pemantauan

Namun, jika dilihat keterkaitan antara proposal usaha dengan jenis usaha yang dijalankan oleh anggota KPB, tingkat ketidaksesuaiannya lebih rendah dibandingkan dua jenis ketidaksesuaian di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota KPB tetap konsisten menjalankan usaha sesuai dengan jenis usaha yang mereka ajukan (proposal usaha). Tabel 37 menunjukkan tingkat ketidaksesuaiannya sebesar 14,4% dengan rincian 14,9% untuk usaha individu, 10,9% untuk usaha kelompok, dan 16,7% untuk kesempatan kerja. Tingkat ketidaksesuaian antara proposal dengan realisasi usaha/kerja terendah terjadi di Kecamatan A, yaitu 0% (tingkat kesesuaian tertinggi). Para anggota KPB di Kecamatan ini tetap merealisasikan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan meski pelatihan yang diikuti tidak sesuai dengan pengajuannya tersebut. Berbagai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bagi sebagian anggota KPB, pelatihan yang telah mereka dapatkan belum sepenuhnya mendukung usaha yang mereka jalankan

Tabel 37. Persentase Kesesuaian antara Proposal dengan Realisasi Usaha

Kecamatan	Proporsi Kesesuaian Proposal dengan realisasi usaha (%)									Total (%)		
	Usaha/Wirausaha (%)						Kerja (%)			Sesuai	Tidak Sesuai	Belum mulai
	Individu			Kelompok			Sesuai	Tidak sesuai	Belum mulai			
	Sesuai	Tidak sesuai	Belum mulai	Sesuai	Tidak sesuai	Belum mulai				Sesuai	Tidak sesuai	Belum mulai
Kecamatan C	88.9	9.5	1.6	33.3	22.2	44.4	0	100	0	80.8	12.3	6.8
Kecamatan B	85.7	12.2	0	0	100	0				80.8	17.3	0
Kecamatan A	100	0	0				0	100	0	98.5	1.5	0
Kecamatan E	59.3	40.7	0				0	0	100	51.5	35.3	13.2
Kecamatan F	70.9	27.3	3.6	100	0	0	0	0	100	75.4	21.7	4.3
Kecamatan D	96.7	1.7	0	96.7	3.3	0				96.7	2.2	0
Jawa Tengah	84.0	14.9	0	81.8	10.9	7.3	0	16.7	83.3	81.3	14.4	4.1

Sumber: Data primer pemantauan

Berbagai ketidaksesuaian di atas tentu saja merupakan hal yang perlu diperbaiki untuk kelancaran program ke depan. Hal ini mengingat bahwa jika dilihat berdasarkan kesesuaian antara proposal usaha yang diajukan, pelatihan yang diikuti, dan realisasi usaha yang dijalankan oleh para anggota KPB, nilainya rata-rata mencapai 63,35%. Kesesuaian tertinggi terjadi pada usaha kelompok sebesar 81,8% dibandingkan dengan usaha individu yang sebesar 62,9% dan kesempatan kerja sebesar 0% (semua anggota belum mendapat pekerjaan hingga 3-7 bulan pasca pencairan dana BLM). Jika dilihat per lokasi sampel, tingkat kesesuaian tertinggi diantara ketiga komponen tersebut adalah di Kecamatan D (84,4%), diikuti oleh Kecamatan C (80,8%), dan Kecamatan F (75,4%). Hal ini menunjukkan para pengelola program di ketiga lokasi tersebut cukup memperhatikan kebutuhan para anggota KPB di wilayahnya dengan mengakomodir keinginan para anggota KPB dibandingkan dengan lokasi sampel lainnya (Tabel 38).

Tabel 38. Persentase Kesesuaian antara Proposal Usaha, Training Vokasional yang Diikuti, dan Realisasi Usaha yang dijalankan Oleh Anggota KPB

Kecamatan	Proporsi kesesuaian pelatihan dengan proposal (%)						Jumlah	
	Usaha/Wirausaha (%)				Kerja (%)		Sesuai	Tidak sesuai
	Individu		Kelompok		Sesuai	Tidak sesuai		
	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak sesuai				
Kecamatan C	88,9	11,1	33,3	66,7	0,0	100	80,8	19,2
Kecamatan B	67,3	30,6	0	100	-	-	63,5	34,6
Kecamatan A	15,6	84,4	-	-	0,0	100	15,4	84,6
Kecamatan E	59,3	40,7	-	-	0,0	100	51,5	48,5
Kecamatan F	70,9	27,3	100	0,0	0,0	100	75,4	23,2
Kecamatan D	78,3	20,0	96,7	3,3	-	-	84,4	14,4
Jawa Tengah	62,9	36,3	81,8	18,2	0,0	100	63,5	35,7

Sumber: Data primer pemantauan

4.4 Penyaluran dan Pencairan Dana

Sumber pendanaan Pilot Program PKKPM berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2014. Secara umum mekanisme penyaluran dan pencairan dana kegiatan ini mengadopsi mekanisme yang berlaku dalam PNPM-Perdesaan. Pencairan dana program dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) ke rekening UPK dilakukan secara bertahap. Pencairan tahap I 40%, tahap II 30% dan tahap III 30%. Pilot Program PKKPM mendapatkan alokasi dana per kecamatan sebesar Rp1,7 milyar. Dari jumlah ini, komponen bantuan modal bergulir bagi peserta program (BLM) sekitar Rp 1 milyar per kecamatan. Dana sisanya diperuntukkan bagi kegiatan operasional program, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelatihan peserta.

Dalam prakteknya, tidak semua kecamatan dapat merealisasikan penyerapan dana 100%. Kecamatan A dan Kecamatan F misalnya, anggaran tidak terserap sepenuhnya karena jumlah RTM penerima BLM lebih kecil daripada target. Di Kecamatan B dan Kecamatan C juga terdapat sisa dana program yang bersumber dari alokasi dana untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan. Dana ini kemudian digunakan untuk kegiatan persiapan pelaksanaan PKKPM tahun 2015.

Lebih lanjut PTO Pilot Program PKKPM menggariskan bahwa setiap peserta program dapat mengakses BLM sebesar maksimal Rp5 juta. Berdasarkan hal ini, secara teoritis potensi kebutuhan BLM untuk semua anggota KPB mencapai Rp2,5 milyar per kecamatan (target peserta program 500 orang per kecamatan). Namun, disain Pilot Program PKKPM memang tidak ditujukan untuk memberikan alokasi BLM secara penuh kepada peserta program. Alasannya, pertama tidak semua usaha memerlukan dana sebesar Rp5 juta/peserta, dan kedua BLM merupakan komponen program yang bersifat optional dan kompetitif. Alasan yang kedua ini merupakan ajang pembelajaran bagi peserta program karena untuk memperolehnya mereka harus memenuhi beberapa kriteria tertentu.

4.4.1 Program PKKPM dan Pinjaman Modal Usaha

Meskipun BLM dalam program Program PKKPM bersifat optional, namun karena kondisi aset keuangan masyarakat miskin sangat rendah, maka keberadaan BLM merupakan salah satu daya tarik mereka untuk mau menjadi peserta program. Secara umum dapat dikatakan ada dua motivasi utama mereka menjadi peserta Program PKKPM, yakni (i) adanya pinjaman dana BLM untuk usaha atau kerja dan (ii) adanya pelatihan usaha atau kerja. Data sebelumnya menyatakan bahwa dari 491 anggota KPB yang menjadi sampel pemantauan ini, hanya ada 8 orang yang tidak mengajukan proposal pinjaman BLM dan hampir seluruh sampel tersebut semuanya mengikuti pelatihan usaha atau kerja.

4.4.2 Distribusi BLM Antar Kelompok

Sejalan dengan ketersediaan BLM, Pilot Program PKKPM menggariskan bahwa kuota BLM yang akan diterima oleh kelompok tergantung dari kinerja kelompok bersangkutan. Penilaian kinerja kelompok meliputi aktifitas pertemuan kelompok dengan bobot 5 poin (menyangkut persentase penyelenggaraan pertemuan dan tingkat kehadiran anggota), kinerja tabungan kelompok dengan bobot 3 poin (persentase realisasi tabungan pokok dan tabungan sukarela) dan simpan pinjam internal dengan bobot 2 poin (frekuensi peminjaman dan tingkat pengembalian). Berdasarkan kriteria dan pembobotan ini, kinerja kelompok dibagi menjadi menjadi 4 kategori. Yakni kategori I (terendah) dengan skore 0-25%, II (skor 26-50%), III (skor 51-75%), dan IV (tertinggi) dengan skor 76-100%. Kinerja kelompok tertinggi akan mendapatkan kuota dana BLM tertinggi dan sebaliknya.

Berdasarkan skor tersebut, dan kuota BLM yang tersedia, Tabel 39 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi pinjaman BLM sebesar 86% dari proposal pinjaman. Angka realiasi terendah terjadi di Desa D1, Kecamatan A (60,9%) dan tertinggi di Kecamatan F (100%). Khusus untuk Desa C1, Kecamatan C, TPK dan KPMD setempat mempunyai kebijakan tersendiri, yakni dengan menambahkan BLM sebesar 10% dari yang sudah diterimakan kepada peserta program sebagai cadangan. Tujuannya adalah agar kuota BLM dapat terserap semua, juga sebagai cadangan jika peserta program memerlukan tambahan modal usaha. Dengan adanya dana cadangan ini, yang setiap saat dapat diambil oleh peserta, maka realisasi pinjaman di Desa C1 menjadi 100%. Kebijakan ini mereka lakukan karena TPK/KPMD menilai proposal pinjaman yang diajukan oleh anggota KPB dianggap lebih rendah dari kebutuhan. Dengan demikian umumnya anggota KPB di Desa C1 mendapatkan jumlah pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diajukan dalam proposal usaha atau kerja.

Tabel 39. Rata-rata Proposal dan Realisasi Pinjaman BLM Anggota KPB

Kecamatan	Usaha Individu			Pencairan Pinjaman
	Proposal (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Kecamatan C	3.074.667	2.812.262	91,5%	18-19 Maret 2015
Kecamatan B	3.489.796	3.442.308	99%	15-21 April 2015
Kecamatan A	5.415.385	3.723.077	68,8%	18 – 19 Februari 2015
Kecamatan E	3.074.468	2.946.809	95,8%	10 Desember 2014 -20 Maret 2015
Kecamatan F	4.942.308	4.941.176	100,0%	5 Desember 2014 - 26 Februari 2015
Kecamatan D	4.644.068	2.830.508	60,9%	13 November - 10 Desember 2014
Jawa tengah	4.106.782	3.449.357	83,99	

Sumber: data primer pemantauan

Di luar pembagian kuota BLM berdasarkan skor kinerja kelompok, di Desa A1, Kecamatan A, mekanisme alokasinya kepada KPB ditentukan oleh FK/TPK/KPMD tanpa melihat kinerja masing-masing kelompok. Mereka cenderung membagi habis dana BLM secara proporsional terhadap besarnya proposal pinjaman masing-masing anggota KPB.

Tabel 39 juga menunjukkan bahwa waktu pencairan pinjaman BLM kepada masing-masing kelompok atau wilayah mempunyai jeda yang cukup lama. Di Kecamatan D, seluruh dana pinjaman telah selesai dicairkan pada 10 Desember 2015. Sebaliknya, di Kecamatan B, pencairan dana BLM baru dilaksanakan pada 15 April 2015. Kondisi demikian tentunya mempunyai pengaruh yang besar antar anggota KPB dalam memulai kegiatan usaha atau kerja.

4.4.3 Penggunaan Dana BLM

Tujuan Program PKKPM yang menyediakan pinjaman dana BLM adalah agar masyarakat miskin yang kekurangan atau tidak memiliki modal usaha dapat melakukan kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumahtangga. Tujuan ideal ini tidak sepenuhnya terlaksana 100%. Sebagian anggota KPB, seperti terjadi di Desa E1(Kecamatan E), Desa D1 (Kecamatan D) dan Desa B1 (Kecamatan B) mereka tidak sepenuhnya memanfaatkan pinjaman BLM tersebut sebagai modal usaha. Sebagian anggota KPB di beberapa wilayah ini menggunakan sebagian dana BLM untuk membeli perabotan rumahtangga (televisi, kursi dan, perabotan rumahtangga lainnya), memperbaiki rumah dan untuk membayar hutang.. Sebagian anggota KPB lainnya juga ada yang tidak memanfaatkan sama sekali dana pinjaman BLM karena yang menggunakan dana tersebut adalah orang lain. Artinya, anggota KPB bersangkutan hanya atas nama saja dalam melakukan pinjaman dana BLM.

V. PELAKSANAAN USAHA DAN PENYALURAN KERJA

Keseluruhan tahapan pilot PKKPM pada akhirnya berujung pada pelaksanaan usaha dan atau penyaluran kerja dengan tujuan agar masyarakat miskin mampu meningkatkan kegiatan ekonominya sehingga meningkatkan pendapatan rumahtangganya. Dalam disain PKKPM, peningkatan pendapatan ini bisa ditempuh dengan dua cara. Pertama, melalui kegiatan usaha secara individu atau kelompok. Kegiatan usaha ini dapat berupa kegiatan usaha yang sudah menjadi matapencaharian peserta sebelumnya atau berupa kegiatan usaha yang sama sekali baru. Kedua, peserta PKKPM diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya dengan cara memperoleh pekerjaan sebagai buruh/karyawan berdasarkan bidang keahlian yang telah dilatihkan kepada mereka. Bab V ini akan memaparkan pelaksanaan usaha dan penyaluran kerja peserta PKKPM berdasarkan studi kasus sampai dengan kondisi 15 Juli 2015²⁰.

5.1 Perkembangan Jenis Mata Pencaharian

Dalam bentuknya yang nyata, penanggulangan kemiskinan melalui PKKPM berupa penciptaan sumber matapencaharian baru dan atau peningkatan kapasitas matapencaharian yang lama. Kondisi demikian seharusnya segera dapat terlihat ketika BLM sudah cair dan mereka telah mulai melakukan kegiatan usaha. Namun, berdasarkan instrumen pemantauan yang digunakan, data tentang perkembangan sumber matapencaharian tersebut tidak segera dapat teridentifikasi. Hal ini antara lain dikarenakan dalam modul instrumen pemantauan yang ditanyakan adalah sumber pendapatan tunai. Di lain pihak, banyak anggota KPB yang usahanya baru memberikan hasil dalam jangka panjang, seperti peternakan dan pertanian. Selain itu, sebagian anggota KPB juga tidak segera melaksanakan kegiatan usaha ketika BLM cair, sehingga ketika pemantauan dilakukan mereka belum mempunyai sumber matapencaharian baru.

Terlepas dari persoalan teknis tersebut, studi terhadap 30 rumah tangga anggota KPB menunjukkan bahwa jumlah sumber pendapatan tunai yang mereka miliki sebelum menjadi anggota KPB mencapai 94 jenis (Tabel 40). Ini berarti rata-rata anggota KPB mempunyai sumber pendapatan lebih dari 3 jenis. Selain bantuan pemerintah, sebagian besar sumber pendapatan responden berasal dari hasil panen/hutan, pekerja tidak tetap, hasil ternak dan usaha non-pertanian (sekitar 60%). Setelah menjadi anggota KPB dan BLM sebagai modal usaha telah cair, jumlah jenis sumber pendapatan responden tidak mengalami perubahan yang signifikan akibat faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya.

²⁰Lampiran 8 memaparkan narasi masing-masing studi kasus pelaksanaan usaha pada Pemantauan I dan 2.

Tabel 40. Sumber Pendapatan Tunai Rumahtangga Sampel Studi Kasus Rumahtangga

Jenis Sumber Pendapatan	Jumlah		Jumlah	
	Q1	Persentase	Q3	Persentase
Gaji pegawai/pekerja tetap	0	0,0%	2	2,2%
Gaji pegawai/pekerja tidak tetap	14	14,9%	17	18,7%
Hasil panen/hutan	23	24,5%	16	17,6%
Hasil ternak	10	10,6%	16	17,6%
Hasil Ikan	1	1,1%	2	2,2%
Usaha non pertanian	10	10,6%	7	7,7%
Uang Kiriman ART	11	11,7%	10	11,0%
Bansos/Program Pemerintah	24	25,5%	20	22,0%
Pendapatan lainnya	1	1,1%	3	3,3%
Total	94	100,0%	91	100,0%

Sumber: data primer pemantauan.

5.2 Pelaksanaan Usaha

Bagian sebelumnya menjelaskan bahwa pencairan dana pinjaman BLM kepada anggota KPB tidak berlangsung secara serentak. Di semua daerah sampel, pencairan BLM berlangsung mulai November 2014 hingga awal April 2015. Kondisi ini berakibat antara lain awal pelaksanaan usaha antaranggota KPB dan atau antarKPB juga bervariasi. Selain itu, uraian sebelumnya juga menunjukkan bahwa jenis usaha yang dipilih oleh peserta PKKPM cukup bervariasi, baik variasi secara sektoral maupun variasi yang menyangkut sifat usahanya. Secara garis besar sifat usaha peserta PKKPM dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, usaha yang dalam jangka pendek (dalam hitungan hari atau minggu) segera bisa menghasilkan pendapatan (seperti usaha pembuatan kripik, ayam goreng dan lain-lain). Kedua, usaha yang baru mendatangkan pendapatan dalam jangka panjang (dalam hitungan bulan atau musim dan bahkan tahun). Contohnya antara lain penggemukan sapi, peternakan kambing dan usahatani cocok tanam.

Selain pembedaan tersebut, usaha yang dikembangkan oleh peserta PKKPM juga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, merupakan usaha yang sebelumnya sudah menjadi matapencaharian peserta bersangkutan. Kedua, kegiatan usaha yang bersifat baru, yakni usaha yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kedudukan usaha ini dalam struktur pendapatan rumahtangga juga dapat digolongkan menjadi dua, yakni usaha pokok dan usaha sampingan.

5.3 Usaha Individu

Tabel 41 menunjukkan bahwa sebagian besar usaha individu yang telah mulai dilaksanakan oleh peserta PKKPM merupakan usaha baru. Dari 19 studi kasus yang dipilih secara acak (terstratifikasi), hanya 5 responden diantaranya yang telah berpengalaman melakukan jenis usaha yang sama. Dalam konteks ini, keikutsertaan mereka dalam program PKKPM adalah dalam rangka mengembangkan usaha yang telah dijalkannya.

Sementara itu, bagi peserta PKKPM yang memulai usaha baru, sebagian besar sifatnya masih coba-coba. Meskipun demikian sebagian besar diantaranya merasa yakin usaha yang dirintisnya merupakan usaha yang mempunyai prospek baik. Keyakinan ini selain tumbuh dari berbagai pelatihan dan potensi ekonomi yang ada di sekitarnya, juga bersumber dari kenyataan bahwa pada masa awal pelaksanaan usaha –satu dua bulan–telah mampu memberikan surplus pendapatan atau keuntungan. Bahkan sebagian di antaranya memperoleh keuntungan cukup besar.

Tabel 41. Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Individu

No	Responden	Desa	Jenis Usaha	Awal Usaha	Pinjaman BLM	BLM Terpakai	Omset/ Bulan	Untung/ Rugi /Bulan*)
1	Mawar	Desa C1	Keripik singkong	Apr-15	2.750.000	884.000	192.000	(55.000)
2	Melati	Desa C1	Toko kelontong	Apr-15	4.000.000	2.500.000	3.000.000	500.000
3	Kenanga	Desa C1	Pembuatan ayam goreng	Feb-15	4.000.000	4.000.000	4.950.000	1.042.500
4	Anyelir	Desa C1	Usaha kue brownies	Mar-15	4.000.000	3.175.000	2.100.000	570.000
5	Anggrek	Desa C1	Jual jajanan	2012	2.000.000	2.000.000	600.000	350.000
6	Hendro	Desa A1	Krupuk Tulang Ikan	2003	4.000.000	2.500.000	3.500.000	1.400.000
7	Toni	Desa A1	Pengasapan ikan	1996	4.000.000	1.750.000	1.500.000	n.a
8	Amarilis	Desa A1	Krupuk Goreng Pasir	Mar-15	2.000.000	1.250.000	3.000.000	1.750.000
9	Budi	Desa D1	Warung sembako	Agu-14	2.500.000	1.500.000	3.000.000	n.a
10	Afandi	Desa D1	Peternakan kambing	2005	3.000.000	3.000.000	n.a	n.a
11	Gusti	Desa D1	Peternakan ayam	Feb-15	2.500.000	1.200.000	1.875.000	n.a
12	Feri	Desa D1	Pembuatan sapu	Jan-15	3.000.000	1.500.000	1.200.000	600.000
13	Setiawan	Desa F4	Tanam kentang	2010	5.000.000	4.950.000	n.a	n.a
14	Asri	Desa F1	Penggemukan sapi	Des-14	5.000.000	5.000.000	n.a	n.a
15	Iqbal	Desa F5	Warung kopi	Jan-15	5.000.000	5.000.000	7.500.000	4.132.000
16	Cempaka	Desa E1	Peternakan kambing	Des-14	2.500.000	2.500.000	n.a	n.a
17	Adi	Desa E1	Perikanan nila dan bawal	Mar-15	3.000.000	3.000.000	n.a	n.a
18	Ayumi	Desa E1	Kripik pisang	Apr-15	1.500.000	835.000	660.000	(175.000)
19	Arif	Desa E1	Usaha jahit	Mar-15	5.000.000	2.913.000	750.000	337.000

Catatan: Keuntungan/kerugian hanya dihitung berdasarkan biaya produksi lancar, tidak termasuk biaya modal tetap dan biaya tenaga kerja.

Sumber: Data primer pemantauan

5.3.1 Penggunaan Modal BLM

Salah satu aspek menarik dari data yang tersaji dalam Tabel 41 menunjukkan bahwa tidak semua responden menggunakan semua BLM yang diperolehnya untuk memodali usahanya. Dari 19 kasus, hanya ada 7 responden yang telah membelanjakan semua BLMnya untuk membiayai usahanya sejak awal. Beberapa diantaranya juga terpaksa menambahnya dengan modal sendiri karena jumlah BLM yang diperolehnya masih kurang mencukupi kebutuhan. Sebaliknya, sebagian besar responden belum atau tidak menggunakan seluruh BLMnya untuk menjalankan usahanya dengan berbagai alasan:

- (i) Sebagian responden belum berani melakukan usaha dengan skala ekonomi penuh sesuai dengan perencanaannya dalam proposal usaha. Hal ini mereka lakukan karena usaha yang dijalankannya masih bersifat coba-coba. Oleh karena itu di awal kegiatan usahanya mereka umumnya baru bersifat menjajaki potensi pasar yang tersedia bagi produknya. BLM sisanya akan digunakan untuk menambah modal jika usahanya mengalami perkembangan.
- (ii) Sebagian responden secara sengaja mengajukan proposal pinjaman BLM yang lebih besar dari kebutuhannya. Responden sebenarnya telah memiliki modal tetap dan hanya memerlukan modal lancar. Namun, dalam proposalnya mereka tetap mencantumkan kebutuhan terhadap modal tetap.
- (iii) Secara sengaja responden mengajukan proposal pinjaman lebih besar dari kebutuhannya, baik untuk kebutuhan modal tetap maupun modal lancar.

Pada kedua kasus tersebut, BLM yang tersisa kemudian digunakan oleh responden untuk menambah modal usaha lain yang dimilikinya, umumnya untuk menambah modal di sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber matapencariannya. Namun, sebagian responden lainnya menggunakan sisa BLM bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk kebutuhan konsumtif, misalnya membeli TV baru, membayar hutang, dan lain-lain (Kotak 8).

Kotak 8 Penggunaan BLM untuk Kebutuhan Non-produktif

Dalam batas tertentu yang melatari penggunaan BLM untuk kegiatan non-produktif adalah karena peserta PKKPM mempunyai persepsi yang kurang “pas” terhadap program PKKPM. Mereka hanya melihat program ini dari sisi penyediaan pinjaman BLM sehingga mereka cenderung berupaya mendapatkan pinjaman melebihi kebutuhannya untuk menjalankan usaha. Sebagai contoh, seorang anggota KPB mengajukan pinjaman Rp 5 juta untuk membuka warung kopi dan pengajuannya disetujui. Namun dari Rp 5 juta BLM yang diterimanya, Rp 3,5 juta digunakan untuk membayar hutang. Dana BLM yang digunakan untuk membuka warung kopi hanya Rp 500 ribu dan Rp1 juta lainnya dipinjamkan ke orang lain dengan imbalan mendapatkan hak “memegang” kebun kopi si peminjam selama 1 tahun (mengijon).

Terjadinya kasus pinjaman BLM yang lebih besar dari kebutuhan juga disebabkan oleh adanya “kebijakan” sebagian pengelola program yang menaikkan jumlah pinjaman anggota. Tujuannya adalah agar kuota BLM yang ditetapkan untuk wilayahnya terserap 100%. Untuk mencapai tujuan ini, pengelola program kemudian membagi rata kuota BLM kepada anggota KPB tanpa lagi menghiraukan kebutuhan dana riil masing-masing anggota.. Praktek demikian terjadi di Kecamatan B dan Kecamatan A.

5.3.2 Kewirausahaan

Salah satu manfaat umum dan merata yang dialami peserta PKKPM ketika mulai menjalankan kegiatan usaha adalah mereka sekarang merasa “mempunyai pekerjaan”. Mereka tidak lagi merasa sebagai pengangguran. Ditambah dengan adanya kewajiban mengangsur pinjaman BLM, mereka

merasa mempunyai tanggungjawab lebih besar terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya untuk meningkatkan pendapatannya.

Sebagian responden yang pada awal pelaksanaan usaha sudah menghasilkan keuntungan, umumnya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa usahanya akan terus mengalami perkembangan positif. Sebaliknya, sebagian responden yang di awal usahanya mengalami kerugian atau belum menunjukkan hasil yang pasti, setidaknya mempunyai dua kategori sikap. Pertama, sebagian mereka menyadari bahwa usaha yang baru dijalankan merupakan ajang pembelajaran sehingga tidak semua aspek usaha berjalan sebagaimana mereka harapkan. Atas dasar ini mereka akan berupaya untuk menjalankannya secara lebih baik lagi ke depan. Ini terutama terjadi pada usaha-usaha yang bersifat jangka panjang seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Dalam satu dua bulan sejak usaha mereka mulai dan menunjukkan perkembangan yang kurang baik, mereka tetap bersemangat dan berharap bisa mendapat hasil yang lebih baik dengan terus berusaha menerapkan pengetahuan-pengetahuan baru yang diperoleh di pelatihan. Misalnyadengan menunda panen seperti dalam usaha ikan bawal atau berusaha mendapatkan resep-resep kue baru selain yang diperoleh dari pelatihan dalam usaha kue brownies. Kedua, sebagian kecil diantaranya sudah mulai menunjukkan adanya sikap putus asa. Bahkan ada satu kasus (Keripik Mawar) yang baru beberapa bulan dirintis sudah gulung tikar dan tidak produksi lagi. Untuk mengangsur pinjaman BLM, responden akan menggunakan sumber penghasilan lain atau dengan mencari pinjaman lagi.

Mereka yang termasuk kategori kedua ini beranggapan bahwa kerugian atau ketidakpastian prospek usahanya merupakan sinyal awal bahwa mereka memang tidak mempunyai bakat menjalankan suatu usaha. Kendala yang umumnya dikemukakan oleh anggota yang usahanya tidak berkembang adalah masalah pemasaran dan ketersediaan bahan baku. Dalam konteks ini, ibarat orang yang baru bisa berjalan, jika dalam langkah awalnya “terantuk kerikil” dan lantas membuatnya frustrasi, maka peran fasilitator (FK dan KPMD) sangat dibutuhkan. Oleh karena itu keberadaan fasilitator yang berkelanjutan, setidaknya sampai mampu mengantarkan mereka “bisa berjalan sendiri” merupakan keharusan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anggota KPB yang mendapatkan pendampingan terkait usaha yang sedang dirintisnya. Sedangkan sebagian besarnya lain hanya mendapatkan nasihat supaya tidak telat membayar angsuran dan bahkan tidak mendapat perhatian sama sekali dari fasilitator.

Kegiatan pendampingan dalam pelaksanaanusaha memang sangat diperlukan, namun sayangnya hal ini masih sangat kurang. , Hal ini misalnya terlihat dari indikasi hanya satu satu dua orang yang melakukan pencatatan usaha atau pembukuan. Itu pun dalam bentuk yang sangat sederhana, hanya berupa catatan lembaran kertas atau bahkan di bungkus rokok. Ini menandakan mereka belum sepenuhnya memahami arti penting pembukuan dalam sebuah usaha. Selain keterbatasan sumber daya manusia, alasan yang dikemukakan adalah malas, tidak mau dipusingkan dengan hitung-hitungan uang masuk dan keluar maupun karena selama ini tidak terbiasa mencatat pengeluaran dan pemasukan.

Terkait dengan pembukuan usaha, hal yang cukup menggembirakan terjadi dalam usaha kelompok. Dari tiga usaha kelompok yang menjadi sampel studi kasus, dua di antaranya sejak dari awal sudah berinisiatif melakukan pencatatan atas usaha mereka. Sementara satu usaha lagi, yakni penggemukan sapi tidak melakukan pencatatan karena menurut mereka apa yang mereka lakukan sudah jadi kebiasaan sejak lama.

Kenyataan di atas menunjukkan kemampuan manajemen-diri (*self-management*) anggota masih perlu ditingkatkan agar terbiasa melakukan kontrol dan evaluasi mandiri atas usaha yang sedang dijalankan. Selama ini mereka masih mengandalkan kontrol dari luar (orang lain).

5.3.3 Beberapa Kendala

Selain “kendala mental” yang menghinggapi beberapa anggota KPB yang baru mulai menjalankan usahanya, beberapa responden studi kasus ini juga menghadapi beberapa kendala teknis pelaksanaan usaha. Sebagian responden menyatakan salah satu kendala yang mereka hadapi adalah perluasan pasar, khususnya untuk produk jajanan (kripik, kue, dan lain-lain). Untuk produk-produk lainnya, yang secara tradisional memang mempunyai pasar yang luas, seperti sapi, kambing, ayam dan produk pertanian umumnya, anggota PKKPM tidak mempunyai kekhawatiran tentang pemasaran produknya.

Menurut responden, untuk memasarkan produk jajanan ke pasar yang lebih luas dan mampu bersaing dengan produk sejenis, masih banyak upaya yang harus dilakukan. Selain meningkatkan dan menjaga kualitas, salah satu aspek teknis yang mesti dipenuhi adalah menyangkut *packaging*. Masalahnya, aspek *packaging* ini tidak tercakup dalam pelatihan dan atau pinjaman modal BLM yang telah diterimanya. Untuk itu, mereka berharap bahwa pelatihan usaha tidak hanya cukup dalam satu kali putaran, melainkan ada tindak lanjut pelatihan berikutnya sesuai dengan lini produk yang mereka hasilkan.

Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya fasilitasi pemasaran yang lebih luas karena sampai saat ini umumnya mereka hanya mengandalkan pasar yang ada di masing-masing desanya. Tanpa ada ekspansi pasar, seandainya usaha bersangkutan mampu bertahan, maka tidak akan mampu lebih jauh mengangkat pendapatan mereka. Terkait dengan hal ini, para fasilitator belum melakukan upaya dalam membantu mereka memperluas pasar produknya, misalnya mempertemukan mereka dengan para pemilik toko jajanan atau toko oleh-oleh di sepanjang jalur lintas Tegal-Purwokerto.

Ekspansi pasar yang lebih luas juga terkendala oleh masalah perijinan. Untuk menitipkan produk ke toko swalayan misalnya, pihak toko swalayan mensyaratkan adanya Ijin Usaha yang tentunya belum dipunyai oleh para pengusaha anggota PKKPM. Untuk itu, seorang responden yang merasa produknya mampu bersaing, mengharapkan adanya fasilitasi pengurusan Ijin Usaha.

Selain ekspansi pasar, sebagian responden juga mengeluhkan tingginya harga pengadaan harga bahan baku. Untuk singkong, misalnya, seorang responden harus membelinya di pasar yang cukup jauh dengan ongkos transportasi yang cukup tinggi. Masalah infrastruktur transportasi dan akses pasar yang kurang memadai akan menjadi potensi kendala untuk anggota PKKPM dalam memasarkan produknya. Untuk memasarkan hasil bertani kentang, misalnya, lokasi pilot PKKPM di Desa F4 (Kecamatan F, Pekalongan) harus memasarkannya ke lokasi yang jauh dengan jalan yang kurang baik sehingga ongkos transportasinya mahal. Umumnya petani kentang di desa ini lebih mengandalkan para tengkulak yang datang dari Kabupaten Banjarnegara. Kondisi demikian tentu membuat harga jual petani menjadi rendah.

Kondisi jalan dan transportasi yang kurang baik sehingga menjadi kendala bagi pengadaan bahan baku dan pemasaran produk, sebenarnya bisa disiasati dengan melakukan kerjasama antara anggota PKKPM dengan para pengusaha setempat. Di wilayah Desa C1 misalnya, usaha telur asin yang dijalankan seorang anggota KPB memiliki prospek cukup baik, namun terkendala pengadaan bahan baku telur dalam jumlah banyak yang harus dibeli di pasar luar desa. Di pihak lain, dalam sebuah diskusi dengan elit desa setempat, salah seorang peserta perwakilan pengusaha lokal menyatakan “*Mengapa tidak ada yang ngomong pada saya. Kalau dibicarakan, saya kan bisa mengusahakan agar usaha ini sama-sama menguntungkan.*” Pernyataan ini adalah gambaran umum dari perjalanan program PKKPM dalam hubungannya dengan para pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait dengan usaha para anggota. Banyak di antara para elit desa yang tidak terlalu

paham alur perjalanan dan tujuan sesungguhnya dari program PKKPM selain bahwa orang miskin dapat pinjaman modal. Sosialisasi dan tindak lanjut kepada mereka masih kurang..

Yang tak kalah pentingnya juga dalam hal ini adalah kemampuan membangun relasi bisnis dan kemampuan negosiasi dan promosi. Hal ini tentu tidak bisa diserahkan begitu saja kepada anggota KPB mengingat rata-rata SDM mereka yang masih rendah. Ujung tombak dari kegiatan ini sebenarnya ada di tangan KPMD. Oleh karena itu pembekalan khusus tentang kedua kemampuan ini perlu diberikan kepada KPMD agar bisa menularkannya kepada anggota KPB.

5.3.4 Prospek Usaha

Mengingat usaha yang dilakukan oleh anggota PKKPM, baik individu maupun kelompok relatif baru mulai berjalan, masih terlalu dini membuat prediksi apakah keseluruhan usaha yang telah dijalankan akan mempunyai prospek yang cerah atau tidak. Termasuk, apakah usaha bersangkutan akan berkelanjutan atau tidak. Meskipun demikian, akan menjadi sangat baik jika para fasilitator senantiasa melakukan pendampingan dan sejak dini terus melakukan upaya pemantauan. Hal ini perlu dilakukan karena ternyata tidak semua peserta PKKPM mempunyai tingkat semangat yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap tahap awal perjalanan usaha anggota PKKPM yang dijadikan kasus, masalah paling menentukan bagi keberlanjutan atau kemandegan usaha terletak pada tahap perencanaan yang antara lain terkait dengan pembacaan pasar dan kemampuan produksi. Usaha-usaha yang tidak melalui perencanaan yang matang dapat dipastikan akan macet atau setidaknya tertatih-tatih. Perencanaan harus dilakukan dengan melihat kegiatan usaha secara menyeluruh, mulai dari tahap pengadaan bahan baku sampai daya serap pasar. Namun, sebagian besar usaha yang dilaksanakan anggota PKKPM berangkat dari perencanaan yang bersifat parsial. Artinya hanya bertumpu pada keinginan dan minat anggota, besarnya peluang pasar, atau pengalaman dan keahlian anggota saja.

Visi parsial saat merencanakan usaha ini tak pelak lagi mengakibatkan bankrut atau tidak lancarnya perjalanan usaha. Seorang anggota KPB yang telah berpengalaman sebagai penjahit, bahkan sampai dijadikan asisten pelatih dadakan saat pelatihan, memilih tidak melanjutkan usaha jahitnya di rumah sebagaimana yang diusulkannya dalam proposal usaha dan telah terealisasi dalam bentuk pembelian mesin jahit. Dia memilih kembali bekerja sebagai karyawan perusahaan konveksi di Jakarta karena setelah sebulan mesin jahit ada di rumahnya, hanya satu dua orang yang datang memperbaiki pakaian. Rumahnya berada di dusun terpencil di Desa E1 yang hanya terdiri dari belasan KK. Sementara untuk mendapatkan orderan dari perusahaan konveksi di luar desa untuk dikerjakan di rumah, dia juga kesulitan karena kendala transportasi. Akhirnya mesin jahit hasil pembelian dari pinjaman BLM menganggur di rumahnya.

Lain lagi dengan kasus seorang anggota yang memilih usaha pembuatan tahu. Berbekal pengalaman dan peluang pasar yang cukup besar di desanya, dia mengajukan usaha pembuatan tahu. Usaha ini dimulai dari nol dalam artian seluruh peralatan dibeli baru. Persoalan muncul ketika pinjaman modal yang dia terima hanya cukup untuk membeli mesin penggiling kedelai seharga Rp. 5.000.000, sementara untuk peralatan lain dan renovasi tempat usaha dia harus meminjam dari rentenir yang pembayarannya dilakukan sekali seminggu. Akibatnya, penghasilan dalam 3 bulan pertama usahanya hanya habis untuk menutup cicilan kepada rentenir. Anggota ini seakan masuk lingkaran setan karena untuk melanjutkan produksi dia tidak punya pilihan lain selain menambah pinjaman pada rentenir tersebut.

Titik krusial pada dua kasus di atas adalah pada tahap perencanaan usaha. Usaha tersebut dirancang hanya dengan mempertimbangkan satu dua aspek saja tanpa mempertimbangkan aspek

lain secara menyeluruh. Ketika terjadi kemacetan dan tidak dibarengi dengan pendampingan yang baik, maka anggota yang bersangkutan akan putus asa dan kembali ke kondisinya semula, dan kali ini diperberat dengan beban angsuran pengembalian modal BLM.

Contoh usaha anggota KPB yang prospektif karena berhasil merencanakan usahanya dengan relatif menyeluruh adalah usaha ayam goreng keliling dan keripik pisang Ayumi. Dalam kasus pertama, anggota KPB sudah mempertimbangkan kemampuan produksi, daya serap pasar dan tenaga yang akan menjalankan usaha. Kesemuanya ini diimbangi dengan pengalaman berjualan kue keliling sebelumnya. Usaha ayam goreng ini adalah usaha tambahan. Pada saat harga ayam melonjak tajam, dia mengurangi angka produksi sembari menggenjot produksi usaha kuenya sampai harga ayam stabil kembali. Sementara Kripik Pisang Ayumi dilakukan oleh seorang janda beranak tiga dengan total modal awal tidak sampai Rp 1 juta dari pinjaman BLM sebesar Rp.1.5 juta. Dengan omset rata-rata Rp.22.500 per hari, anggota ini konsisten memproduksi sesuai kemampuannya dan daya serap tetangga sekitar rumah sebagai pasarnya. Dia tidak kesulitan bahan baku karena rencana usaha ini justru dibuat karena dia punya kebun pisang. Hasilnya adalah sampai 3 bulan perjalanan usaha, dia tidak menghadapi kendala berarti. Dia mampu menyisihkan laba untuk keperluan keluarga dan tidak pernah telat dalam membayar angsuran BLM.

5.3.5 Usaha Kelompok.

Pembuatan kegiatan usaha secara berkelompok tidak selalu mudah. Jauh lebih mudah melakukan kegiatan usaha secara individu. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan usaha berkelompok, masing-masing anggota dituntut untuk mampu menciptakan kerjasama yang baik, lengkap dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara setara. Kondisi demikian masih sulit dipenuhi oleh para anggota KPB dan karenanya proposal usaha berkelompok hanya berjumlah 2% dari keseluruhan proposal usaha (Kotak 9).

Kotak 9 Kasus Usaha Kelompok

Beberapa KPB yang mengajukan proposal usaha kelompok, sebagian diantaranya gagal bahkan sebelum usaha kelompok dimulai. Salah satunya adalah upaya tiga orang anggota KPB “Al Barokah”, Desa C1 yang berencana membuat usaha kelompok keripik singkong. Tiga orang ini gagal membuat usaha kelompok karena salah satu anggotanya berubah pikiran untuk membuat usaha siomay, sementara satunya lagi sedang sakit. Akibatnya, ketika pinjaman BLM usaha kelompok ini cair, mereka tidak bisa merealisasikannya dan berubah menjadi usaha individu.

Sebagian lainnya berhasil mewujudkan usaha kelompok. Tiga studi kasus usaha kelompok yang menjadi contoh pemantauan ini menunjukkan kinerja yang cukup baik (Lihat tabel). Bukan saja dilihat dari aspek untung ruginya, tetapi kerjasama antaranggota dalam kelompok juga sangat sinergis. Dalam arti masing-masing anggota tahu dan menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama-sama. Sampai saat ini kerjasama dalam kelompok usaha tersebut masih terjaga kekompakannya. Termasuk dalam menanggung potensi beban kerugian secara tanggungrenteng. Hal ini misalnya terjadi di kelompok “Tani Klindon” yang seekor sapihnya mati ketika baru memulai kegiatan usaha.

Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Kelompok

No	Responden	Desa	Jenis Usaha	Awal Usaha	Pinjaman BLM	BLM Terpakai	Omset/ Bulan	Untung /Rugi /Bulan
1	Kuda Terbang (7 orang)	Desa C1	Keripik singkong	Apr-15	14.000.000	3.500.000	2.430.000	805.000
2	Kenci Berseri (5 orang)	Desa D1	Kripik balado	Feb-15	10.000.000	2.500.000	7.000.000	2.200.000
3	Tani Klindon (13 orang)	Desa F2	Penggemukan sapi	Des-15	65.000.000	65.000.000	n.a	n.a

Sumber: Data primer pemantauan.

5.4 Penyaluran Kerja

Sampai dengan akhir Juni 2015, belum ada anggota KPB yang bertujuan mendapatkan pekerjaan melalui kesertaannya dalam PKKPM telah mendapatkan pekerjaan. Sejauh ini, kegiatan PKKPM baru terbatas pada pemberian pelatihan ketrampilan. PKKPM belum secara sistematis melakukan upaya untuk memfasilitasi mereka mendapatkan pekerjaan. Ini terjadi karena fokus program terutama tertuju pada pelaksanaan usaha yang jumlahnya jauh lebih dominan, sehingga tahap fasilitasi magang dan penyaluran kerja bagi anggota yang sudah mendapatkan pelatihan kerja tidak terlaksana. Tahapan pelatihan kerja yang terlaksana tidak berbeda hakikatnya dari kursus-kursus keterampilan biasa. Anggota yang telah selesai mengikuti pelatihan dibiarkan mencari nasibnya sendiri-sendiri.

Sebagai contoh, tiga anggota KPB yang berbeda di Desa C1 mengajukan proposal kesempatan kerja, berupa tenaga sopir dan tenaga administrasi. Dua responden yang telah mendapatkan pelatihan menjadi sopir belum mendapatkan pekerjaan. Sambil menunggu lowongan kerja, salah satu diantaranya saat ini menggunakan dana pinjaman BLM untuk mengembangkan usaha pembuatan gerobak (untuk berjualan jajanan keliling) sementara yang satu lagi mencoba jadi sopir cadangan kakaknya yang memiliki usaha persewaan *sound system*.

Seorang responden, Ruminah, lulusan SMP yang mengikuti pelatihan komputer saat ini sudah berangkat ke Jakarta untuk membantu pekerjaan suami. Sebelum mendapatkan pelatihan, Ruminah sebenarnya sudah mendapatkan peluang kerja di salah satu *showroom* mobil di Bekasi melalui relasi suaminya. Pelatihan komputer yang didapatnya dari PKKPM adalah untuk menangkap peluang kerja tersebut. Namun, karena Ruminah pergi ke Jakarta juga membawa anaknya yang masih kecil, maka sampai saat ini ia belum bekerja di *showroom* tersebut. Saat ini Ruminah masih tinggal di Jakarta bersama suaminya dan membantu pekerjaan suami yang bekerja sebagai mandor bangunan.

Ruminah berharap dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dari pelatihan komputer. Meskipun dia belum bisa bekerja di kantor, paling tidak Ruminah dapat membantu suami dengan kemampuan mengoperasikan komputer. Ruminah ingin melanjutkan kursus komputer untuk program desain sehingga dapat menunjang pembuatan desain bangunan melalui aplikasi komputer.

5.5 Angsuran BLM

5.5.1 Mekanisme Angsuran

Setelah tahapan pencairan dana BLM terlaksana di semua wilayah pilot PKKPM, pada saat ini anggota KPB mulai masuk ke dalam tahapan pelaksanaan usaha/kerja dan angsuran BLM. Menurut PTO PKKPM, periode pinjaman BLM adalah 12-18 bulan. Kesepakatan periode pinjaman ini, apakah 12 bulan atau 18 bulan, ditentukan oleh UPK, fasilitator dan disepakati oleh anggota KPB. Selain memberikan pilihan jangka waktu pinjaman, Pilot PKKPM juga memberikan mekanisme pembayaran angsuran yang sangat fleksible. Para anggota KPB dapat memilih mekanisme pembayaran angsuran tiap bulan, tiap tiga bulan, tiap 6 bulan atau membayarnya sekaligus pada akhir periode pinjaman. Bahkan di Desa C1, tidak ada ketentuan tentang pembayaran angsuran secara sistematis. Artinya anggota KPB dapat melakukan pembayaran angsuran berapapun, kapanpun selama masih dalam periode pinjaman atau selama 18 bulan.

Sebagian besar anggota KPB memilih angsuran per bulan dengan alasan agar tidak memberatkan²¹. Sementara itu, anggota KPB yang memilih mekanisme angsuran dengan jangka yang lebih panjang, umumnya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankannya. Di sektor usaha yang tidak tiap bulan memberikan pemasukan, seperti bidang peternakan (sapi dan kambing), perikanan dan pertanian, mereka memilih mekanisme angsuran hanya beberapa kali dalam periode pinjaman. Yakni 1-4 kali angsuran selama periode pinjaman. Terkait dengan hal ini, ada kasus khusus di Kecamatan F. Pada kasus ini, meskipun usaha yang mereka jalankan memberikan pendapatan harian dan diharapkan mengangsur pinjaman per bulan tetapi mereka memilih membayar 1 kali di akhir masa pinjaman.

Sampai dengan pertengahan Juli 2015, terdapat gejala anggota KPB tidak menepati mekanisme angsuran sesuai kesepakatan awal. Banyak yang terlambat membayar. Dari seluruh KPB sampel di 3 kecamatan yang berbeda, terlihat adanya keterlambatan antara tanggal jatuh tempo angsuran dengan realisasinya. Keterlambatan ini ada yang hanya dalam hitungan hari, namun ada juga yang sampai satu bulan. Keterlambatan angsuran ini, baik angsuran anggota ke kelompok maupun angsuran kelompok ke UPK, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

²¹Untuk anggota KPB yang memilih mekanisme angsuran bulanan, mereka telah melakukan angsuran sebanyak 2-6 kali (per Juni 2015). Perbedaan ini dikarenakan pencairan BLM dari UPK ke KPB tidak bersamaan, yakni berlangsung antara Desember 2014-April 2015.

- (i) Dana angsuran masih digunakan oleh anggota untuk keperluan lain.
- (ii) Sementara itu, untuk keterlambatan penyetoran angsuran ke UPK, faktor penyebabnya antara lain (i) Penyeragaman tanggal penyetoran. Di Desa E1 misalnya, pencairan BLM ke KPB tidak serentak sehingga tanggal jatuh tempo angsurannya seharusnya juga tidak serentak. Namun, para anggota KPB menyepakati untuk mensekagamkan tanggal penyetoran angsuran ke UPK, (ii) Alasan teknis, misalnya karena tanggal penyetoran ke UPK bertepatan dengan hari libur.

5.5.2 Bunga Pinjaman

Ketentuan dalam PTO program PKKPM menggariskan bahwa anggota KPB yang mendapatkan pinjaman BLM harus membayar bunga pinjaman. Meskipun demikian, PTO tidak menetapkan besarnya tingkat bunga pinjaman. Penetapan tingkat bunga pinjaman diserahkan kepada masing-masing KPB. Di sepuluh desa pilot PKKPM di Jawa Tengah, tingkat bunga pinjaman BLM berkisar 0.2%-1,5% per bulan²².

Secara prinsip, bunga pinjaman BLM menjadi hak anggota KPB dan oleh karena itu penggunaannya tergantung dari kesepakatan masing-masing KPB. Berdasarkan hal ini, terdapat beberapa variasi penggunaan bunga pinjaman BLM:

- (i) Di Kecamatan A dan Kecamatan D, semua bunga pinjaman menjadi hak kelompok dan dibukukan dalam kas kelompok.
- (ii) Di Desa C1, semua bunga pinjaman tidak masuk ke kas kelompok, tetapi untuk biaya transportasi pengurus kelompok yang melakukan setoran ke UPK.
- (iii) Di Kecamatan E, pembagian jasa bunga pinjaman antara UPK dan kelompok menjadi pembahasan yang cukup panjang. Pada masa kekosongan fasilitator, mereka sepakat menetapkan bunga pinjaman 1% dengan pembagian 0.5% untuk UPK dan 0,5% untuk kelompok. Pada saat fasilitator aktif kembali, kesepakatan tersebut diubah menjadi 0,7% untuk kelompok dan 0,3% untuk UPK. Namun, sampai Juni 2015 semua jasa bunga tersebut masih dipegang UPK dan belum ada yang dikembalikan ke kelompok.

²²Kecamatan F menetapkan bunga 1,5% per bulan, acuannya adalah tingkat bunga SPP PNPM reguler.

VI. PERUBAHAN KAPASITAS PESERTA PKKPM: SUATU INDIKASI AWAL

Pilot Program PKKPM di Jawa tengah telah berlangsung selama satu tahun. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, jangka waktu tersebut bukanlah periode yang mencukupi untuk melihat dampaknya. Untuk menilai apakah suatu program pemberdayaan berdampak atau tidak memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan tujuan utama program pemberdayaan yang paling esensial adalah merubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak peserta program. Berbagai aspek teknis yang menyangkut tujuan program, seperti peningkatan pendapatan, keberhasilan dan kegagalannya sangat tergantung apakah program mampu merubah ketiga pola tersebut sehingga mampu mendukung tujuan teknis program.

Berdasarkan hal itu, Bab VI ini tidak mengulas tentang dampak program, melainkan lebih merupakan paparan mengenai beberapa indikasi perubahan awal yang dialami peserta program. Baik perubahan yang menyangkut bagaimana peserta melihat diri sendiri dan lingkungannya dalam hubungannya dengan sikap dan prilakunya maupun perubahan yang terkait dengan matapencahariannya. Nemun, satu hal yang perlu mendapatkan catatan, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini belum dapat dikatakan sebagai suatu perubahan yang mantab. Dalam arti perubahan yang terjadi, jika ada, barulah merupakan perubahan yang sifatnya awal. Perubahan-perubahan itu belum tentu sudah terinternalisasi ke dalam norma peserta program, karena perubahan demikian memerlukan waktu yang cukup lama.

6.1 Perubahan Kapasitas Modal SDM

Sesuai dengan tujuan program pemberdayaan umumnya, Pilot PKKPM merupakan upaya pembangunan sumber daya manusia yang secara sistimatis mencoba meningkatkan kapasitas peserta program. Baik kapasitas secara individu maupun kapasitas secara komunal (kelompok), baik yang bersifat "kualitas diri" maupun kualitas teknis. Hal ini bisa terjadi karena para peserta PKKPM sejak awal mendapatkan berbagai pelatihan yang sifatnya *transfer knowledge* dari FK/KPMD maupun pelatihan dalam bentuk keharusan melakukan berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin mingguan dan menabung.

6.1.1 Kepercayaan Diri dan Ekspektasi

Rata-rata peserta PKKPM merupakan masyarakat miskin yang umumnya mempunyai sifat dan sikap rendah diri, sehingga menjadi salah satu kendala mereka untuk maju. Berdasarkan hal ini PKKPM berupaya membangkitkan potensi diri peserta PKKPM melalui proses partisipatoris secara kelompok. Bagi sebagian besar peserta program, keanggotaannya dalam kelompok KPB merupakan pengalaman pertama menjadi anggota kelompok/organisasi. Dalam kelompok ini, mereka dituntut untuk selalu aktif dalam kegiatan kelompok. Anggota KPB merasakan bahwa program ini telah memberikan kemanfaatan yang besar dalam bentuk non-materi. Misalnya, mereka dapat mengaktualisasikan diri, memupuk rasa percaya diri, dan meningkatkan martabatnya. Bahkan mereka menganggap penyertaan mereka ke dalam kelompok merupakan penghargaan dari pemerintah. Secara keseluruhan, aspek-aspek ini merupakan cerminan bahwa PKKPM telah mampu membangkitkan semangat hidup peserta program untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, seperti tercermin dalam pernyataan:

“Saya (juga anggota yang lain) merasa mendapatkan penghargaan (dari program pemerintah), karena sebelumnya kami itu tidak pernah mempunyai organisasi yang bisa membantu meringankan kebutuhan kami. Dengan menjadi anggota KPB, saya itu seperti ...gimana ya istilahnya, pokoknya kami anggota kelompok merasa “diwongke”. Masing-masing anggota bisa saling berbagi pengalaman, bisa curhat, pokoknya kelompok ini menjadi seperti rumahtangga kami yang kedua” (Feri, laki-laki, Desa C1).

“Dengan adanya program ini, yang dulunya saya hanya tukang pijit dan tukang cuci yang uangnya pas-pasan dan serba kekurangan, sekarang saya punya usaha keripik bersama ibu-ibu anggota KPB. Juga dengan model pertemuan KPB, saya bisa ngomong di depan seperti ini” (Ibu D, perempuan, Desa D1).

“Anggota yang sebelumnya malas bekerja, setelah menjadi anggota P2B ada peningkatan kesadaran untuk berusaha” (FGD Miskin, Desa B1)

Kemanfaatan KPB dan PKKPM seperti itu pada akhirnya mendorong sebagian mereka berupaya untuk terus mempertahankan keberadaan kelompok seperti terungkap dalam pernyataan “*Makanya kami telah sepakat akan terus mempertahankan kelompok ini sampai kapanpun*” (Dwi, laki-laki, Desa C1).

Adanya peningkatan kepercayaan diri tersebut juga berdampak pada peningkatan ekspektasi terhadap tingkat kesejahteraannya dan atau kemampuannya untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Tabel 42 menunjukkan secara umum sebagian besar peserta PKKPM merasa yakin akan mampu meningkatkan kesejahteraannya pada masa yang akan datang. Menurut ekspektasinya, sebagian besar responden setidaknya akan berada pada tingkat kesejahteraan menengah (tingkat 4,5,6), yakni 66% (Q1) dan 61% (Q3). Ekspektasi peningkatan kesejahteraan cenderung lebih rendah pada Q3 (setelah peserta memulai kegiatan usaha). Terjadinya “koreksi” terhadap ekspektasi ini kemungkinan responden mulai bersikap realistis terhadap prospek usahanya. Paparan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan usaha peserta menunjukkan prospek yang cerah. Kondisi demikian merupakan indikasi bahwa upaya pendampingan usaha yang berkelanjutan menjadi semakin relevan.

Tabel 42. Persepsi Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga Saat ini dan Lima Tahun Mendatang

Tangga kesejahteraan	Kondisi saat ini		5 tahun mendatang	
	Q1	Q3	Q1	Q3
1	20,0	16,7	0	3
2	23,3	30,0	0	3
3	40,0	30,0	10	13
4	10,0	10,0	13	7
5	6,7	13,3	30	27
6	0,0	0,0	23	27
7	0,0	0,0	13	13
8	0,0	0,0	0	0
9	0,0	0,0	0	0
10	0,0	0,0	10	7

Sumber: Data primer pemantauan

6.1.2 Pengetahuan dan Ketrampilan Vokasional

Secara integral PKKPM menyediakan kegiatan pelatihan vokasional yang bersifat open menu dan kegiatan ini merupakan salah satu daya tarik program yang penting. Meskipun pelatihan ini hanya berlangsung satu putaran namun ternyata telah mampu meningkatkan kapasitas SDM peserta dan mereka sangat antusias mempraktekannya. Beberapa anggota KPB bahkan ada yang hanya mengambil opsi pelatihan tanpa mengambil opsi BLM, karena mereka sangat memerlukan peningkatan ketrampilan.

Secara umum anggota KPB menilai pelatihan ketrampilan yang mereka peroleh sangat berguna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Beberapa contoh kutipan berikut merupakan indikasi kedudukan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi anggota KPB dalam kaitannya dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan:

“Saya senang kelompok KPB karena banyak pelatihannya” (Anggrek, perempuan, Desa C1).

“Melalui kelompok ini kami diberi penyadaran tentang macam-macam hal yang terkait perbaikan kehidupan kami ke depan. Dan saya memang akhirnya menjadi sadar bahwa supaya kehidupan saya dan keluarga bisa menjadi lebih baik perlu banyak upaya. Ya upaya menabung, upaya mengatur “dapur”²³ agar lebih baik, bekerja lebih tekun, dan tentu saja upaya mempunyai sumber penghasilan yang lebih baik dan lebih beragam” (Dwi, laki-laki, Desa C1).

“Dulu belum ada ilmu, tapi sekarang sudah mempraktekan ilmu pelatihannya, jadi hasilnya sudah cukup baik”. (RTM, Kecamatan F).

“Pelatihan pengendalian penyakit untuk unggas ini bermanfaat mas, saya jadi tahu ternyata unggas itu butuh obat-obatan, bukan hanya makanan. Sekarang saya jadi paham mengendalikan hama unggas agar usaha peternakan ayam saya bisa berjalan lancar” (Gusti, laki-laki, Desa D1).

“... ternyata ada caranya biar susu kedelai gak terlalu terasa kedelainya. Sama mbak yang melatih diajari....alhamdulillah, setelah pake resep pelatihan orang yang tadinya gak suka susu kedelai sekarang jadi pelanggan saya” (A, perempuan, Desa C1).

6.1.3 Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku anggota KPB yang mudah diidentifikasi tercermin dari kegiatannya menabung. Perubahan ini sangat logis karena melakukan tabungan rutin di kelompok merupakan salah satu syarat menjadi anggota KPB. Bagi pengelola program, tidak penting benar berapa besar yang bisa ditabung oleh anggota KPB karena yang dipentingkan adalah agar masyarakat miskin mempunyai kebiasaan menabung. Oleh karena itu, PKKPM tidak menetapkan besaran tabungan anggota. Sesuai dengan kemampuan peserta program, jumlah tabungan sepenuhnya diserahkan kepada kelompok sesuai dengan kemampuan anggota.

Kewajiban melakukan tabungan tersebut tentunya tidak ditentukan secara serta merta. Namun, sebelumnya mereka telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan mengenai Manajemen Keuangan Keluarga. Berdasarkan pelatihan ini anggota KPB kemudian melakukan kewajibannya dengan melakukan kegiatan menabung di kelompok. Keseluruhan proses ini pada akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin sebenarnya mampu menabung. Jika sebelumnya sebagian kecil dari mereka yang mempunyai tabungan, persoalannya tidak semata pada tingkat pendapatannya yang kecil. Melainkan disebabkan pula oleh pola penggunaan uang yang kurang efektif.

²³Maksudnya upaya perbaikan manajemen keuangan keluarga.

Upaya merubah prilaku yang sifatnya pemaksaan ini pada awalnya memang berat, namun seperti pepatah menyatakan “*ala bisa karena biasa*”, keterpaksaan menabung pada akhirnya menjadi kebiasaan. Data sebelumnya juga menunjukkan bahwa anggota KPB tidak saja melakukan tabungan pokok yang menjadi kewajibannya. Setelah beberapa waktu berjalan, semua KPB akhirnya membuka kegiatan tabungan sukarela karena para anggota menghendakinya. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa telah terjadi perubahan signifikan tentang prilaku peserta program terhadap kegiatan menabung khususnya dan mengelola keuangan keluarga pada umumnya.

Selain kegiatan menabung, beberapa aspek perubahan lainnya adalah terkait dengan aspek-aspek seperti peningkatan disiplin, pola penggunaan anggaran rumahtangga yang lebih terencana, serta kemauan meningkatkan pendapatannya. Baik melalui diversifikasi usaha maupun peningkatan kapasitas usaha yang sedang berjalan.

“Hal kedua yang memengaruhi perubahan yang saya alami adalah soal organisasi, manajemen dan disiplin. Dulu, saya dan mungkin juga anggota kelompok lainnya, tidak mempunyai disiplin terhadap diri sendiri. Dengan menjadi anggota kelompok, saya dipaksa untuk disiplin menghadiri pertemuan rutin dan dipaksa juga untuk bisa menyisihkan pendapatan yang tidak seberapa untuk bisa ditabung. Soal tabungan ini juga hal baru bagi saya, karena sebelum jadi anggota KPB, saya tidak pernah menabung. Pendapatan yang saya peroleh dari berjualan, biasanya cuman saya habiskan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Tapi karena sudah biasa menabung, makanya ketika pinjaman BLM cair dan harus melakukan angsuran, saya tidak mengalami kesulitan karena sudah melakukan perencanaan anggaran rumahtangga. Maksudnya dari pendapatan saya dan istri, saya bisa merencanakan berapa untuk konsumsi, berapa untuk angsuran dan berapa untuk tabungan” (I, laki-laki, Desa C1).

“Kalau buat saya pribadi, perubahan itu terjadi karena memang ada program atau dorongan dari luar yang memfasilitasi terjadinya perubahan tersebut. Maksud saya gini, selama ini saya memang ingin berubah, ingin usaha lebih maju dan sebagainya. Tapi karena tidak ada yang memfasilitasinya, maka ya keinginan-keinginan itu tinggal keinginan saja. Contoh nyatanya begini, saya dagang keliling itu sudah lama, ya gitu-gitu aja hasilnya. Ingin memperluas pasar tidak punya modal. Nah, ketika P2B juga menyediakan bantuan modal, maka keinginan saya tersebut baru bisa tercapai. Begitu maksud saya Pak. Saya kira anggota lainnya juga begitu. Mereka baru benar-benar berubah (dari keadaan atau kebiasaan sebelumnya), ketika ada P2B yang menyediakan berbagai dampingan, pelatihan dan bantuan modal” (I, laki-laki, Desa C1).

Dalam konteks PKKPM, keinginan yang kuat untuk “merubah nasib” tidak lagi menjadi sekedar keinginan. Anggota KPB telah mencoba dan berupaya merealisasikannya. Ibu S (Desa B1) misalnya, yang saat ini usaha kuenya mulai berkembang dan telah mampu mempekerjakan 2 orang keponakannya, terus berupaya mengembangkan bisnis kuenya. Semangat yang besar untuk mengembangkan bisnisnya antara lain dilatari oleh keinginannya untuk mampu membeli tanah dan membangun rumah yang lebih layak. Untuk itu mulai sekarang Ibu S rajin menabung dari hasil usahanya.

Semangat yang sama juga terdapat pada diri Pak Y (Desa B1). Menurut pengakuannya, keikutsertaannya berkelompok dalam PKKPM telah merubah pola pikirnya seperti terungkap dalam pernyataannya: “*Sebelum PKKPM saya juga sering ikut kumpul kumpul dengan tetangga sekitar rumah saya tapi kumpul kumpul tersebut tidak menghasilkan apa apa hanya sekedar main saja. Tetapi kumpul-kumpul dengan kelompok PKKPM sangat berbeda sekali, dari acara kumpul rutin tersebut banyak sekali hal yang mempengaruhi hidup saya. Terutama sekali yang saya rasakan berubah adalah pola pikir saya. Sekarang pola pikir saya lebih terbuka. Dari hasil kumpul rutin saya jadi menemukan banyak hal yang selama ini tidak pernah saya pikir bisa saya lakukan ternyata bisa saya lakukan kalau saya mau berusaha. Saya kira kumpul rutin tersebut merupakan perubahan terpenting dalam hidup saya*”.

Demikian juga halnya yang dialami oleh Pak W (Desa B1) setelah mendapat manfaat PKKPM. Kepercayaan dirinya untuk melakukan pengembangan usaha makin meningkat setelah mendapatkan pelatihan manajemen usaha pada Maret 2015. Banyak masukan yang ia peroleh dari pelatih tersebut. Saat ini ia sangat meyakini apa yang pelatihnya tersebut ajarkan, “...*usaha pasti bisa maju kalau saya yakin*”. Karena pelatihan ini Pak W menjadi mantap untuk tetap menjadi pedagang. Pelatihan ini juga telah membuat Pak W semakin berani mengambil resiko dalam usahanya. Sebelumnya, ia selalu khawatir merugi jika ingin memulai hal-hal baru dalam usaha, namun sekarang tidak lagi. Dia memberikan contoh “*Dulu selalu mikir, rugi nggak ya...kalau sekarang, kalau ada warga yang nawari jual kambing saya langsung beli saja, nanti saya bisa jual.*”

Beberapa aspek perubahan perilaku anggota KPB dalam meningkatkan pendapatannya ternyata juga dilihat oleh masyarakat yang bukan menjadi anggota KPB. Hal ini misalnya terlihat dari pernyataan peserta FGD yang menyatakan “...*sebelumnya malas bekerja, setelah menjadi anggota P2B ada peningkatan kesadaran untuk berusaha*” (FGD RTM Desa B1). Keseluruhan perubahan ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin jika mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya maka mereka akan menyambutnya.

6.2 Perubahan Kapasitas Modal Sosial

6.2.1 Kekeabatan

Kondisi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya memiliki ikatan kekeabatan yang kuat. Demikian pula dengan ikatan kekeabatan diantara masyarakat pada desa lokasi program PKKPM. Namun demikian, ikatan kekeabatan ini makin hari makin meluntur seiring berkurangnya intensitas komunikasi satu sama lain karena kesibukan masing-masing. Hal ini tercermin pada awal kegiatan KPB, banyak anggota yang masih merasa malas dan tidak merasa dekat satu sama lain, seperti tercermin pada pernyataan berikut: “...*dulu rasanya malas dan susah mengajak anggota hadir di pertemuan mingguan. Walaupun anggota sudah saling kenal karena masih berkeabatan dan tinggal berdekatan, namun jarang berkomunikasi. Acara pertemuan awalnya sangat kaku, rasanya setiap orang ingin segera pulang*” (T, perempuan, Desa B1).

Keberadaan pertemuan rutin KPB menjadikan adanya interaksi yang mendukung proses komunikasi diantara para anggota secara lebih intensif dan terarah. “*Adanya PKKPM menjadikan sering berkomunikasi dalam pertemuan rutin satu minggu sekali yang sebelumnya jarang bertemu, (FGD RTM, Desa B1,)*”. Proses komunikasi yang demikian menjadikan anggota merasa lebih rukun, merasa lebih dekat satu sama lain bahkan meskipun tidak terikat hubungan keluarga. Pak Dwi (Desa C1) menyatakan: “...*perubahan yang paling penting ya karena kami bisa berkelompok itu. Melalui kelompok, kami (para anggota) menjadi seperti bersaudara, sehingga kami merasa makin rukun. Ini bisa terjadi karena kami “diberi waktu”²⁴ oleh PKKPM untuk berkumpul tiap minggu itu*”. Hal yang sama juga dirasakan oleh pak I (Desa C1) yang menyatakan “... *kalau sebelumnya hanya sekedar kenal, sekarang menjadi benar-benar saling mengenal dari A sampai Z. Jadi antar anggota seperti menjadi saudara. Sebagai orang pendatang di dusun ini (saya asalnya dari Purwokerto), saya benar-benar seperti mendapatkan keluarga baru*”.

²⁴Maksudnya, aturan kelompok mengharuskan adanya pertemuan rutin tiap minggu. Aturan yang sebenarnya justru “mengambil waktu” para anggota, namun karena kemanfaatannya yang besar maka responden justru memaknainya sebagai “diberi waktu”.

6.2.2 Kerjasama dan Gotong Royong

Interaksi yang rutin dalam pertemuan dan kegiatan KPB lainnya juga menjadikan keterbukaan diantara para anggota. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pemikiran diantara mereka. Pertukaran informasi tersebut membuka jalan bagi kerjasama diantara anggota kelompok untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Kutipan-kutipan berikut menunjukkan terjadinya proses tersebut:

“ Menurut saya ini perubahan yang penting karena di kelompok ini masing-masing anggota bisa saling berbagi tentang apa saja, ya persoalan, ya pengalaman, ya cara penyelesaiannya (anggota KPB di Desa C1).

“...di kelompok ini kami bisa saling berbagi pengalaman. Misalnya kalau padi saya kena hama atau kambing saya mengalami sakit, saya bisa minta saran bagaimana cara mengatasinya kepada anggota lain yang lebih berpengalaman atau yang pernah mengalami kejadian yang sama (anggota KPB di Desa C1)”.

Sikap gotong royong menjadi hal yang tertanam dalam diri anggota tidak hanya dalam kegiatan yang berhubungan dengan usaha, namun juga dalam kegiatan sehari-hari, seperti misalnya pembangunan rumah. Mereka memiliki kesadaran akan adanya ketergantungan terhadap anggota yang lain. Hal ini tercermin dari pernyataan berikut: *“melalui kelompok ini kami juga merasakan gotong royong makin meningkat. Kalau ada anggota kelompok yang memerlukan bantuan tenaga, ya tinggal bilang waktu di pertemuan, anggota yang lain pasti akan membantu karena kami sadar juga bahwa suatu saat nanti kami juga mungkin memerlukan bantuan tenaga dari anggota lainnya. Demikian juga kalau ada persoalan atau perselisihan satu anggota dengan lainnya, kelompok akan ikut turun tangan mendamaikannya (anggota KPB di Desa C1)”*.

6.2.3 Perluasan Jaringan

Melalui program PKKPM, anggota KPB diarahkan untuk menjalankan usaha baik dengan memproduksi barang maupun menyediakan jasa, sesuai dengan kemampuan dan minat anggota. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan usaha baik secara individu maupun berkelompok adalah keberadaan konsumen atau pasar dari produk atau jasa yang disediakan produsen. Penyebaran informasi keberadaan dan kemanfaatan produk dan jasa kepada calon konsumen menjadi hal penting dalam memperluas jaringan pemasaran. Keberadaan kelompok dapat menjadi sarana pertukaran informasi mengenai produk dan jasa yang disediakan diantara anggota KPB dan untuk selanjutnya disampaikan kepada orang lain di luar kelompok. Seorang anggota KPB di Desa C1 (Pak I), misalnya, menyatakan *“kalau dipikir-pikir, pendapatan saya yang bertambah itu kan awalnya karena ada kelompok, ada banyak teman, kalau ada kenalan anggota kelompok yang HP-nya rusak misalnya, mereka akan bilang servisnya ke Pak I saja. Nah itu maksud saya bahwa rizki yang bertambah itu awalnya dari kelompok”*. Kasus serupa juga dialami oleh Ibu Yayah (Desa B1). Interaksi Bu Yayah dengan para pelaksana program (FK, KPMD, TPK) berdampak pada meluasnya pangsa pasar produk yang dihasilkan (kue-kue). Para pelaksana program tersebut yang memiliki jaringan lebih luas memperkenalkan produk kue Ibu Yayah. Sebagai hasilnya, beberapa kali Ibu Yayah mendapatkan pesanan kue dari pembeli luar desa.

Perluasan jaringan pada lingkup di dalam dan di luar desa, juga bermanfaat untuk mendapat informasi dan pengetahuan mengenai produk dan jasa yang prospektif untuk dikembangkan. Misalnya salah satu KPB di Desa B1 mengembangkan usaha kelompok penjualan tabung gas untuk rumah tangga. Pilihan usaha ini diambil karena di dusun tempat tinggalnya belum ada penjual gas. Akibatnya harganya menjadi lebih mahal karena terbebani biaya transportasi. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh KPB untuk membuka usaha penjualan gas. Untuk mendapatkan pasokan gas,

maka KPB tersebut memanfaatkan informasi dari salah satu anggota yang telah mengetahui jaringan dan sistem distribusi pasokan gas di daerah setempat.

6.3 Perubahan Kapasitas Modal Keuangan/Ekonomi

6.3.1 Peningkatan Jenis Sumber Pendapatan

Pada awal kegiatan pemantauan, sebagian besar peserta PKKPM merasa bahwa akses mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru sangat sulit. Selain faktor eksternal (lowongan pekerjaan tidak tersedia, dll), faktor internal dari para peserta PKKPM sendiri yang notabene adalah masyarakat miskin juga menjadi penghambat bagi mereka mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru (keahlian rendah, ketiadaan modal, dll). Dari sekitar 30 orang peserta PKKPM yang ditanya mengenai hal ini, sekitar 27 diantaranya (90%) menyatakan bahwa mereka sulit mendapatkan pekerjaan/membuka usaha baru karena faktor kurangnya keterampilan dan jauhnya tempat tinggal mereka dari sentra industri dan kota. Mereka berusaha menghadapinya dengan mencoba beralih pekerjaan/usaha dari satu pekerjaan/usaha satu ke usaha lainnya. Pada awal pemantauan ini teridentifikasi sekitar 6,7% peserta PKKPM yang disurvei mengaku pernah berusaha beralih pekerjaan meski hasilnya belum memberikan perubahan berarti bagi kehidupan mereka.

Namun demikian, keberadaan PKKPM ternyata telah memberikan rangsangan tersendiri bagi para peserta PKKPM untuk membuka usaha baru atau bekerja pada sektor yang sebelumnya belum pernah mereka geluti sama sekali. Dari sebanyak 58 peserta PKKPM, sekitar 44,8% diantaranya merupakan peserta yang membuka usaha baru atau bekerja dengan keahlian yang sebelumnya tidak mereka miliki (sopir). Ide usaha baru ini umumnya muncul setelah para peserta PKKPM mendapatkan pengarahan dari para fasilitator ataupun setelah mendapatkan pelatihan usaha sehingga para peserta ini benar-benar beralih dari pekerjaan sehari-hari mereka sebelumnya atau mereka yang pernah membuka usaha tertentu namun telah lama ditinggalkan/berhenti dengan berbagai alasan dan membukanya kembali setelah ada bantuan modal dari PKKPM. Jenis usaha yang umumnya dipilih sebagai sumber pendapatan baru para peserta PKKPM diantaranya adalah usaha produksi makanan/minuman (kue, keripik, warung kopi, dll), sebagian kecil usaha ternak kambing ataupun ternak ayam.

Kegembiraan terpancar dari sebagian peserta PKKPM yang usahanya berhasil berjalan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka. Beberapa peserta PKKPM merupakan ibu rumah tangga yang awalnya mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga (memasak, merawat anak, dll), kini mampu membuka usaha di rumahnya dan membantu penghasilan suaminya sehingga mereka bisa membiayai uang jajan anak-anaknya, dll. Bahkan ada juga peserta yang semula menganggur, namun setelah mereka bergabung dan mendapatkan bantuan modal dari PKKPM kini mereka memiliki kesibukan baru dan menghasilkan pendapatan. Beberapa tanggapan peserta PKKPM setelah mereka memiliki usaha sebagai sumber pendapatan baru, sebagai berikut:

“Waktu pertemuan kelompok, Bu Fatin (fasilitator kecamatan) pernah cerita tentang usaha, saya jadi tertarik untuk usaha bersama suami. Alhamdulillah, sekarang saya tidak lagi menjadi buruh cuci, suami saya juga berhenti jadi buruh bangunan. Sekarang kami punya usaha sendiri. Lebih enak dan lebih banyak waktu bersama anak-anak” (Pita, KPB Sukarame, Desa C1. Usaha kue-kue dan ayam goreng “kentucky”).

“Saya cuma buruh tani pak, ya syukur dengan program ini saya bisa jadi nambah penghasilan keluarga. Dengan modal usaha dari P2B saya gunakan untuk beternak kambing. Ya semoga programnya tetap dilanjutkan pak” (Tamrin, Laki-laki, Desa D1).

“Kalau yang biasanya saya hanya pekerja serabutan, dengan adanya program ini, saya bisa usaha ternak ayam di rumah dan hasilnya bisa tabung dengan ilmu simpan pinjam di kelompok” (Gusti, Laki-laki, Desa D1).

“..... Ada anggota yang berhasil, ada peningkatan setelah mendapatkan pelatihan dan modal pinjaman, contohnya salah satu anggota yang awalnya pengangguran saat ini memproduksi keripik” (Peserta FGD masyarakat miskin, Desa B1).

Selain pada jenis usahanya, beberapa peserta PKKPM ada yang menjalankan usaha yang semula sendiri (sebelum ada PKKPM) sekarang bergabung dalam usaha kelompok. Mereka lebih memilih berkelompok diantaranya karena bisa menghimpun modal pinjaman yang lebih besar sehingga skala usaha yang dijalankan lebih luas juka karena bisa bekerja sama (berbagi tugas) termasuk kerja sama dalam menanggung resiko kerugian. Dari persentase peserta PKKPM yang melakukan usaha baru di atas (44,8%), sekitar 26% diantaranya menjalankan usaha baru dan berkelompok.

6.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan

Selain munculnya usaha/kerja baru, setelah adanya program PKKPM cukup banyak usaha-usaha yang telah dijalankan oleh peserta PKKPM yang menjadi lebih besar skala usahanya, baik usaha yang bertambah produksinya, bertambah variasi produknya, ataupun keduanya (bertambah produksi dan variasi produknya). Dari 58 peserta PKKPM yang disurvei²⁵, sebesar 53,4% diantaranya menggunakan pinjaman BLM untuk menambah modal usaha yang telah dijalankan sejak sebelum bergabung di PKKPM. Jenis usaha yang dilakukan ini umumnya berupa usaha pertanian, peternakan (kambing/sapi), budidaya perikanan serta beberapa diantaranya usaha berbagai jenis makanan ringan.

Sebelum bergabung dengan PKKPM, tidak sedikit dari para peserta PKKPM yang berkeinginan memiliki usaha yang lebih besar. Namun hal ini sulit diwujudkan karena ketiadaan modal dan kesulitan akses terhadap pinjaman dari lembaga keuangan formal. Karenanya, setelah bergabung dengan PKKPM, khususnya setelah mendapatkan berbagai pelatihan dan dana pinjaman BLM, mereka merasa harus memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai titik awal meningkatkan kapasitas usahanya. Sebagian peserta PKKPM menjadi semakin semangat dan yakin akan kesuksesannya di masa mendatang setelah mendapatkan pelatihan manajemen usaha. Sekarang mereka menjadi tahu bahwa pengelolaan usaha memerlukan perhitungan yang cermat. Seorang peserta PKKPM di Desa B1, misalnya, yang melakukan usaha jual-beli kelapa menyatakan telah mengaplikasikan hasil pelatihan manajemen usaha. Yakni mulai dari perencanaan usaha hingga keberanian mengambil resiko. Setelah ikut pelatihan, responden mulai menerapkan strategi-strategi baru dalam berusaha (membeli telepon genggam, membuat kartu nama, dll). Hasilnya, kini peserta PKKPM tersebut telah memiliki pemasok dan pangsa pasar kelapa yang lebih luas dan jumlah penjualan kelapa yang jauh lebih besar. Sebagai hasilnya responden menyatakan *“sekarang hidup saya dengan istri saya menjadi lebih tenang, Bu, karena penghasilan saya sudah lebih baik...”* (Pak Galuh, laki-laki, Desa B1).

Hal yang sama juga dialami oleh Bu Yayah (Desa B1) yang berhasil meningkatkan pendapatan melalui peningkatan skala usaha dan penganekaragaman jenis kue yang diproduksi. Jika semula Bu Yayah hanya mampu membuat 2 jenis kue (dadar gulung dan bakpao), setelah mendapatkan pelatihan PKKPM, Bu Yayah mampu membuat 4 jenis kue baru (tahu isi, onde-onde, risoles, bolu kukus).

²⁵Studi HH sebanyak 30 responden dan 28 responden pemantauan usaha

Namun demikian, tidak semua peserta PKKPM mengalami keberhasilan seperti 2 contoh kisah sukses tersebut. Bu W (Desa C1) misalnya mengalami penurunan omset produksi karena kalah bersaing dengan produsen/pedagang lainnya. Akibatnya pendapatan penjualannya menurun. Meskipun demikian, Bu W tidak putus asa, ia berencana untuk terus berusaha dengan cara, "... *terus mencoba bagaimana supaya kuenya bisa sama dengan produksi orang lain*".

6.3.3 Tabungan

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sebelum ada program PKKPM hanya sekitar 20% saja yang mengaku memiliki tabungan (dari 30 sampel peserta PKKPM). Setelah adanya PKKPM dan terbentuk kelompok, seluruh peserta memiliki tabungan (100%). Namun pada periode akhir pemantauan, jumlah peserta yang memiliki tabungan menurun menjadi 90% (Tabel 43). Hal ini terjadi karena ada sebagian anggota kelompok yang telah mengambil tabungannya terutama menjelang hari raya Idul Fitri (Juni-Juli 2015). Selain itu ada yang mengambil seluruh tabungannya karena kegiatan pertemuan rutin di kelompoknya sudah tidak aktif.

Tabel 43. Kondisi Sebelum dan Sesudah PKKPM Terkait Tabungan

Indikator	Kondisi sebelum/sesudah ada PKKPM	
	sebelum	sesudah
1. Kepemilikan tabungan anggota	20,0	90,0
2. Tempat menabung:		
a. Rumah	66,7	7,4
b. Sekolah	16,7	3,7
c. Bank/lembaga keuangan lain	16,7	7,4
d. KPB-PKKPM	0,0	100,0

Sumber: Data primer pemantauan

Sebelum ada program PKKPM, sebagian besar (66,7%) anggota PKKPM menyimpan uang tabungannya di rumah, sisanya yaitu sekitar 16,7% anggota menyimpan di sekolah anak-anak mereka dan di bank/lembaga keuangan lain. Di rumah, biasanya mereka menyimpan uangnya dalam celengan atau hanya diselipkan dibalik bantal atau di sela-sela dinding (bilik) rumahnya. Beberapa peserta PKKPM yang diwawancarai menyatakan bahwa dengan menyimpan uang di rumah (celengan/dibalik bantal/sela-sela dinding) terkadang uang yang mereka simpan menjadi tidak utuh karena terpakai untuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting atau diambil oleh anak-anak mereka untuk jajan. Hal ini seringkali membuat uang tabungan mereka sulit terkumpul. Namun, setelah ada PKKPM sebagian besar anggota PKKPM mengalihkan uang yang disimpannya di rumah ke KPB-nya masing-masing. Selain diwajibkan, menabung di KPB dirasa lebih aman, dananya terkelola karena ada pencatatannya dan anggota KPB menjadi lebih termotivasi karena anggota lain juga menabung. Mereka juga tidak kesulitan untuk mengambil tabungannya jika sewaktu-waktu membutuhkan uang untuk keperluan mendadak, khususnya untuk tabungan sukarela. "*Sebelum ada P2B, saya tidak pernah bisa menabung. Kalaupun bisa menabung, pasti langsung terpakai kalau ada kebutuhan. Sekarang, setelah ada dan bergabung dengan P2B, saya bisa menabung untuk masa depan anak-anak*" (Bu W, Desa D1).

Tabel 44. Penggunaan Dana Tabungan Peserta PKKPM Sebelum dan Sesudah Keberadaan PKKPM

Jenis penggunaan	Penggunaan Dana Tabungan	
	Sebelum PKKPM (%)	Setelah PKKPM (%)
Belanja kebutuhan hari raya	16,7	23,8
Membeli ternak/modal usaha	16,7	14,3
Persiapan pernikahan	16,7	0,0
Bayar ijazah dan seragam sekolah	16,7	0,0
Persiapan membayar pinjaman KPB-P2B	0,0	28,6
Persiapan kebutuhan mendesak/tidak terduga	0,0	19,0
Belum tahu	33,3	14,3

Sumber: Data primer pemantauan

Hasil pelatihan manajemen keuangan keluarga menunjukkan bahwa peserta program saat ini telah memiliki pola penggunaan uang tabungan yang lebih terencana. Tabel 44 menunjukkan sebelum ada PKKPM, mereka cenderung tidak memiliki tujuan khusus penggunaan tabungan. Hal ini terlihat dari persentase jawaban “belum tahu” sebesar 33,3%. Setelah ada PKKPM, para peserta menjadi lebih terencana dalam penggunaan uang tabungan, seperti tercermin dari proporsi jawaban “belum tahu” yang turun menjadi 14,3%.

6.3.4 Akses Terhadap Pinjaman

Keberadaan program PKKPM melalui kelompok di setiap lokasi sampel telah memberikan kemudahan akses anggota terhadap pinjaman. Pada periode awal pemantauan, lembaga pinjaman yang banyak diakses oleh para peserta PKKPM ini (sampel 30 orang) adalah KPB (73%), sumber lainnya terutama warung (50%), dan saudara/tetangga (40%). Pada periode akhir pemantauan, peran KPB terlihat semakin penting dengan jumlah anggota yang mengakses untuk meminjam meningkat menjadi 93%. Sementara peran warung dan saudara/tetangga semakin berkurang menjadi sebesar masing-masing 43% dan 37%. Yang juga menggembirakan, anggota KPB yang mengakses pinjaman ke lembaga informal terutama rentenir menjadi 0% (Tabel 45). Hal ini karena para anggota KPB merasa meminjam di KPB lebih mudah dan KPB sangat memprioritaskan kebutuhan anggotanya.

Tabel 45. Lembaga Pinjaman yang Diakses Peserta PKKPM

Sumber Pinjaman	Lembaga pinjaman yang diakses (% orang)	
	Q1	Q3
Bank/BPR	10,0	10,0
Koperasi/LKM	10,0	3,3
Pegadaian	0,0	0,0
Lembaga leasing	3,3	3,3
KPB-PKKPM	73,3	93,3
Program Pemerintah lainnya	0,0	0,0
Lembaga informal (rentenir, arisan, dll)	3,3	0,0
Saudara/tetangga	40,0	36,7
Sumber lainnya (mis. Warung, toke/juragan, dll)	50,0	43,3

Sumber: Data primer pemantauan

Kemudahan mengakses pinjaman setelah ada program PKKPM sangat jelas terlihat dari beberapa pernyataan anggota KPB berikut:

“Sekarang enak, butuh uang tinggal pinjam di kelompok KPB. Dulu mau pinjam ke tetangga susah dan belum tentu ada” (Pak S, laki-laki, Desa C1).

“Alhamdulillah, programnya sangat bermanfaat pak karena dapat modal usaha. Selain itu, di kelompok juga ada simpan pinjam, jadi kalau kepepet perlu uang untuk anak sekolah bisa pinjam di kelompok, nanti pengembaliannya diangsur” (Bu Tulip, perempuan, Desa A1).

“...Yang paling penting itu simpan pinjam anggota. Namanya orang di kampung, hidup tidak mesti. Kalau ada simpan pinjam kayak gini jadi mudah” (Bu Kemuning, perempuan, Desa D1).

Keberadaan KPB yang memudahkan akses pinjaman bagi anggota telah menginspirasi satu KPB di Desa B1 yang berencana menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat nonanggota KPB. Untuk kegiatan KPB menggunakan dana 10% uang pinjaman BLM yang disimpan di kelompok. Tujuan kegiatan ini utamanya adalah agar ketergantungan masyarakat terhadap sumber pinjaman dari rentenir menjadi berkurang. Kutipan berikut menegaskan niat KPB untuk membantu masyarakat non anggota:

“Kami menginginkan agar lebih besar lagi memberikan pinjaman kepada masyarakat di luar anggota kelompok. Selama ini banyak rentenir yang kasih pinjaman kepada masyarakat, bunga tinggi sampai 20%. Sekarang ini “KPB X” sudah meminjamkan dana dari 10% dana pinjaman anggota dari P2B yang disimpan di kelompok, tapi masih sedikit yang bisa dipinjami...” (Ketua KPB, Desa B1).

VII. CATATAN PENUTUP

Penurunan angka kemiskinan yang melambat mendorong Bappenas untuk menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan integratif. Pada 2014, Bappenas mengujicoba salah satu strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui PKKPM di Jawa Tengah. Pemberdayaannya berfokus pada pengembangan aset sosial, aset SDM, dan aset keuangan karena secara umum masyarakat miskin mempunyai keterbatasan dalam ketiga aset itu. Melalui ujicoba dengan pembentukan KPB, anggota mendapat pendampingan, pelatihan, dan pinjaman modal usaha/penyaluran kerja.

Lembaga Penelitian SMERU menjadi pemantau eksternal atas proses ujicoba tersebut. Tujuannya adalah mendapatkan informasi tepat waktu bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. Terdapat 6 isu pokok yang dipantau, yaitu (i) persiapan yang meliputi verifikasi calon peserta dan sosialisasi program, (ii) dinamika aktivitas KPB, terutama kegiatan pertemuan dan menabung rutin, (iii) rencana usaha/kerja, berupa pembuatan proposal dan pelatihan, (iv) distribusi, penggunaan dan pengembalian pinjaman, (v) pelaksanaan usaha dan penyaluran kerja, dan (vi) peningkatan kapasitas peserta program, terutama perubahan perilaku mereka.

7.1 Kesimpulan

Hasil pemantauan intensif pelaksanaan program ini sejak September 2014 hingga Juli 2015 menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Secara umum disain program PKKPM untuk memberdayakan masyarakat miskin dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, mengingat PKKPM di Jateng merupakan program ujicoba, maka dalam teknis pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya mampu memenuhi standar pelaksanaan sesuai dengan PTO.
- b. Tantangan dan hambatan pelaksanaan PKKPM pada 2014 antara lain mencakup aspek-aspek berikut ini:
 - i. Kegiatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan belum mampu menyeragamkan pemahaman dan belum mampu secara penuh mengubah paradigma pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - ii. Verifikasi calon anggota KPB cenderung bersifat formalitas sehingga peserta program tidak seluruhnya merupakan masyarakat miskin yang paling memerlukan pemberdayaan.
 - iii. Kegiatan pelatihan FKab, FK, maupun KPMD belum sepenuhnya efektif mentransformasikan prinsip-prinsip dasar PKKPM ke dalam kegiatan operasional di lapangan.
 - iv. Kegiatan pendampingan kepada KPB belum optimal, antara lain karena pendamping kurang kreatif sehingga proses pendampingan cenderung berlangsung secara monoton. Kondisi demikian berakibat antara lain para anggota KPB merasa bosan mengikuti kegiatan pertemuan rutin.
 - v. Menjelang akhir 2014, berakhirnya program PNPM Perdesaan berimbas pada berkurangnya intensitas pendampingan FKab maupun FK kepada PKKPM. Pada

periode Januari-awal April 2015, praktis pelaksanaan pilot PKKPM di lapangan berlangsung tanpa disertai KPMD. Akibatnya, banyak jadwal kegiatan program yang terpaksa mundur.

- vi. Keberlangsungan pendampingan Pilot PKKPM 2014 pada 2015 cenderung kurang intensif. Hal ini terjadi karena FK dan KPMD cenderung sibuk melaksanakan PKKPM tahun anggaran 2015. KPB yang terbentuk pada 2014 cenderung terabaikan, padahal mereka tetap sangat memerlukan pendampingan intensif dalam menjalankan kegiatan kelompok.
 - vii. Sebagian besar usaha anggota KPB telah memperoleh keuntungan, sebagian kecil mengalami kerugian, dan sebagian lainnya belum teridentifikasi karena merupakan usaha yang hasilnya baru terlihat dalam jangka relatif panjang.
 - viii. Kendala utama dalam berusaha adalah kesulitan memperluas pasar karena keterbatasan anggota KPB dalam meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, kemampuan membangun relasi bisnis, negosiasi dan promosi.
 - ix. Anggota KPB yang memilih opsi penempatan kerja belum satupun yang terealisasi disebabkan PKKPM belum secara sistematis melakukan upaya memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Pelaksanaan Pilot PKKPM 2014 belum terkoordinasikan dengan baik. Lembaga yang seharusnya mengawal pelaksanaan program dari pusat sampai desa belum bekerja maksimal. Indikasinya antara lain pemerintah daerah/dinas terkait tidak memberikan dukungan penuh dalam memfasilitasi pengembangan usaha dan atau penempatan kerja.
- d. Tantangan pelaksanaan PKKPM yang memerlukan perhatian serius adalah menyangkut keberlangsungan pendampingan. Hal ini penting karena anggota KPB setelah memasuki tahapan pelaksanaan usaha tetap memerlukan pendampingan intensif, terutama dalam hal peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar.
- e. Tujuan program pemberdayaan masyarakat miskin yang paling esensial adalah mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak peserta program dan hal ini memerlukan waktu lama. Meskipun demikian, PKKPM yang baru berlangsung satu tahun telah menunjukkan beberapa indikasi capaian hasil awal yang positif. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
- i. Perubahan Kapasitas Modal SDM: Selain mampu meningkatkan ketrampilan vokasional, PKKPM antara lain telah mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta program untuk mengembangkan potensinya dalam meraih kesejahteraan yang lebih baik.
 - ii. Muncul beberapa perubahan perilaku peserta PKKPM, antara lain, berupa kemauan untuk menabung, peningkatan disiplin kerja, pola penggunaan anggaran rumah tangga yang lebih terencana, serta keinginan keras untuk meningkatkan pendapatannya.
 - iii. Sistem kerja kelompok dalam PKKPM telah meningkatkan kekerabatan dan memperkuat kerjasama dan gotong royong serta perluasan jaringan.
 - iv. Melalui pelatihan vokasional, kegiatan interloaning dan penyediaan pinjaman BLM, peserta program mendapatkan peningkatan akses terhadap sumber permodalan yang memungkinkan mereka untuk membuka usaha baru dan atau melanjutkan/meningkatkan skala usaha yang telah mereka jalankan sebelumnya.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kelemahan teknis pelaksanaan Pilot PKKPM pada 2014 yang ditemukan melalui pemantauan internal dan eksternal, dalam pelaksanaan PKKPM 2015, pemerintah telah berupaya memperbaikinya. Berbagai aspek disain dan pelaksanaan PKKPM 2015 yang telah dan disarankan untuk diperbaiki Antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pelatihan Fkab/FK

- i. Penggantian pelatih: hasil penilaian partisipatif oleh peserta menyimpulkan bahwa pelatih pada 2014 kurang baik dalam aspek penguasaan materi maupun metode pelatihan. Oleh karena itu, pada 2015 ini semua pelatih tersebut diganti dengan pelatih baru.
- ii. Metode pelatihan: pada 2014 pelatihan lebih banyak menggunakan metode pengajaran satu arah dan kurang memberikan waktu intereraksi baik antarpeserta maupun antara pelatih dengan peserta. Metode ini kurang efektif sebagai metode pembelajaran. Pada 2015, metode pelatihan lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi pelatihan secara interaktif.
- iii. Durasi waktu dan materi pelatihan: hasil pemantauan 2014 menunjukkan bahwa durasi pelatihan tahap I yang berlangsung 3 hari terlalu singkat, sehingga membuat pemahaman peserta kurang komprehensif. Pada 2015 durasi pelatihan tahap I berlangsung 5 hari. Materi pelatihan perlu menyediakan porsi yang lebih besar pada topic mengenai kewirausahaan.

2. Jumlah dan jenis FK

Pada 2014 FK hanya terdiri dari FK Pemberdayaan dan FK Teknik. Keberadaan 2 FK ini kurang mampu menangani PKKPM secara baik. Pada 2015 FK di tingkat kecamatan ditambah satu orang dengan keahlian khusus yakni FK Perguliran dan Pendampingan Usaha (PPU). Keberadaan FK PPU ini lebih sesuai dengan kebutuhan program yang antara lain menekankan pada aspek kegiatan usaha para peserta program.

3. Jumlah, pelatihan, dan kinerja KPMD

- i. Pada 2014, jumlah kelompok yang menjadi dampingan KPMD bervariasi antardesa sehingga efektivitasnya juga bervariasi. Untuk mengurangi kesenjangan efektivitas pendampingan, maka pada PTO 2015 dibuat patokan seragam mengenai jumlah kelompok yang dapat didampingi KPMD.
- ii. Pada 2014, tidak semua kelompok didampingi oleh KPMD yang sudah mendapatkan pelatihan. Sebagian kelompok bahkan didampingi oleh TPK dan kader dusun yang tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang metode pendampingan kelompok. Pada 2015 hal ini tidak akan terjadi lagi karena kelompok hanya akan mendapatkan pendampingan dari KPMD yang telah mendapat pelatihan.
- iii. Berdasarkan hasil *scorecard*, sebagian KPMD menunjukkan kinerja yang buruk. Pada 2015, KPMD yang kinerjanya buruk telah digantikan oleh tenaga lain yang berpotensi mampu bekerja lebih baik.

4. Kinerja Fkab dan FK

FKab dan FK di salah satu lokasi ujicoba PKKPM 2014 yang menunjukkan kinerja buruk, pada 2015 langsung diganti dengan tenaga pelaksana program yang baru.

5. Keanggotaan kelompok

- i. Pada 2014 keanggotaan kelompok KPB bersifat terbuka, baik laki-laki maupun perempuan bebas menjadi anggota KPB. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keanggotaan laki-laki tidak efektif karena, misalnya, lebih sering tidak hadir dalam pertemuan rutin. Berdasarkan hal ini, dalam PTO yang baru dinyatakan bahwa keanggotaan KPB hanya untuk kaum perempuan. Keanggotaan laki-laki pada PKKPM hanya dibolehkan pada kelompok usaha yang merupakan *business arm* KPB.
- ii. Pada 2014, penyeleksian anggota KPB tidak sepenuhnya sesuai kriteria sasaran. Hal ini terjadi antara lain karena proses penyeleksiannya tidak seragam dan tidak sepenuhnya menganut prinsip partisipatif. Ada yang melakukan proses penyeleksian di tingkat desa dan ada yang di tingkat dusun. Berdasarkan hal ini, untuk menjamin obyektivitas kriteria peserta, pada 2015 proses penyeleksian akan dimulai dari tingkat dusun dan verifikasi status miskin rumah tangga calon peserta dilakukan melalui musyawarah partisipatif para pemangku kepentingan yang relevan..

6. Kegiatan rutin pertemuan kelompok

Pada 2014 kegiatan pertemuan rutin kelompok dan kehadiran anggota dalam pertemuan rutin cenderung menurun dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkannya adalah kebosanan anggota karena tidak adanya kegiatan lain selain menyetorkan tabungan atau membayar angsuran pinjaman *interloaning*. Berdasarkan hal ini, pada 2015 kegiatan pertemuan rutin kelompok akan diisi dengan berbagai kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan anggota tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Pelaksana program baik di pusat maupun di daerah akan bekerjasama dengan berbagai dinas terkait untuk memberikan kegiatan pada acara pertemuan rutin kelompok.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel A.1. Korelasi Variabel: Kehadiran Pengurus – Kehadiran Anggota

Kecamatan	Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	0.909	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan B	0.961	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	0.719	Kuat	Positif	Sig
Kecamatan E	0.952	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	0.713	Kuat	Positif	Sig
Kecamatan D	0.979	Sangat kuat	Positif	Sig
Total	0.926	Sangat kuat	Positif	Sig

Sumber: Data Primer pemantauan

LAMPIRAN 2

Tabel A.2. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Pelaksanaan Pertemuan Rutin

Kecamatan	Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	0.2784	Lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan B	0.9222	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	0.1667	Sangat lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan E	0.8154	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	0.4286	Sedang	Positif	Sig
Kecamatan D	0.3797	Lemah	Positif	Sig
Total	0.5748	Sedang	Positif	Sig

Sumber: Data Primer pemantauan

LAMPIRAN 3

Tabel A.3. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Kehadiran Anggota

Kecamatan	Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	0.3056	Lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan B	0.9602	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	0.1070	Sangat lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan E	0.8158	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	0.5381	Sedang	Positif	Sig
Kecamatan D	0.2972	Lemah	Positif	Tidak sig
Total	0.5903	Sedang	Positif	Sig

Sumber: Data Primer pemantauan

LAMPIRAN 4

Tabel A.4. Korelasi Variabel: Kehadiran KPMD dengan Kehadiran Pengurus

Kecamatan	Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	0.5444	Sedang	Positif	Sig
Kecamatan B	0.8553	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	-0.6124	Kuat	Negatif	Sig
Kecamatan E	0.7720	Kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	0.2017	Lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan D	0.2878	Lemah	Positif	Tidak sig
Total	0.5826	Sedang	Positif	Sig

LAMPIRAN 5

Tabel A.5. Korelasi Variabel: Pertemuan Rutin – Jumlah Anggota yang Menabung

Kecamatan	Koefisien Korelasi	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	0.8741	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan B	0.9312	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	0.7725	Kuat	Positif	Sig
Kecamatan E	0.9620	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	-0.3447	Sangat lemah	Negatif	Tidak sig
Kecamatan D	-0.3447	Sangat lemah	Negatif	Tidak sig
Total	0.8487	Sangat kuat	Positif	Sig

LAMPIRAN 6

Tabel A6. Korelasi Variabel: Pertemuan Rutin – Jumlah Uang Tabungan Anggota

Kecamatan	Koefisien Korelasi Variabel:	Tingkat Korelasi	Arah Korelasi	Signifikansi
Kecamatan C	-0.3240	Lemah	Negatif	Tidak sig
Kecamatan B	0.9710	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan A	0.7490	Kuat	Positif	Sig
Kecamatan E	0.8087	Sangat kuat	Positif	Sig
Kecamatan F	0.3313	Lemah	Positif	Tidak sig
Kecamatan D	0.8961	Sangat kuat	Positif	Sig
Total	0.5183	Sedang	Positif	Sig

LAMPIRAN 7

Modal Sosial Rendah, Studi Kasus Rumah tangga Ibu Harum, Anggota KPB “Tani Sukses”, Desa F4, Kecamatan F, Kabupaten Pekalongan.

Ibu Harum adalah seorang janda, tidak tamat SD, menjadi anggota KPB “Tani Sukses” di dukuh Kumenyep RT 11/RW 04 Desa F4. Ibu Harum hanya hidup berdua dengan anak perempuannya yang masih SD. Anak-anaknya yang lain sudah menikah dan tinggal di desa lain. Kondisi rumah yang ditinggalinya buruk, sempit dan kotor. Hanya dinding tembok teras rumah saja yang masih bagus. Selain rumah yang merupakan warisan suaminya, aset lain yang berharga hanya berupa 2 ekor ayam peliharaan.

Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Harum mengandalkan pendapatannya dari upah sebagai buruh tani (matun kentang) sebesar 15.000 per hari dan uang kiriman anaknya yang telah menikah sekitar Rp200,000/bulan. Sebagai buruh tani, Ibu Harum tidak selalu mendapatkan pekerja setiap hari sepanjang tahun. Hal ini tergantung musim tanam, sehingga ada kalanya Ibu Harum tidak bekerja selama beberapa minggu dalam satu siklus musim tanam. Selain sebagai buruh tani, Ibu Harum tidak mempunyai ketrampilan lain yang bisa mendatangkan pendapatan.

Lokasi Desa F4 tergolong terpencil dan akses transportasi dengan dengan desa lainnya agak sulit, baik karena aspek topografi maupun karena ketersediaan transportasi umum yang sangat terbatas. Keterpencilan lokasi desa ini mengakibatkan interaksi sosial Ibu Harum, juga warga lain umumnya, hanya terbatas pada lingkungan sekitar tetangganya saja. Keberadaan organisasi masyarakat atau sosial setempat juga kurang berkembang.

Sebelum bergabung dengan program PKKPM, satu-satunya organisasi sosial) yang diikuti Ibu Harum adalah Kelompok Yasinan yang biasanya mengadakan pengajian tiap bulan. Sifat perkumpulan keagamaan demikian umumnya memang hanya terbatas pada kegiatan pengajian. Tidak ada kegiatan lainnya, misalnya kegiatan peningkatan ketrampilan anggota atau kegiatan lain yang terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas SDM atau ekonomi keluarga. Oleh karena itu, meskipun keanggotaan perkumpulan ini umumnya heterogin dan mempunyai jadwal pertemuan rutin, interaksi antaranggota tidak dimanfaatkan untuk tujuan lainnya.

Pola interaksi sosial Ibu Harum yang monoton dan telah berlangsung lama, membuat pola berfikir dan pola bertindaknya tanpa “greget”. Ibu Harum hanya menjalani kehidupannya secara rutin: mengurus rumah, anaknya, dan kemudian memburuh tani (jika ada). Ibu Harum tidak mempunyai upaya merubah rutinitas kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih dinamis, yang lebih memungkinkannya meraih standar kehidupan yang lebih baik.

Kelompok PKKPM yang diikuti oleh Ibu Harum, yang secara sengaja dibentuk untuk mendinamiskan kehidupan anggotanya melalui berbagai pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sepertinya juga belum sepenuhnya mampu merubah pola berfikir dan pola bertindaknya. Indikasinya antara lain tercermin dari kegiatannya menabung di kelompok yang semata-mata dilatari oleh “*ikut teman-teman yang lain saja*”. Lebih jauh, Ibu Harum mengikuti program ini bukan karena kemauannya sendiri. Ibu Harum ikut program ini karena namanya tercantum dalam daftar BDT sehingga memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan diharuskan oleh elit desa untuk mengikutinya. Oleh karena itu kesertaannya di kelompok PKKPM tidak didasarkan pada kesadaran bahwa program ini merupakan salah satu pintu masuk untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kesejahteraannya.

Fenomena seperti yang terjadi pada Ibu Harum sebenarnya bukan merupakan kasus yang unik. Masyarakat miskin kronis umumnya, yang telah menjalani kemiskinan dalam kurun waktu lama, umumnya mempersepsikan dirinya sendiri *powerless*. Mereka merasa tidak berdaya, merasa eksistensinya tidak penting, dan lebih dari itu mereka juga merasa kemiskinan yang dialaminya merupakan takdir.

Terkait dengan hal itu, upaya yang dilakukan program PKKPM untuk “membangunkan” mereka melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan modal sosial melalui pengelompokan dan perluasan jaringan sosial dan sebagainya, tentu tidak serta merta mampu memberikan dampak positif. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya yang *heavy process* dan membutuhkan waktu yang tidak pendek. Kerja keras semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ini menjadi keharusan. Utamanya dalam mendampingi mereka untuk menumbuhkan sikap percaya diri dalam meraih peluang mendapatkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

LAMPIRAN 8

Kegiatan Menabung: Kasus Ibu Kamelia, anggota KPB “Sendang Putih”, Desa C1, Kecamatan C, Kabupaten Pemalang

Ibu Kamelia tinggal di rumah miliknya sendiri bersama suami dan seorang anaknya berusia 11 tahun. Namun, rumah ini tidak dibangun di atas lahannya sendiri, melainkan di atas lahan pinjaman sehingga jika suatu saat pemilik lahan ingin menggunakannya maka keluarga Ibu Kamelia harus pindah. Suami Ibu Kamelia, Pak Mawardi, adalah seorang penarik perahu penyeberangan sungai di Jakarta dengan penghasilan tidak tetap. Pekerjaan ini juga tidak penuh waktu karena harus bergantian dengan dua teman kerjanya, sehingga dalam sebulan dia hanya kerja 10 hari. Di waktu tidak mendapat giliran menarik perahu biasanya Pak Mawardi pulang ke desanya dan bekerja sebagai petani bagi hasil dan pencari ikan di sungai.

Kegiatan keseharian Ibu Kamelia adalah membantu pekerjaan suaminya bertani dan juga menjadi buruh tani. Secara rata-rata penghasilan keluarga ini sekitar Rp1.725.000 per bulan, sementara pengeluaran konsumsi rutinnya berkisar Rp1.646.000 per bulan. Selain itu, keluarga ini juga harus membiayai pengeluaran non-rutin untuk biaya pendidikan, kesehatan, sandang, dan lain-lainnya..

Secara teoritis, keluarga tersebut hanya hidup pas-pasan dan pada saat tertentu bahkan mengalami defisit (tidak jarang yang bersangkutan meminjam di warung atau saudara untuk mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari). Oleh karena itu, sangat sulit bagi Ibu Kamelia untuk mampu menabung dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum menjadi anggota PKKPM, jika pada hari tertentu ada uang yang tersisa, uang tersebut hanya ditaruh di tiang bambu yang ada di dinding rumahnya dan setiap saat bisa diambil jika dibutuhkan, seperti terungkap dalam pernyataannya:

“Ari langka PNPM, ora mungkin bisa nabung. Biasane duit didelah ning kene (sambil menunjuk bambu di dinding), bisa dijikot kapan bae. Lamun ditabung ning PNPM ora bisa dijikot-jikot maning” (Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “Kalo tidak ada PNPM, tidak mungkin bisa menabung. Biasanya uang (yang tidak habis terpakai) ditaruh di sini (sambil menunjuk bambu di dinding), bisa diambil kapanpun mau. Kalo ditabung di PNPM tidak bisa diambil-ambil”)

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa sebelum menjadi anggota PKKPM, Ibu Kamelia tidak mampu dan atau tidak mempunyai kebiasaan menabung. Hal ini tercermin dari pernyataannya:

“Sebelum ada kelompok ini gak ada kegiatan tabungan mbak. Kalo nabung ke bank cuma Rp5000 kan gak pantes. Kalo sekarang kan sedikit-sedikit bisa nabung ke kelompok.”

Kutipan tersebut juga menggambarkan bahwa sebagian masyarakat miskin sebenarnya juga mempunyai kesadaran untuk menabung. Jika selama ini mereka terpaksa tidak menabung, selain karena kecilnya surplus pendapatan (jika ada) untuk ditabung, juga karena mereka mengalami hambatan akses. Tidak ada lembaga (sebelum adanya PKKPM) yang secara efektif dan efisien memberikan akses yang mudah dan murah bagi orang miskin seperti Ibu Kamelia untuk menabung.

Melalui kelompok PKKPPM, Ibu Kamelia sekarang mempunyai akses yang mudah melaksanakan kegiatan tabungan karena ada wadah yang bisa menampung tabungan rumah tangga miskin sesuai kemampuannya. Berdasarkan pembukuan di tabungan kelompok, Ibu Kamelia ternyata tidak hanya secara rutin menyetor tabungan pokok saja, tetapi juga melakukan tabungan sukarela. Sampai dengan 21 April 2015, jumlah tabungan pokoknya sebesar Rp68,000 dan tabungan sukarelanya Rp237,000 sehingga total tabungannya sebesar Rp305,000.

LAMPIRAN 9

Meminjam Sebagai *Coping* Strategi Masyarakat Miskin, Studi Kasus Rumah Tangga, Ibu Kemuning, Anggota KPB “Cempaka”, Desa E1, Kecamatan E, Pekalongan.

Ibu Kemuning merupakan anggota KPB Cempaka di dukuh Bojongireng kidul RT 02 RW 01, Desa E1. Dia menempati rumah sendiri yang sederhana dengan ukuran 60 m² bersama anak dan menantunya. Suaminya bekerja di Jakarta dan sangat jarang pulang, namun rutin mengirimkan uang ke Ibu Kemuning.

Pendidikan ibu Kemuning tamat SD dan sehari-hari bekerja sebagai petani yang menggarap kebunnya sendiri (teh dan pisang) seluas seperempat hektar. Secara rata-rata total pendapatan rumahtangga ini sekitar Rp1,164,000 per bulan dan pengeluarannya rata-rata sekitar Rp1,314,000 per bulan. Akibatnya, setiap bulan rumahtangga ini rata-rata mengalami defisit. Menghadapi kondisi demikian, seperti masyarakat miskin umumnya, responden terpaksa melakukan pinjaman untuk mencukupi belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber pinjaman yang biasa menjadi “langganan” Ibu Kemuning adalah warung (tempat menjual sembako) dalam bentuk natura. Artinya, jika responden tidak mempunyai uang dan misalnya sedang membutuhkan beras, maka dia datang ke warung tersebut untuk meminjam beras. Pembayarannya dilakukan nanti kalau responden sudah memiliki uang. Selain ke warung, Ibu Kemuning juga biasa meminjam uang ke saudara/famili. Baik pinjam ke warung atau ke famili, mekanismenya semata-mata hanya didasarkan pada kepercayaan, sehingga tidak ada syarat lainnya. Jumlah pinjaman demikian umumnya juga tidak besar, tetapi sekedar untuk mencukupi kebutuhan harian saja.

Kegiatan peminjaman yang dilakukan oleh Ibu Kemuning, khususnya ke warung, masih terus berlangsung meskipun yang bersangkutan telah menjadi anggota kelompok PKKPM yang juga menyediakan fasilitas pinjaman. Di kelompok ini, Ibu Kemuning juga aktif melakukan peminjaman (*interloaning*). Tujuan peminjaman ke kelompok biasanya digunakan oleh Ibu Kemuning untuk kondangan atau menjenguk tetangga/saudara yang sedang sakit atau kegiatan sosial lainnya.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa bagi orang miskin, kegunaan pinjaman tidak terbatas hanya untuk kegiatan produktif. Banyak diantaranya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian dan atau kegiatan sosial. Keberadaan lembaga atau organisasi yang mampu memberikan akses peminjaman yang mudah dan murah bagi orang miskin merupakan salah satu prasyarat menjamin keberlangsungan hidupnya. Meskipun demikian, jika kegiatan peminjaman demikian tidak disertai dengan perhitungan yang baik – dengan memperhitungkan tingkat kemampuan mengangsur atau melunasinya -- maka hal ini akan membuka peluang bagi orang miskin untuk terjebak dalam kondisi “gali lubang tutup lubang”. Kondisi demikian tentunya akan membuat tingkat kemiskinannya makin terpuruk.

LAMPIRAN 10

Cerita Narasi Usaha Anggota KPB

A. Nona, KPB Putra Galuh, Desa B1, Kecamatan B, Kabupaten Brebes: Sempat kehabisan modal, ikut PKKPM, memulai usaha lagi

Nona, perempuan berusia 44 tahun, bergabung dalam program PPKM sejak awal program ini dijalankan di Desa B1. Sebelum bergabung dalam program PKKPM, pada tahun 1995-2002 Nona sudah pernah menjalankan usaha warung kelontong. Tetapi sejak hamil anak kedua, Nona berhenti berdagang dan tidak bisa memulainya lagi karena terkendala modal.

Setelah bergabung dengan PKKPM dan mendapatkan pinjaman modal, Nona memulai usahanya lagi membuka warung kelontong. Dia berharap usaha ini dapat membantu penghasilan suami dan mengisi waktu kosong di rumah sebagai ibu rumah tangga. Usaha ini merupakan usaha utama karena memang tidak ada usaha atau pekerjaan lain yang dilakukannya sebelum mendapatkan pinjaman modal. Sebelumnya, kebutuhan sehari-hari keluarga dipenuhi dari penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan di luar Jawa. Selain membantu menambah penghasilan suami, Nona berharap kedua anaknya yang masih duduk di bangku SD dapat meneruskan sekolah hingga pendidikan yang tinggi dari hasil usahanya ini.

Nona mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 2,500,000 yang diangsur setiap bulan dengan jangka waktu peminjaman selama 12 bulan. Hingga bulan Juni 2015, Nona sudah melakukan 2 kali angsuran sebesar Rp 215,000 per bulan dari uang simpanannya yang diambil dari omset penjualan setiap harinya.

Nona memulai membuka warung kelontong pada tanggal 23 April 2015. Nona membelanjakan modal pinjaman sebesar Rp 1,500,000 untuk barang dagangan seperti gula, mie instan, makanan ringan, dan barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari lainnya. Selain modal belanja, setiap berbelanja ke pasar Nona juga membutuhkan biaya transportasi umum. Satu bulan usaha berjalan, Nona memutar modal awalnya tersebut dengan berbelanja dua hari sekali untuk melengkapi barang dagangannya. Di bulan pertama usahanya berjalan, Nona menggunakan ruang tamu untuk menggelar barang dagangannya. Dia berharap bisa merenovasi ruang tamunya agar warungnya lebih terlihat rapi.

Nona tidak pernah melakukan pencatatan keuangan usahanya dan menghitung keuntungan pasti yang diperolehnya tetapi dari omsetnya sekitar Rp 300,000/harinya dia menyisihkannya Rp 15,000 untuk ditabung dan sebagai setoran angsuran pinjamannya. Di bulan kedua usahanya berjalan, Nona menambah uang tabungan hariannya dari omset menjadi Rp 30,000/hari, dimana Rp 20,000 dia simpan untuk tabungan pribadi dan Rp 10,000 untuk tabungan setoran pinjaman. Nona mengaku selama dua bulan berjalan belum menambah modal dan masih memutar modal awal yang digunakannya untuk belanja. Sejak Nona menambah penjualan gorengan, dia mencoba melakukan pencatatan keuangan usahanya dan dia menyadari bahwa dengan mencatat modal dan omset yang diperoleh dapat memudahkannya mengetahui keuntungan yang diperolehnya. Hal ini dilakukannya karena baik di pertemuan rutin KPB maupun pelatihan manajemen usaha, pendamping dan pelatih pernah memberikan saran untuk melakukan pencatatan usaha.

Di bulan kedua, usahanya berjalan mulai tampak perkembangan meskipun perlahan. Jenis barang dagangannya semakin lengkap, tidak hanya kebutuhan pokok sehari-hari, Nona juga melengkapi tokonya dengan peralatan sekolah dan kue-kue kering lebaran. Momen yang mendekati hari raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh Nona untuk berjualan kue kering.

Harapannya memperbaiki tempat usahanya ini belum bisa dia lakukan karena dana belum cukup. Nona tidak ingin menambah pinjaman dari program. Dia berharap jika suaminya datang dari perantauan nanti bisa membantunya merapikan tempat usahanya. Nona juga merasa membutuhkan pendampingan dari program agar usahanya tidak mengalami kebangkrutan. Namun, selama dua bulan usahanya berjalan pendamping belum pernah mengunjungi tempat usahanya.

B. Sudrajat, KPB Berkah Makmur, Desa F5, Kecamatan F, Kab. Pekalongan: usaha pembuatan tahu tertatih-tatih karena “bank tunggul”

Rumah Sudrajat (52 tahun) berada di dusun Sitipis, Desa F5. Lokasi dusun ini berada di atas bukit dengan kondisi jalan yang kurang baik, sempit dan hanya berlapis batu-batu tanpa aspal. Walaupun kendaraan roda empat bisa menuju dusunnya, namun hanya sesekali karena hanya pengendara yang terampil yang bisa melewati jalan ini.

Sebelum melakukan pembuatan tahu yang merupakan usaha P2B, Sudrajat menggantungkan hidupnya pada usaha mencari kulit-kulit kayu untuk bahan jamu di hutan. Omset dari usaha ini sekitar Rp. 12.000.000 per tahun. Selain mencari bahan jamu, dia juga mendapatkan penghasilan lain dari ternak sapi milik orang lain (gaduhan). Dalam setahun, dia memperkirakan pendapatan yang bisa dia peroleh sekitar Rp. 2.500.000.

Usaha pembuatan tahu dimulai sekitar bulan Februari 2015 tidak lama setelah pencairan dana BLM. Pembuatan tahu adalah usaha yang sesuai dengan pengajuan Sudrajat dalam proposal usaha dan pelatihan yang dia terima dari program P2B pun juga sama. Dia mengajukan usaha pembuatan tahu karena di masa mudanya dia pernah ikut bekerja di sebuah pabrik tahu di Jakarta. Setelah tidak lagi merantau, keinginan usaha ini hanya dipendam karena ketiadaan modal keuangan. Menurut dia, kendalanya selama ini hanya modal keuangan, sebab modal keterampilan tata cara pembuatan tahu sudah dikuasai sejak dari bekerja di Jakarta.

Dari awal mulai usaha sampai saat ini, Sudrajat hanya sendirian menjalankan usahanya, meski kadang-kadang dibantu sang istri. Untuk memulai usahanya dia menghabiskan dana sebesar Rp. 9,550.000 untuk pembelian peralatan produksi. Dana terbesar dihabiskan untuk membeli mesin penggilingan tahu sebesar Rp.5.000.000. Sisanya dihabiskan untuk peralatan seperti wadah, cetakan dan lain-lain. Untuk produksi bulan pertama, usaha ini menghabiskan modal untuk bahan baku (biaya lancar) sebesar Rp. 5.900.000.

Dalam perjalanan usaha ini omset yang diperoleh Sudrajat sekitar Rp. 6.000.000 per bulan, atau rata-rata Rp. 200.000 per hari. Dia membagi waktu untuk produksi menjadi dua hari untuk pembuatan dan satu hari untuk berkeliling memasarkan tahu. Konsumen yang disasar oleh Sudrajat adalah tetangga yang ada di sekitar desa dan para pedagang di pasar kecamatan.

Dalam memulai usahanya Sudrajat memanfaatkan modal dari pinjaman BLM P2B yang sebesar Rp. 5.000.000 dengan tempo 1 tahun. Pinjaman ini tidak dicicil, melainkan dibayar sekaligus saat jatuh tempat pada tanggal 18 Februari 2016 dengan bunga 1,8%. Karena kebutuhan modal untuk memulai usaha lebih besar dari jumlah pinjaman BLM, maka dia juga meminjam pada tetangga sebesar Rp. 7.000.000 dengan perjanjian dicicil kapan ada uang yang bisa disisihkan dan tidak memaknai tempo.

Dalam perjalanan usaha pembuatan tahu ini Sudrajat kesulitan karena harus menutupi biaya kebutuhan harian dengan menyisihkan laba yang diperoleh dari setiap penjualan dan harus

memutar otak untuk modal produksi selanjutnya. Karena selalu keteteran dengan modal untuk melanjutkan produksi, dia akhirnya memutuskan meminjam modal lagi sebesar Rp. 2.000.000 kepada *bank tunggul*, yaitu para kreditor yang datang tiap minggu. Cicilan pinjaman ini adalah 10% dari pinjaman sebanyak 12 kali. Cicilan untuk bank tunggul inilah yang membuat Sudrajat tidak bisa mengembangkan usahanya dan menyisihkan laba untuk persiapan membayar pinjaman BLM. Dia merasa dilematis karena kalau tidak meminjam pada bank tunggul, dia tidak akan berproduksi dan harus mengganti usahanya dengan yang lain. Membiarkan mesin dan peralatan yang sudah ada menganggur. Namun saat dia memanfaatkan pinjaman dari bank tunggul, dia merasa dikejar-kejar penagih tanpa bisa menyisihkan laba.

C. Gusti, KPB Melati Baru, Desa D1, Kecamatan D, Kab Pematang: Beternak Ayam

Gusti (36 tahun) atau biasa disapa Mas Gusti mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP. Dia harus terus berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan segala cara. Awal pekerjaan yang dimilikinya hanyalah sebagai buruh sawah, yang belum memadai untuk menghidupi keluarganya, terkadang sang istri juga membantu dengan menjadi buruh tani saat musim tanam atau lagi musim panen.

Sejak terpilih menjadi salah satu penerima program PKKPM untuk Dusun Karanganyar di Desa D1 pada bulan Juni 2014 lalu, Gusti selalu aktif dalam setiap pertemuan kelompok, malahan ia terpilih menjadi ketua KPB. Selama 6 bulan pertemuan yang ia lalui bersama kelompoknya, baru mereka mendapat pelatihan usaha pada bulan Desember 2014 dan disusul dengan mendapatkan modal usaha dari pengajuan proposal pada bulan Januari 2015 lalu.

Modal usaha yang ia terima, menjadi angin segar untuk merubah kehidupannya kedepan. Dengan keterbatasan kemampuan SDM yang dimilikinya ia berjuang untuk membuka usaha ternak ayam dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Usaha tersebut bisa menopang hidup bagi keluarganya. Modal usaha yang diterima sebesar Rp. 2.500.000, dirasa sangatlah cukup dibanding dengan kondisinya sebelum mengikuti program PKKPM. Melalui modal tersebut ia langsung menjalankan usaha ternak ayam pada bulan Februari 2015 lalu.

Meskipun bukan ternak berskala besar, namun dengan modal awal Rp.2.500.000 yang diterimanya dari pinjaman PKKPM dan modal sendiri sebesar Rp. 300.000, Gusti semangat memperjuangkan kendali usaha miliknya tersebut. Pada tahap awal sekali yang dilakukannya adalah membangun kandang ayam dengan menghabiskan total biaya Rp. 300.000, pembelian bibit ayam jawa yang sudah berumur 6-7 bulanan sebanyak 37 ekor dengan total biaya Rp. 555.000, serta pakan, vitamin maupun kebutuhan lain untuk menunjang usahanya sebesar Rp. 345.000.

Kini usahanya tersebut telah berjalan 5 bulan dan menurutnya omset yang diperoleh dari penjualan ayam hasil ternaknya tersebut bisa dikatakan lumayan berhasil. Harga penjualan per ekornya Rp. 150.000. Jika rata rata per bulan ia mampu menjual 10 hingga 15 ekor maka omset yang didapatnya per bulan sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 2.250.000, namun penghasilan tersebut tidak bisa dipatok rata per bulannya karena memang pangsa pasar yang belum stabil. Untuk pemasaran, ia lakukan sendiri dari rumah kerumah atau memanfaatkan pesanan dari orang lain yang langsung datang kerumahnya.

Modal usaha yang telah diterimanya dari PKKPM kini menjadi tanggungjawab baru bagi dirinya untuk menanggung cicilan per bulan. Cicilan tersebut harus dilunasi selama 18 bulan dengan bunga 1% sehingga per bulan cicilan yang harus dibayarnya sebesar Rp. 164.000. Dengan kondisi ini, yang diharapkan oleh Gusti adalah tetap adanya dampingan secara ekstra untuk peningkatan usaha, baik dari segi pengendalian penyakit unggas, manajemen keuangan hasil usaha, maupun motivasi untuk

dirinya dalam menjalankan usaha tersebut, mengingat minimnya pengalaman yang dimilikinya untuk dunia usaha ini.

**D. Arif, KPB Sumber Rejeki (Non-sampel), Desa E1,
Kecamatan E, Kab. Pekalongan: Pilihan usaha yang tidak melihat pangsapasar**

Arif adalah anggota KPB Sumber Rejeki yang sebelum bergabung dengan dengan P2B bekerja sebagai penjahit di salah satu usaha konveksi di Jakarta. Dia bekerja di Jakarta dan pulang kampung sebulan sekali atau 2-3 bulan sekali, bergantung banyaknya pekerjaan di Jakarta. Ketika bergabung dengan P2B dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam soal jahit-menjahit konveksi. Tak heran ketika dalam pelatihan menjahit yang dia ikuti sebagai syarat untuk mendapatkan modal pinjaman P2B, dia didaulat jadi asisten pelatih dadakan.

Rumah tempat dia tinggal berada di dusun Sasak/Siberuk yang lokasinya cukup terpencil dari pusat desa dan jalan utama. Kondisi rumah sudah permanen dengan lantai keramik, dinding semen dan atap genteng. Rumah ini sudah agak tua. Di rumah ini keluarganya tinggal bersama mertua dan saudara-saudara istrinya.

Selama menjadi anggota kelompok, dia tidak terlalu aktif mengikuti kegiatan kelompok karena harus bekerja di Jakarta. Kadang-kadang jika istrinya tidak sibuk menjaga anak, dia diwakili istrinya hadir di kelompok.

Setelah pinjaman BLM cair, Arif membelikan sebuah mesin jahit listrik di Pekalongan seharga 2,5 juta dan ditambah ongkos 300 ribu. Sisa pinjaman dari BLM sebesar Rp. 5.000.000 dia manfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan tabungan untuk cicilan per bulan sebesar Rp. 330.000 (bunga 1 % per bulan).

Di awal usaha menjahit, Arif hanya mengandalkan pelanggan yang memperbaiki pakaian mereka. Pelanggan ini adalah tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Usaha jahit yang awalnya direncanakan akan menerima orderan dalam jumlah besar, praktis hanya menjual jasa permak pakaian. Pelanggan yang diterima masih tetangga seputaran dusun. Jasa yang dia jual belum bisa menyasar pasar yang lebih luas karena lokasi usahanya yang terpencil, jauh dari jalan utama dan keramaian seperti pasar atau pusat desa.

Keadaan inilah yang menyebabkan usaha jahit Arif hanya berjalan 1 bulan, karena setelah itu dia kembali berangkat ke Jakarta untuk jadi karyawan di usaha konveksi yang sebelumnya telah biasa memanfaatkan keterampilan dan tenaganya. Dia memilih untuk kembali ke Jakarta di awal Mei 2015 atas ajakan temannya, yang juga anggota KPB dan sama-sama mengajukan usaha jahit dalam program P2B. Temannya ini mengajak karena juragan yang punya usaha konveksi di Jakarta kekurangan karyawan sementara pekerjaan sedang banyak dalam rangka menyambut Lebaran.

Menurut keterangan istrinya saat diwawancarai dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan lewat telepon, alasan dia meninggalkan usaha menjahit P2B yang semula direncanakan adalah tidak adanya pemasukan. Jika hanya mengandalkan pelanggan yang akan memperbaiki pakaian, pendapatan hariannya hanya Rp. 25.000, dan itu pun tidak setiap hari. Dalam satu minggu, bisa saja hanya 1 atau 2 hari yang ada pelanggannya. Sementara dengan bekerja di Jakarta, Arif bisa mengirimkan uang belanja ke istrinya paling sedikit Rp. 700.000 per minggu. Kalau pekerjaannya sedang banyak di Jakarta, dia bahkan bisa mengirim Rp. 1.500.000 per minggu. Namun rata-rata dia mengirimkan uang belanja sebesar Rp.1.000.000 per minggu.

Kendala utama dalam usahanya adalah sepiinya orderan yang datang, sementara untuk jemput bola, Arif kesulitan dengan mobilitas karena tempat tinggalnya yang terpencil, tidak dilalui kendaraan umum. Untuk keluar dusunnya, Arif bergantung pada teman-teman yang berangkat dengan sepeda motor, sebab dia sendiri tidak bisa membawa sepeda motor. Padahal usaha-usaha konveksi yang membutuhkan tenaga dan jasanya berada di luar kecamatan atau bahkan di kota Pekalongan.

Dengan bekerjanya Arif di Jakarta, otomatis usaha menjahit yang dirintis dari modal P2B berhenti total untuk sementara. Mesin dan peralatan lain yang dibeli dengan modal pinjaman BLM hanya menganggur di ruang tamunya. Namun menurut Arif, jika nanti sudah ada orderan, dia akan meneruskan usaha ini. Bagaimana pun dia memilih bekerja di rumah agar bisa dekat dengan anak istri.

E. Iqbal, KPB Sido Maju (non sampel), Desa F5, Kecamatan F, Kab. Pekalongan: Usaha warung kopi

Iqbal, pria 37 tahun yang tamatan SD ini, membuka usaha warung kopi di dekat air terjun di desanya. Air terjun ini menjadi tempat rekreasi masyarakat Kecamatan F dan wilayah sekitar. Lokasi ini ramai dikunjungi pada hari Jumat dan Minggu serta hari-hari libur lainnya.

Iqbal tertarik berusaha warung kopi karena sebelumnya dia adalah pencari kopi hutan. Dari kopi yang dia kumpulkan di hutan inilah pendapatan utamanya dia peroleh selama ini. Ketika bergabung dengan program P2B-PKKPM, dia melihat peluang usaha warung kopi yang juga pernah dirintisnya, namun bankrut karena didirikan di dekat rumah dan tidak banyak pengunjung. Di awal bergabung dengan P2B-PKKPM dia sudah melihat peluang usaha di dekat air terjun karena pada saat-saat libur ramai pengunjung.

Warung yang dia dirikan adalah bangunan non-permanen yang seluruh bahan utamanya (termasuk atap) dari bambu yang diambil sendiri dari hutan. Di sini dia berjualan kopi khas hutan Kecamatan F yang masih liar. Namun kopi ini tidak terlalu laris karena anak muda yang jadi pengunjung utama curug lebih menyenangi kopi instan yang dalam kemasan shachet. Selain berjualan kopi, dia juga berjualan makanan ringan seperti mie instan, keripik dan sebagainya.

Untuk memulai usahanya dia mendapatkan pinjaman BLM sebesar Rp 5.000.000. Dari uang ini, yang dia manfaatkan untuk modal usaha warung kopinya sebesar Rp 500.000, yakni untuk membeli peralatan warung seperti kompor, gelas, sendok, wadah-wadah dan sebagainya. Bahan bangunan warung dia ambil dari hutan. Jadi hanya modal tenaga, sementara untuk pembelian bahan-bahan seperti paku, tali temali dan sebagainya dia memakai uang pinjaman dari pak Lurah sebesar Rp 500.000. Sisa pinjaman modal BLM dia manfaatkan untuk membayar hutang sebesar Rp 3.500.000. Hutang ini sebelumnya dia pakai untuk modal warung kopi sebelum P2B yang telah bankrut. Sementara Rp 1.000.000 dipinjamkan kepada orang lain yang mengagunkan kopinya yang belum berbuah. Pinjaman itu jangka waktunya 1 tahun. Sementara kopi si peminjam boleh dia ambil selama 1 tahun. Uang dikembalikan tanpa bunga, bunganya hanya kopi si peminjam dlm masa satu tahun. Istilah warga lokal untuk sistem ini adalah “megang” kopi.

Di awal perjalanan usahanya, warung Iqbal beromset sekitar Rp. 7.500.000 per bulan, atau rata-rata Rp.250.000 per hari. Sementara untuk biaya lancar yang dia habiskan untuk satu bulan pada saat awal usaha sekitar Rp. 3.368.000. Di bulan terakhir, setelah usahanya berjalan selama lebih kurang 5 bulan, dengan rata-rata yang omset yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya, biaya lancar yang dia keluarkan relatif menurun menjadi Rp. 2.815.000. Ini terjadi karena menurut dia

barang dagangan bulan sebelumnya masih ada yang tersisa seperti minuman instan dan kopi-kopi sachetan.

Sejauh ini Iqbal merasa tidak ada kendala berarti dalam perjalanan usahanya, karena dia mendirikan warung di tempat yang strategis. Dengan rata-rata omset dan biaya lancar seperti di atas, Iqbal optimis usahanya ini akan berkembang. Ini dibuktikan dengan pengakuannya bahwa istrinya sudah membuat celengan untuk persiapan membayar pinjaman modal saat jatuh tempo nanti di bulan Februari 2016 dengan bunga 1,8%. Saat ini isi celengan itu sudah Rp. 1.500.000. Dia dan istrinya tidak berniat memakai isi celengan itu untuk kebutuhan lain, selain jika usaha warungnya nanti membutuhkan suntikan modal tambahan.

Iqbal optimis dengan usahanya karena menurut dia dengan usaha ini dia merasa bangkit lagi setelah terpuruk gara-gara warung kopi yang dirintis sebelum jadi anggota P2B bankrut. Dia jadi tenang karena hutang untuk memodali warung yang bankrut itu sudah lunas dan dia pun sudah meminjamkan uang Rp. 1.000.000 sebagai cadangan.

Dia ingin mengembangkan usahanya lebih jauh dengan membuat kemasan dengan label sendiri. Saat ini label itu sedang dalam proses mendapatkan izin dari dinas perindustrian kabupaten. Untuk pengurusan izin ini dia dibantu oleh FK Kecamatan F.

F. KPB Tani Klindon, Desa F2, Kecamatan F, Kab Pekalongan: Penggemukan Sapi KPB Tani Klindon tetap semangat berusaha

KPB Tani Klindon yang berlokasi di Dukuh Klindon RT 08 RW 04 Desa F2 memilih usaha penggemukan sapi. Keseluruhan anggota yang melakukan usaha ini sebanyak 13 orang terdiri 12 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam kegiatan usaha satu-satunya anggota perempuan yaitu ibu Suratmi digantikan oleh anak laki-lakinya. Semua anggota masih aktif dalam kegiatan pertemuan rutin kelompok setiap Selasa jam setelah isya'. Setiap perkembangan usaha dibicarakan di kelompok. Dari 13 anggota ini rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Usaha penggemukan sapi berstatus pekerjaan sampingan bagi anggota, tetapi sebagai usaha utama dikelompok.

Untuk mencapai dukuh Klindon ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dari pusat Kecamatan F. Akses jalan yang aspal hanya sekitar 30% saja yang masuk kategori layak sedangkan sisanya aspal rusak sulit untuk dilalui, karena aspal sudah hilang dan hanya tinggal batu dan kerikil tajam, apalagi jika sudah hujan maka akan menjadi licin. Jalan yang paling rusak dari kantor desa menuju ke dukuh Klindon dan juga perbatasan dari Desa F1 menuju Desa F2. Untuk jalan kampung sendiri bisa dikatakan tidak bermasalah, meskipun batu tapi tertata dan padat, sehingga mudah dilalui kendaraan.

Lokasi kandang kelompok berada di dukuh Klindon Desa F2 tidak jauh dari rumah warga atau anggota KPB, kurang lebih sekitar 50 meter dari perkampungan. Tidak seperti di banyak tempat kandang ternak biasa di tempatkan agak jauh dari kampung, tetapi di Klindon rata-rata kandang berada dekat dengan rumah warga.

Masyarakat di Kecamatan F umumnya masih sangat mematuhi peraturan dan kekerabatannya sangat erat. Sifat kegotongroyongan masih terpelihara dengan baik. Hal tersebut juga bisa menjadi modal sosial. Sebagai contoh dalam pembuatan kandang tidak perlu membayar tukang, cukup dikerjakan bergotong royong dengan seluruh anggota KPB. Berbicara mengenai modal, banyak yang dapat digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan kegiatan P2B PKKPM di dukuh ini khususnya. Sumber daya alam (SDA) untuk usaha penggemukan sapi tidak ada karena sumber bahan pakan yang tersedia melimpah. Terkait dengan kualitas SDM (sumber daya manusia) secara formal

memang tidak begitu baik. Umumnya masyarakat di kelompok ini hanya tamat SD saja, bahkan ada yang tidak sampai lulus SD. Kemampuan baca tulis juga sangat rendah, komunikasi tidak begitu bagus. Sehingga untuk pengelolaan keuangan kelompok sendiri masih agak kacau. Apalagi nantinya apabila akan mengurus/mengelola usaha yang besar. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran, bahkan catatan usahanya pun tidak ada. Rata-rata mereka berprinsip seperti air mengalir, apa yang akan terjadi maka terjadilah dan mereka tidak mau dibuat rumit dengan perhitungan dan pencatatan.

Program pinjaman dari P2B sebagai modal utama pelaksanaan usaha, dengan sistem pinjaman langsung, tidak melakukan angsuran atau langsung pembayaran di belakang sesuai jatuh temponya. Jasa/bunganya 1,5 % dengan rincian 1% untuk kelompok dan 0,5% masuk ke UPK. Selama ini kelompok ini belum berfikir bagaimana cara untuk membayar pinjaman. Menurut Pak Wajib (sekretaris KPB) jika sudah waktunya membayar akan menjual sapi mereka. Pembayaran pinjaman jatuh tempo pada bulan juni 2016. Karena jangka waktu pinjaman 18 bulan atau 1,5 tahun.

Kondisi usaha sampai saat ini masih berjalan cukup baik meskipun di awal banyak terjadi permasalahan. Awal usaha pada bulan Desember 2014 setelah pencairan dana pinjaman. Modal awal hasil pinjaman P2B untuk kelompok Tani Klindon ini sebesar Rp. 65.000.000,- (13 orang @5 juta/orang). Kelompok ini membeli 5 ekor sapi jantan dengan total harga Rp. 58.000.000,-. Sisanya digunakan untuk membeli bahan pembuatan kandang yang mencapai 7 juta lebih. Setiap anggota masih harus iuran Rp. 100.000,-/orang untuk tambahan modal. Maka terkumpul Rp. 1.300.000,- (modal swadaya) dan diperuntukan untuk kebutuhan tambahan lain seperti membeli obat tambahan dan biaya kesehatan hewan ternak mereka.

Pada bulan januari 2015, salah satu sapi paling besar mati karena kembung. Tersisa 4 ekor saja di kandang. Tidak berselang lama, satu sapi sakit, terjadi pembengkakan di muka dan akhirnya dijual untuk menghindari kerugian jika sampai mati lagi untuk kedua kalinya. Meskipun sudah menderita kerugian, tapi sikap mereka sangat pasrah dengan mengatakan belum jadi rejeki harus ditanggung bersama kelompok. Mereka merasa sudah berusaha maksimal dengan mendatangkan mantri hewan untuk memeriksa sapi, membeli obat dan jamu, serta minta dokter hewan yang melatih mereka, tapi dokter hewan tidak bersedia datang ke Kecamatan F. Dokter hanya memberikan saran untuk membeli obat saja. Sayangnya sapi tetap tidak tertolong. Saat ini sapi yang dijual sudah dibelikan lagi dengan sapi yang baru. Menurut beberapa anggota, saat ini perkembangan ternak mereka sudah sangat bagus. jadwal mencari rumput per hari 6 orang dan dilakukan bergilir, saat ini sudah tidak mencukupi lagi. Pada awalnya, setiap hari 6 orang anggota mencari rumput untuk makan 4 ekor ternak pagi, siang dan sore hari. tapi karena sudah semakin besar maka pakan bertambah banyak. sudah diputuskan pada waktu pertemuan rutin kelompok, bahwa jadwal memetik rumput 12 orang setiap hari dengan kuantitas yang sama. Tidak ada komplain dari anggota mengenai keputusan tersebut.

Usaha peternakan ini tidak bisa di perhitungkan keuntungannya, karena penjualan tidak pasti tergantung musim. Jika idul adha pasti harga akan naik, namun pada musim-musim tertentu harga sangat rendah. Perkiraan harga mencapai 17 juta – 20 juta. Jadi prospek usaha jangka pendek masih kurang menguntungkan. Disamping usaha ini harus dilakukan selama berbulan-bulan bahkan tahun untuk melihat berhasil atau tidaknya. Tidak bisa hanya dalam waktu singkat, karena jelas belum terlihat hasilnya.

F. Ayumi, KPB Maju Jaya (sampel), Desa E1, Kecamatan E, Kab. Pekalongan: Usaha keripik pisang yang pelan namun pasti

Ayumi adalah seorang janda yang harus membesarkan tiga orang anaknya yang masih sekolah. Dua orang putra sekolah tingkat menengah, masing-masing di sebuah pesantren di daerah Kajen dan di SMPN 2 Desa E1. Sedangkan putrinya masih kelas V SD. Keluarga ini tinggal di rumah sederhana dengan lantai semen diplester, dinding papan, atap genteng. Rumah mereka diapit kiri kanan depan belakang oleh rumah tetangga yang berjarak 1-2 meter. Kondisi ini menyebabkan suasana rumah kurang terang, sehingga ruang tamu yang berisi kursi tamu, lemari tempat tv, meja belajar dan sebuah meja makan sederhana terlihat temaram. Penghasilan utama Ayumi adalah menjual hasil kebun (singkong, jagung dan pisang) yang omsetnya per tahun sekitar Rp. 1.850.000 atau sekitar Rp. 6.000 per hari. Dengan penghasilan yang sangat minim ini Ayumi ingin mendapat penghasilan tambahan dengan berusaha keripik pisang. Rumah tempat Ayumi menjalankan usaha keripiknya terletak dekat jalan raya desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat (doplak) sebagai transportasi sehari-hari. Hanya saja dusun tempatnya tinggal jauh dari pusat desa dan jalan kecamatan. Gagasannya untuk membuat usaha keripik pisang sudah ada sebelum bergabung dengan P2B karena menganggap alangkah baiknya pisang yang ada di kebun tidak dijual mentah ke pasar, melainkan diolah dulu supaya lebih menguntungkan.

Usahanya dimulai sekitar tanggal 25 Maret 2015, beberapa hari setelah pencairan dana modal P2B untuk kelompok KPBnya. Modal yang dia terima adalah Rp 1.500.000,-. Dari modal ini dia memanfaatkan untuk membeli peralatan sebanyak Rp. 314.000,-. Sementara biaya lancar yang dia habiskan selama sebulan ini adalah Rp. 521.000. Biaya lancar ini sudah termasuk pisang sebagai bahan baku. Dia mengaku tidak menghitung pisang ini sebagai modal karena berasal dari kebun sendiri. Bahan-bahan lain untuk pembuatan keripik dia beli di Pasar Kecamatan E. Dia berbelanja sekali seminggu dan tiap kali belanja menghabiskan ongkos transpor Rp. 15.000,-

Dalam perjalanannya, usaha ini per bulan mampu memperoleh omset sebesar Rp 660.000 per bulan, atau rata-rata Rp 22.000 per hari. Omset ini tidak jauh berbeda dari omset yang dia peroleh ketika memulai usahanya. Hanya saja biaya lancar yang dia habiskan untuk produksi relatif turun. Jika di awal usaha dia menghabiskan uang untuk pembelian bahan-bahan sebesar Rp. 521.000 maka di bulan terakhir, dia hanya menghabiskan uang untuk biaya lancar sebesar Rp. 467.000. Penurunan ini terjadi karena menurut dia sisa-sisa bahan untuk produksi sebelum-sebelumnya masih bisa dimanfaatkan seperti garam, ketumbar dan lain-lain.

Ayumi sangat optimis dengan caranya berusaha. Dia tidak terlalu hirau dengan omset yang tetap sama, karena menurut dia yang penting lancar. Tidak apa-apa keuntungan kecil, namun terus-menerus. Dia tidak ingin mendapatkan omset besar dengan modal yang besar, namun hanya terjadi sesekali. Itulah alasannya mengapa mengajukan pinjaman dengan jumlah yang sedikit (Rp. 1.500.000). Pinjaman ini harus dia cicil setiap tanggal 20 sebesar Rp.100.000.

Ayumi belum berpikir mengembangkan usahanya dengan memperluas pemasaran karena terkendala tenaga. Untuk usaha ini hanya dia sendiri yang bekerja, walau sesekali dibantu anaknya yang masih sekolah SD kelas 5 dan SMP kelas 3. Pemasaran keripiknya hanya mengandalkan tetangga sekitar kampung dan kerabat-kerabat mereka yang datang dari luar yang ingin membawa oleh-oleh. Sejauh ini, jumlah produksi yang dia hasilkan selalu habis dengan jangkauan pemasaran seperti ini. Suatu kali dia pernah mencoba memasarkan keripiknya dengan menitipkan ke warung saudara di desa lain sembari mencoba menjajagi kemungkinan menitipkan ke warung-warung lain di desa itu. Namun setelah dicoba sekali, ternyata ongkos produksi membengkak karena untuk menuju desa itu dia menghabiskan ongkos ojek Rp. 50.000 pulang-pergi. Setelah kejadian ini dia memutuskan untuk memasarkan keripiknya dengan pola semula. Dia yakin usaha ini bisa tetap berjalan walau

pun hasilnya sedikit. “Pelan-pelan tapi pasti,” begitu katanya, “saya tidak berani berencana yang besar-besar karena takut tidak kuat tenaganya dan modalnya juga akan makin besar.”

G. Usaha Kelompok, KPB Kuda Zebra, Desa C1, Kecamatan C, Kab Brebes: usaha keripik

Salah satu kelompok usaha di Desa C1 berasal dari KPB Kuda Zebra dengan jumlah tujuh anggota perempuan dan bantuan suami salah satu anggota, Pak Sanusi, yang sekaligus sebagai kader dusun P2B. Kegiatan usaha dilakukan di rumah Ibu Sari, salah satu anggota.

Kelompok memulai usaha setelah pencairan modal pinjaman usaha P2B, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2015. Kegiatan produksi keripik dilakukan bersama-sama oleh ketujuh anggota dan Pak Sanusi bertugas mencari bahan baku pisang serta mengatur keuangan usaha kelompok. Bahkan salah satu anggota menyatakan “*Kami yang buat keripik saja, soal uang diatur sama Pak Sanusi*”. Namun, setelah usaha berjalan selama kurang lebih 1 bulan, Pak Sanusi menyerahkan urusan keuangan kepada salah satu anggota dengan tetap didampingi oleh Pak Sanusi. Sejak bulan Mei 2015, salah satu anggota bertugas mencatat keuangan usaha. Anggota mencatat modal dan omset setiap produksi di buku yang sengaja disediakan untuk pencatatan keuangan usaha.

Dana pinjaman untuk usaha kelompok tidak dicairkan secara kelompok, melainkan dicairkan ke setiap anggota. Masing-masing anggota mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp 2.000.000 sehingga total pinjaman satu kelompok sebesar Rp 14.000.000, belum termasuk cadangan 10% sebesar Rp 200.000/anggota. Dari modal tersebut, setiap anggota mengumpulkan dana Rp 500.000 untuk modal awal usaha keripik. Setelah terkumpul dana usaha kelompok yaitu Rp 3.500.000, salah satu anggota dan Pak Sanusi mulai membelanjakan peralatan usaha dan bahan baku produksi. Karena usaha ini bersifat kelompok, meskipun setiap anggota sudah memiliki peralatan pembuatan keripik yang sehari-harinya digunakan untuk memasak, mereka tetap membeli peralatan baru sebagai milik kelompok usaha. Sedangkan, sisa pinjaman modal sebesar Rp 1.500.000/anggota digunakan untuk tambahan modal pertanian masing-masing dan ada pula yang menggunakannya untuk membayar hutang ke warung. Kedua jenis pemakaian ini belum tercantum sebelumnya dalam proposal pengajuan. Artinya, pengajuan ataupun realisasi pinjaman tidak sesuai dengan kebutuhan modal usaha, dimana realisasi kebutuhan usaha kelompok sebesar Rp 3.500.000.

Ketujuh anggota melakukan produksi bersama-sama dari bahan mentah hingga siap jual. Biasanya produksi dilakukan pukul 13.00- 19.00 WIB setelah bekerja di sawah pagi harinya. Produksi pertama keripik ini, ketujuh anggota mengambil upah dari modal produksi. Namun, karena setelah dilakukan penghitungan dan labanya tipis, kelompok menyepakati tidak mengambil upah dari kegiatan produksi. Seluruh hasil usaha dikumpulkan oleh Pak Sanusi dan keuntungan setiap bulannya tidak dibagikan ke anggota, melainkan menjadi setoran pinjaman ke UPK.

Produksi tidak dilakukan dalam periode tertentu, tergantung kesediaan bahan baku dan stok keripik yang sudah siap jual. Pemasaran hasil produksi saat ini ditiptkan ke tiga warung di sekitar rumah. Perolehan omset penjualan tergantung pada penjualan di warung-warung tersebut dan pembeli yang kadang membeli langsung ke tempat produksi. Dalam satu bulan pertama, kelompok ini melakukan produksi keripik selama 24 hari. Modal awal sebesar 3500000 digunakan untuk membeli peralatan usaha sebesar 1780000 dan sisanya disimpan untuk modal pembelian bahan baku. Biasanya keripik titipan di warung habis dalam waktu 2-5 hari dengan omset penjualan rata-rata 405000/5 hari. Tidak ada pencatatan keuangan usaha sehingga tidak dapat diketahui pasti omset penjualan dan keuntungan setiap produksinya, tetapi keuntungan penjualan tetap dipisahkan. Modal bahan habis pakai untuk satu kali produksi/hari berkisar 167000. Menurut Pak Sanusi keuntungan di bulan pertama usaha sebesar 805000 yang sudah disetorkan sebagai angsuran ke UPK. Pada bulan ketiga, Mei 2015, berdasarkan pembukuan keuangan usaha tampak ada

peningkatan keuntungan menjadi Rp1.184.500. Jika seluruh keuntungan disetorkan ke UPK sebagai angsuran dan ketujuh anggota merupakan tenaga kerja tidak dibayar dalam usaha ini, artinya selama setoran pinjaman belum lunas anggota belum bisa merasakan hasil/ keuntungan usaha. Hal ini terlepas dari penggunaan sebagian modal untuk pertanian.

Angsuran pinjaman modal P2B ke UPK dilakukan secara berkelompok setiap bulan selama 18 bulan tanpa bunga baik ke kelompok maupun ke UPK. Tanggal 18 setiap bulannya, kelompok usaha keripik harus melakukan angsuran ke UPK yang dikoordinir oleh Pak Sanusi. Hingga Juni 2015, kelompok sudah melakukan 3 kali setoran.

Selama usaha kelompok berjalan belum ada pendampingan usaha baik dari pendamping maupun pemerintah. Tipisnya keuntungan dari usaha kelompok ini tidak mengurangi semangat untuk meneruskan usaha. Akan tetapi, beberapa dukungan yang dapat mengembangkan usaha sangat diharapkan oleh kelompok, seperti tambahan pelatihan tentang pengemasan, dukungan pembuatan ijin produksi agar dapat dipasarkan ke toko-toko di luar desa. Kelompok juga mengaku tidak akan berjalan tanpa bantuan Pak Sanusi. Rendahnya kualitas SDM anggota membuat mereka merasa tidak mampu mengatur secara mandiri usahanya. Namun dalam perkembangannya setelah satu bulan berjalan, kelompok dapat mengatur keuangannya sendiri meskipun belum terlepas dari bantuan Pak Sanusi untuk penyediaan bahan baku keripik.

H. Anyelir, KPB Belimbing (Sampel), Desa C1, Kecamatan C, Kab. Brebes: Usaha kue brownies dari dusun terpencil

Sehari-hari Anyelir berdagang warung kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Warung itu berbentuk kios permanen yang berada di samping teras rumahnya. Kondisi fisik rumah bagus, lantai keramik, dinding semen dan dicat bersih, atap genteng. Penghasilan utama keluarganya diperoleh dari pendapatan suami usaha dagang kayu hutan, terutama kayu untuk bahan pembuatan rebana. Warung sembako ini adalah sumber pendapatan sampingan.

Rumah Anyelir berada di dusun Cisaat, Desa C1. Dusun ini terpencil dari pusat desa. Untuk mencapainya harus menyeberang Kali Pamali. Tidak ada jembatan yang menghubungkan wilayah dusun ini dengan wilayah seberang kali. Di musim hujan kali ini tidak bisa diseberangi dengan jalan kaki. Sementara untuk kendaraan roda dua praktis memerlukan jasa penyeberangan perahu yang terdapat di desa tetangga. Dari pusat desa ke dusun ini memerlukan waktu sekitar 45 menit, baik jalan kaki maupun berkendara, karena kendaraan harus memutar ke desa tetangga untuk mendapatkan jasa penyeberangan perahu. Jalan menuju dusun ini adalah jalan setapa, bahkan tidak bisa dikatakan jalan karena melewati sela-sela pohon jati milik perhutani. Selepas hutan jati ini sebelum sampai ke perkampungan Cisaat harus menyusuri pinggir kali Pamali. Di musim kemarau, pengendara motor memilih untuk berjalan di dalam kali yang airnya hanya 10-20 cm. Rumah yang dijadikan responden sebagai tempat usaha kondusif untuk usaha kue brownies yang dirintisnya.

Usaha Kue Brownies yang dijalankan Anyelir berkat adanya program P2B adalah usaha yang sudah lama dia ingin coba lakukan, karena sebagai ibu rumah tangga, dia punya banyak waktu luang kalau hanya mengurus warung sembako saja.

Usaha ini dia mulai dengan modal pinjaman BLM sebanyak Rp 4.000.000. Dari modal ini dia pakai untuk membeli peralatan dan lain-lain(modal tetap) sebesar RP 1.645.000 dan untuk bahan baku dan lain-lain (modal lancar) sebesar Rp. 1.530.000.

Di awal usahanya, omset Anyelir rata-rata Rp 2.100.000 per bulan. Omset ini dia peroleh dengan membagi waktu untuk memasak sehari dan mengantarkan kue ke warung-warung dan pedagang-pedagang di luar desa sehari. Pemasarannya masih bertumpu pada warung sekitar rumah dan beberapa pedagang di pasar kecamatan.

Namun belakangan omset usahanya mengalami penurunan, menjadi rata-rata Rp 728.000 per bulan. Begitu pula dengan biaya lancar yang dia habiskan dalam satu bulan. Kalau di awal usaha menghabiskan Rp 1.530.000, maka belakangan dia hanya menghabiskan Rp 716.000. Penurunan ini terjadi karena beratnya persaingan dengan pengusaha lain yang telah berpengalaman. Warung dan pedagang yang dia titipi kue Browniesnya banyak mengeluhkan produknya terlalu keras dibanding produk orang lain.

Inilah kendala utama yang dia hadapi saat ini, dia ingin memproduksi kue yang lebih empuk yang disukai konsumen. Dia merasa harus mencari tahu sendiri resep-resep lain supaya kuenya tidak membosankan konsumen, karena belakangan ini dia tidak memperoleh pendampingan dari siapa pun. Pendamping kelompok yang di awal usaha memang sering datang ke rumahnya, karena tetangga sendiri, juga tidak terlalu punya pengalaman di bidang resep kue.

Meski omsetnya mengalami penurunan, Anyelir tidak patah arang, karena masih terus memproduksi dan terus mencoba bagaimana supaya kuenya bisa sama dengan produksi orang lain. Selain itu, dia masih tetap bisa melakukan cicilan pinjaman BLM setiap tanggal 18 sebanyak Rp 208.000.

I. Pita, KPB Suka Rame, Desa C1, Kecamatan C, Kab Brebes: karena P2B PKKPM tergugah membuka usaha kue dan ayam kentucky, tidak lagi menjadi buruh

Pita merupakan anggota KPB Suka Rame, Desa C1 berusia 29 tahun. Pita, panggilan sehari-harinya, memulai kegiatan usaha setelah menjadi anggota P2B. Sebelumnya, Pita bekerja sebagai buruh cuci harian di Desa C1. Sejak menjadi anggota P2B dan mendapatkan gambaran-gambaran usaha dari fasilitator, Pita mengaku mendapatkan motivasi untuk mencoba menjalankan usaha.

Pita memulai usahanya dengan memproduksi kue dan menjajahkan keliling desa. Usaha ini dilakukan bersama suami yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan. Pita merasa usaha kue kelilingnya sukses dan memutuskan berhenti menjadi buruh, begitu pula suaminya. Modal awal yang dikeluarkan Pita untuk memulai usaha kue sebesar Rp 200.000. Sebagian besar peralatan pembuatan kue sudah dimiliki Pita sehingga tidak banyak biaya pembelian alat yang dikeluarkan. Omset penjualan kue ini diperoleh setiap hari sebesar Rp 230.000. Dengan modal habis pakai berupa bahan baku produksi kue dan akomodasi dagang keliling sebesar Rp 130.000, Pita mendapatkan laba bersih Rp 100.000/hari. Jika dalam satu bulan Pita melakukan usaha ini 25 hari, maka penghasilan bersih dari penjualan kue sebesar Rp 2.500.000/bulan. Dari hasil inilah, Pita mengaku suami semakin semangat menjalankan usaha dan bertekad tidak kembali menjadi buruh.

Sebagai anggota P2B PKKPM, Pita tetap mengajukan pinjaman dan pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Pita mengajukan pelatihan dan pinjaman modal untuk membuka usaha kentucky (ayam goreng tepung). Beberapa hari setelah pelatihan keterampilan usaha, 20 Februari 2015, Pita memulai usaha kentucky dengan modal pribadi sebesar Rp 200.000. Sebagian besar peralatan pembuatan kentucky juga sudah dimiliki Pita sehingga tidak banyak biaya yang dibutuhkan. Omset penjualan kentucky memang lebih besar daripada penjualan kue yaitu sebesar Rp 330.000, tetapi keuntungan yang diperoleh lebih rendah daripada penjualan kue, yaitu Rp 69.500/hari. Pita berjualan kentucky dua hari sekali untuk menghindari kebosanan konsumen, sehingga dalam satu bulan Pita melakukan usaha kentucky kurang lebih 15 hari. Maka penghasilan bersih dari penjualan Kentucky dalam satu bulan sebesar Rp 1.042.500. Salah satu kendala dalam

berjualan Kentucky adalah harga daging ayam yang tidak stabil. Pada bulan Mei-Juni 2015 Pita mengurangi aktifitas dagang kentuckynya karena bahan baku utama, daging ayam, sedang mahal sehingga keuntungan menurun. Menurutnya, dia akan kembali berjualan Kentucky setelah hari raya Idul Fitri jika harga daging ayam sudah stabil.

Setelah menjalankan usaha, Pita mengaku senang karena banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anaknya dan tidak bekerja di bawah perintah orang lain. Berdasarkan kondisi dua jenis usaha tersebut, Pita menjadikan usaha kue keliling sebagai usaha utama karena penghasilannya yang lebih besar daripada usaha kentucky. Namun, hal ini tidak membuat Pita putus asa dan berhenti berjualan kentucky. Menurutnya, usaha kentucky masih menjanjikan karena masih tidak ada saingan usaha di lokasi usaha, berbeda dengan usaha kuenya yang sudah banyak saingan sejak ada pelatihan keterampilan kue dari P2B dan banyak anggota P2B dari kelompok lain yang melakukan kegiatan usaha kue. Kondisi persaingan juga tidak membuat Pita putus asa, bahkan dia merasa tertantang untuk bersaing dengan pedagang lainnya dengan cara meningkatkan kualitas/rasa dan memperbesar ukuran kue agar konsumen tetap tertarik pada kue dagangannya.

Setelah menjalankan usaha, Pita masih aktif dalam pertemuan rutin KPB. Dalam pertemuan rutin, Pita mendapatkan semangat dari pendamping untuk tidak putus asa dan memanfaatkan pinjaman sesuai tujuan awal yaitu usaha. Selain dalam pertemuan rutin, sesekali pendamping juga mendatangi Pita di rumah untuk melihat aktifitas usaha yang dijalankannya. Pita berencana bekerja sama dengan orang lain untuk menjajahkan kue dan Kentucky dagangannya ke desa lain agar usahanya berkembang dan omset meningkat. Saat ini dia mulai menitipkan kue dagangannya ke warung-warung di luar desa dan selain suami, Pita juga mencoba ikut menjajahkan dagangannya di luar desa.

Pita mendapatkan modal pinjaman P2B sebesar Rp 4.000.000 yang diangsur pengembaliannya setiap bulan dengan bunga 3% dan biaya setoran kelompok sebesar Rp 4000, selama 18 bulan. Setiap bulan Pita harus menyetorkan Rp 233.000 kepada pengurus KPB yang kemudian akan disetorkan ke UPK. Sejak pencairan modal, Pita sudah melakukan tiga kali angsuran tepat waktu. Ketepatan waktu angsuran dilakukan Pita karena menurutnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dan agar tidak menjadi beban pikiran. Setelah pencairan pinjaman modal, Pita menggunakan sebagian modal tersebut untuk membuat warung kecil di depan rumahnya. Waktu kosong di siang hari digunakannya berjualan nasi soto, kopi, dan kue. Hal yang menarik dari seorang Pita adalah kreatifitas melihat potensi dan peluang di sekitarnya. Potensi kemampuan membuat kue yang diperoleh dari orang tuanya menjadi modal utama memulai usaha kuenya.

J. Hendro, Desa A1, Kecamatan A, Kab Brebes: Usaha rumah tangga kerupuk tulang ikan

Pak Hendro (47 tahun) merupakan salah satu penerima manfaat aktif dari program PKKPM Desa A1 yang berdomisili di Jl. TPI RT 004/RW 004. Pak Tarno merupakan pembuat dan penjual kerupuk tulang ikan, kini sudah mulai dikenal masyarakat desa sekitar. Kepiawaiannya menggeluti mesin pemotong adonan sehingga menjadi kerupuk, serta gagahnya ia dalam menantang panasnya bara api yang menggelegar saat penggorengan dimulai, ia lakukan tanpa lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang memiliki 2 orang anak berumur 15 tahun dan 12 tahun.

Sosok manusia yang semangat, dengan penampilan sederhana dan kulitnya yang keriput dan berminyak yang khas ini telah menggeluti usahanya sebagai pembuat kerupuk tulang ikan sejak tahun 2003 lalu. Usaha tersebut dilakoni dengan landasan potensi hasil laut Desa A1 berupa ikan, berbekal modal usaha yang awalnya didapat dari pinjaman keluarga serta dukungan pemerintah melalui program PKKPM yang memberikannya modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Modal usaha yang ia dapat dari PKKPM pada bulan Februari 2015 lalu dari pengajuan proposal usaha sebesar Rp 4.000.000. Modal tersebut ia gunakan untuk menambah pembelian bahan baku. Dari total modal yang ia terima, tidak semuanya ia gunakan untuk modal usaha, hanya sebesar Rp 2.500.000 saja ia gunakan untuk penambahan pembelian bahan baku, sisanya ia gunakan untuk biaya sekolah sang anak.

Omset yang mampu ia kumpulkan dalam se-minggu sebesar Rp 875.000, dari modal Rp 525.000 yang ia putar, sehingga per minggunya ia mendapat keuntungan bersih Rp 350.000. Jika dikalkulasi per bulan rata-rata ia mendapat keuntungan bersih setelah dipotong modal sebesar Rp 1.400.000. Namun ia juga harus membagi keuntungannya tersebut untuk membayar cicilan pinjaman dari P2B sebesar Rp 220.000 selama 18 bulan kedepan sejak bulan April 2015 ini.

Ia bercerita tentang hambatan yang ia rasakan untuk pemasaran yang lumayan susah ditembus jika di lini swalayan maupun toko besar karena tidak ada nya izin usaha yang resmi, sehingga dengan hal ini dirinya berharap agar tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah atau keberlanjutan pendampingan untuk dirinya agar terus bisa menjalankan usahanya tersebut. Meskipun kini kerupuk pak Tarno atau yang sering dikenal masyarakat dengan kerupuk SR sudah sangat dikenal, namun ia tetap berharap agar bisa dibantu untuk mengurus izin, baik itu dari dinas kesehatan maupun dinas lainnya agar usahanya tersebut lancar dan berkembang serta tidak tersandung izin dalam pemasaran.

LAMPIRAN 11

Cerita Narasi Anggota KPB yang Keluar Kelompok

**A. Kebosanan Ibu Tulip di KPB Melati 1.
Desa A1, Kecamatan A, Kabupaten Brebes.**

Pada awal mengikuti program PKKPM, Ibu Tulip bergabung dengan KPB Melati 1, yaitu pada 21 Juli 2014. Motivasinya bergabung tersebut adalah untuk menambah modal usaha pengasapan ikan yang telah ditekuninya sejak sebelum bergabung dalam program PKKPM. Selain tentang pemberian modal usaha, pada saat sosialisasi program PKKPM Ibu Tulip juga diberi tahu bahwa anggota KPB diharuskan mengikuti kegiatan kelompok, seperti melakukan pertemuan rutin, menabung, pelatihan, dll.

Setelah sekian lama mengikuti kegiatan kelompok, Ibu Tulip merasa tidak ada keuntungan yang ia peroleh dengan mengikuti program ini. Menurutnya, program ini hanya sekedar “program kumpul-kumpul” yang membuatnya harus meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, kegiatan kelompok yang monoton membuatnya merasa bosan melakukan kumpul-kumpul rutin tersebut. Ibu Tulip juga merasa bahwa dana pinjaman yang telah dijanjikan pihak pelaksana program tidak kunjung cair. Karenanya, pada Oktober 2014 ia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan KPB. Sebenarnya Ibu Tulip sudah berusaha menceritakan apa yang dikeluhkannya terkait belum cairnya dana pinjaman pada saat itu kepada KPMD, namun KPMD hanya menyuruhnya bersabar menunggu kelanjutan program ke depan.

**B. Terbantur waktu pertemuan, Pak Ajiji keluar dari keanggotaan KPB.
Desa D1, Kecamatan D, Kabupaten Pematang.**

Bapak Ajiji merupakan salah satu dari anggota KPB Mandiri di Dusun Gembol, Desa D1. Ia tergabung di KPB pada 27 Juni 2014 dengan motivasi utama adalah untuk mendapatkan modal usaha. Seiring dengan keikutsertaannya dalam program, ada beberapa hal yang memberatkannya untuk terus aktif sebagai anggota kelompok yang merupakan syarat mengakses pinjaman tersebut. Hal yang pertama adalah waktu pelaksanaan pertemuan rutin. Pak Ajiji merasa kesusahan membagi waktu antara waktu pertemuan rutin dengan waktu ia bekerja. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan menuntutnya harus selalu siap bekerja setiap permintaan pekerjaan datang, sehingga seringkali ia harus membolos dari pertemuan rutin. Hal yang kedua adalah kegiatan menabung. Penghasilannya yang tidak menentu membuatnya keberatan untuk menyetor tabungan dalam setiap pertemuan rutin. Sebenarnya ia sudah tidak setuju dengan kesepakatan awal kelompok agar para anggotanya menabung Rp5000 per pertemuan. Namun karena pada saat itu hampir seluruh anggota kelompoknya menyetujui maka mau tidak mau ia pun ikut menyetujuinya. Pada akhirnya, pada 20 Oktober 2014 Pak Ajiji membulatkan tekadnya untuk keluar dari KPB karena alasan-alasan keberatannya itu.

**C. Suami dilarang ikut pelatihan, Ibu Kori mengundurkan diri dari KPB
Desa C1, Kecamatan C, Brebes**

Ibu Kori adalah salah satu anggota dari KPB Sukarame, Desa C1, Kecamatan C, Brebes. Ia mulai aktif bergabung dalam kelompok PKKPM pada 7 Juli 2014 yang merupakan pula awal kelompok ini terbentuk. Dengan bergabung menjadi anggota KPB, beliau berharap mendapatkan modal dari PKKPM untuk mengembangkan usaha bengkel/tambal ban yang telah dilakukan suaminya sejak

sebelum Ibu Kori bergabung dalam PKKPM. Meski suami Ibu Kori memiliki bengkel tersebut, namun penghasilan utama keluarga lebih besar diperoleh dari pekerjaan suaminya yang juga sebagai buruh bangunan/tani. Hal ini karena usaha bengkelnya belum memiliki mesin kompresor sebagai alat pendukung utama. Dalam melakukan usaha bengkel/tambal ban tersebut, suami Ibu Kori biasanya dibantu oleh anak laki-laki mereka.

Ibu Kori mewujudkan keinginannya mendapatkan modal dengan mengajukan proposal usaha bengkel/tambal ban. Meski ia yang menjadi anggota KPB, tentunya ia berpikir bahwa pelatihan usaha bengkel/tambal ban yang diberikan program akan diikuti oleh suaminya. Namun, pada Musyawarah Desa Informasi Pelatihan Usaha (pada 7 Februari 2015) TPK menjelaskan bahwa pelatihan usaha wajib dilakukan oleh anggota yang terdaftar dalam KPB, tidak boleh diwakili anggota keluarga lainnya. Karenanya, TPK menyarankan agar suami Ibu Kori yang menjadi anggota KPB dan melakukan kegiatan kelompok agar ia tetap bisa mengikuti pelatihan usaha dan memperoleh pinjaman modal. Ibu Kori dan suaminya menolak saran tersebut dan cukup kecewa dengan keputusan TPK. Akhirnya Ibu Kori memilih mengundurkan diri dari kelompok dan tidak sempat mengikuti pelatihan keterampilan. Kondisi ini seakan membatasi usulan yang diajukan oleh anggota PKKPM, dimana usulan usaha hanya boleh dilakukan oleh anggota itu sendiri. Anggota keluarga yang juga bagian dari rumah tangga anggota tidak dapat berpartisipasi mengakses secara langsung manfaat program.

D. Tak bisa ikut kegiatan kelompok karena bekerja Desa E1, Kecamatan E, Pekalongan

Ibu Ara adalah salah satu warga Dukuh Bojongireng, Desa E1, Kecamatan E, Pekalongan. Ia tinggal dengan suami, 2 orang anak (1 orang balita dan 1 orang sudah bersekolah tingkat SD), dan ibunya yang sudah cukup renta. Kondisi rumah Ibu Ara sangat sederhana, sempit, berdinding papan dan berlantai tanah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Ibu Ara bekerja sebagai buruh petik teh dengan upah Rp15.000/hari dan suaminya bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Oleh karenanya, di dalam keluarga ini Ibu Ara bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga karena ialah yang setiap harinya mendapatkan penghasilan yang lebih pasti dibanding suaminya. Ibu Ara mengaku bahwa ia hampir tidak pernah berpikir untuk melakukan aktivitas lain selain bekerja.

Pertama kali Ibu Ara masuk sebagai peserta PKKPM adalah karena dirinya terdaftar dalam data BDT. Ia bergabung dalam KPB Cempaka pada 8 juli 2014. Pada kegiatan sosialisasi awal, ia mendapatkan informasi bahwa peserta program harus mengikuti pertemuan rutin kelompok, menabung, dll. Namun dalam pelaksanaannya, justru kegiatan tersebutlah yang tidak bisa dipenuhi oleh Ibu Ara. Perannya sebagai tulang punggung keluarga membuatnya tidak bisa hadir secara rutin dalam pertemuan kelompok. Hal ini terutama karena pertemuan rutin kelompok dilaksanakan pada siang hari (pukul 14.00) bersamaan dengan jadwal ia bekerja. Artinya, jika ia sengaja pulang lebih awal dari kebun untuk pertemuan rutin, berarti dia harus merelakan beberapa jam waktu kerjanya. Hal ini berdampak pada pendapatannya, yaitu menjadi berkurang karena teh yang dia petik berkurang timbangannya. Kondisi ini biasanya disebut "*ora kiyeng kumpulan*" atau "tidak ada waktu untuk berangkat kumpulan" oleh masyarakat dukuh setempat. Selain itu ia juga keberatan dengan aturan kelompok untuk menyetor tabungan pokok sebesar Rp5000 per pertemuan karena ia sulit membagi pendapatannya untuk menabung dan pengeluaran untuk jajan anak. Secara keseluruhan, Ibu Ara baru hadir di pertemuan kelompok sebanyak 3 kali saja. Setelahnya ia memilih keluar sebagai anggota kelompok karena alasan tersebut.

**E. Keberatan Menabung, Pak Ambre Mundur dari KPB Tani Klindon
Desa E1, Kecamatan E, Pekalongan**

Bapak Ambre merupakan salah satu mantan anggota KPB Tani Klindon di Desa F2, Kecamatan F, Pekalongan. Ia mengundurkan diri dari kelompok karena merasa keberatan mengikuti pertemuan rutin dan melakukan kegiatan menabung setiap minggunya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Ambre, istri dan orangtuanya. Mereka merasa bahwa untuk memenuhi jajan anak saja masih belum mencukupi, apalagi jika diharuskan menabung. Istri dan orang tua Pak Ambre juga tidak mendukung Pak Ambre untuk mengikuti kegiatan kelompok karena menurut mereka lebih baik Pak Ambre bekerja. Mereka menganggap bahwa kegiatan pertemuan rutin yang pelaksanaannya minimal 1 jam per minggu hanya menyita waktu Pak Ambre, padahal pada sore hari sekalipun, terkadang Pak Ambre masih harus bekerja. “Dari pada ikut kumpulan, tidak terlalu penting, lebih baik kerja saja sudah pasti dapat uang”. Pada sore hari biasanya ia harus mencari rumput untuk ternaknya dan terkadang masih harus bekerja sebagai buruh tani jika sedang ada orang yang memintanya bekerja. Oleh karenanya, Pak Ambre memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaan program PKKPM pada September 2014, yaitu setelah dua kali mengikuti kegiatan pertemuan rutin KPB. .

The SMERU Research Institute

Telephone : +62 21 3193 6336
Fax : +62 21 3193 0850
E-mail : smeru@smeru.or.id
Website : www.smeru.or.id
Facebook : The SMERU Research Institute
Twitter : @SMERUInstitute
YouTube : SMERU Research Institute